

Sejarah Perlawanan

Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme

Di Daerah Irian Jaya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1983/1984

SEJARAH

PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI IRIAN JAYA

Tim penyusun :

1. Drs. John Patiara.
2. Drs. Herman Renwarin.
3. Drs. Bondan Soedharto.
4. M. Palangan, B.A.

Kepada : Para pejuang
TRIKORA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMANTASI
SEJARAH NASIONAL
1983/1984

Penyunting :

1. Drs. R.Z. Leiussa MA.
2. Drs. Soewadji Sjafei
3. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja

Gambar kulit :
Iswar Ks.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 1301119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulis-an kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1983
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II IRIAN JAYA SELAYANG PANDANG	8
BAB III A. KEADAAN ALAM DAN PENDU- DUK	8
1. Keadaan Alam	8
2. Penduduk	15
B. SEJARAH SINGKAT	19
1. Zaman Prasejarah	19
2. Zaman Sejarah	21
BAB III PERLAWANAN SEBELUM PROKLA- MASI (1900 – 1945)	29
BAB IV PERLAWANAN SESUDAH PROKLA- MASI (1945 – 1963)	44
A. GERAKAN SOSIAL	44
B. ORGANISASI PERJUANGAN PENDUKUNG PROKLAMASI ...	50
C. TRI KOMANDO RAKYAT DI IRIAN JAYA	68
1. Usaha-usaha Belanda memisah- kan Irian Jaya dari RI	68
2. Perjuangan di bidang bersenjata .	80
D. PERSETUJUAN NEW YORK DAN DEWAN MUSYAWARAH PEPERA	102
BAB V PENUTUP	112
A. KESIMPULAN	112
B. SARAN	115
DAFTAR CATATAN	116

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kejadian-kejadian historis yang berhubungan dengan perlawanan Bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme khususnya di Daerah Irian Jaya.

Usaha ini merupakan langkah awal untuk memperoleh bahan-bahan penulisan sejarah yang akan dilakukan di waktu-waktu yang akan datang sebagai usaha menggali lebih jauh nilai-nilai kepahlawanan tersebut dari kurun waktu terdahulu hingga sekarang dan dari seluruh daerah diharapkan akan diperoleh suatu kumpulan nilai-nilai yang dapat dianggap bersifat nasional untuk diwariskan kepada generasi penerus guna memelihara kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pewarisan nilai-nilai kepahlawanan itu akan mendukung usaha besar yang senantiasa dilancarkan oleh Pemerintah dan Bangsa Indonesia yakni melestarikan kesadaran akan kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sama seperti di daerah-daerah lainnya, Bangsa Indonesia yang berdiam di daerah Irian Jaya sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme tidak begitu saja menerima keadaan tertindas dan terjajah itu. Baik terhadap kehadiran Pemerintah imperialisme dan Kolonialisme Belanda maupun terhadap Pemerintah Fasisme Jepang Penduduk Irian Jaya tidak pernah rela menerimanya. Berbagai usaha dilakukan mereka untuk tidak takluk begitu saja seperti tipu muslihat, diplomasi, menghindari perjumpahan dengan pihak penjajah (mengasingkan diri), mendirikan organisasi dibawah tanah dan yang lebih agresif adalah melakukan perlawanan bersenjata.

Disesuaikan dengan apa yang digariskan dalam term of reference (TOR) penulisan ini akan difokuskan pada usaha-usaha yang terakhir disebutkan di atas yakni usaha dalam bentuk perlawanan bersenjata. Lebih tegas dapat dikatakan bahwa yang menjadi topik utama dalam penulisan ini ialah perlawanan secara fisik dari rakyat Irian Jaya untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah.

Akan tetapi perlu dikemukakan di sini bahwa meskipun topik penulisan ini adalah perlawanan fisik namun dalam bagian tertentu ada juga disinggung dan diuraikan secara singkat tentang usaha pembebasan dalam bentuk lain. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan ciri khusus Daerah Irian Jaya dalam kesatuan dan keutuhan Wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan isi dan jiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Seperti yang telah disebutkan di atas ruang lingkup wilayah yang akan diungkapkan dalam penulisan ini adalah wilayah Administrasi Irian Jaya sebagai sebuah daerah Propinsi. Pada waktu penulisan ini dilaksanakan, Propinsi Irian Jaya terbagi dalam sembilan kabupaten masing-masing:

1. Kabupaten Jayapura dengan ibu kotanya Jayapura (sekaligus menjadi ibu kota Propinsi Irian Jaya)
2. Kabupaten Teluk Cenderawasih ibu kotanya Biak
3. Kabupaten Monokwari ibu kotanya Monokwari
4. Kabupaten Sorong ibu kotanya Sorong
5. Kabupaten Fakfak ibu kotanya Fakfak
6. Kabupaten Merauke ibu kotanya Merauke
7. Kabupaten Jayawijaya ibu kotanya Wamena
8. Kabupaten Paniai ibu kotanya Nabire
9. Kabupaten Yepen Waropen ibu kotanya Serui.

Ke sembilan kabupaten tersebut di dalam penelitian/penulisan ini dikelompokkan dalam tiga kesatuan wilayah, yaitu:

- a. Daerah Pantai Utara, yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Teluk Cenderawasih
 - 2) Kabupaten Yapen Waropen
 - 3) Kabupaten Jayapura
 - 4) Kabupaten Paniai
 - 5) Kabupaten Jayawijaya
- b. Daerah Pantai Selatan, yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Merauke
 - 2) Kabupaten Fakfak
- c. Daerah Kepala Burung, yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Sorong
 - 2) Kabupaten Monokwari.

Pengelompokan ke dalam tiga wilayah tersebut didasarkan pada kesatuan letak geografis dan intensitas pengaruh yang diterima dari daerah-daerah Indonesia lainnya.

Kesatuan letak geografis ditetapkan sebagai pegangan utama dalam pengelompokan itu karena di Irian Jaya tidak ada kesatuan-kesatuan wilayah secara politis seperti misalnya Kerajaan di daerah lainnya yang dapat di pakai sebagai batas ruang lingkup wilayah. Memang raja-raja juga dikenal di Irian Jaya bagian Barat terutama di Sorong dan Fakfak tetapi wilayah kekuasaan raja-raja tersebut hanya terbatas pada beberapa kampung/pemukiman satu suku atau juga ada yang batas wilayah kekuasaannya tidak melebihi batas kampungnya sendiri. Dengan demikian wilayah kerajaan di Irian Jaya sulit untuk dijadikan satu kesatuan wilayah/daerah penelitian dalam hubungannya dengan daerah Irian Jaya secara menyeluruh.

Adapun ruang lingkup yang sehubungan dengan batas waktu penulisan ini dimulai dari awal abad ke-XX tepatnya sekitar tahun 1900 sampai tahun 1962.

Penentuan batas waktu ini berdasarkan pengamatan dan penelitian sebelumnya dimana ternyata bahwa meskipun Daerah Irian Jaya telah didatangi oleh bangsa Eropah sejak awal abad keXVI tetapi kontak antara penduduk dengan pendatang Eropah itu hanya bersifat insidental. Keadaan itu berlangsung

lama yaitu kurang lebih 300 tahun. Baru pada awal abad XIX Orang Eropah mencoba menduduki daerah ini meskipun baru terbatas pada beberapa daerah tertentu. Demikianlah selama kurang lebih 300 tahun yakni dari awal abad ke XVI sampai awal abad ke XIX Daerah Irian Jaya secara *de facto* tidak dikuasai sepenuhnya oleh orang Eropah. Oleh karena itu perlawanan penduduk Irian Jaya terhadap orang Eropah sepanjang periode tersebut tidak ada dalam arti perlawanan fisik untuk membebaskan diri dari penjajah. Kalaupun ada perlawanan pada masa-masa itu sifatnya hanyalah pengacauan, perampokan atau semacamnya yang belum dapat dikategorikan sebagai perjuangan fisik menegakkan nasionalisme.

Setelah memasuki abad ke-XX ini barulah semakin nampak dengan jelas adanya perlawanan-perlawanan rakyat Irian Jaya terhadap pemerintah Imperialis dan Kolonialis sejalan dengan intensifikasi pemerintahan kolonial itu sendiri.

Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Daerah Irian Jaya masih tetap dikungkung oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Berbagai macam dalih dan cara digunakan Belanda untuk mempertahankan pendudukannya atas daerah tersebut. Dengan melalui perjuangan yang berat dan sulit Pemerintah Republik Indonesia akhirnya dapat mengembalikan Daerah Irian Jaya kedalam pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu berlangsung selama kurang lebih 17 tahun dan mencapai puncaknya pada tanggal 1 Mei 1962 ketika penyerahan kekuasaan secara *de facto* kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui UNTEA yaitu Badan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama priode tersebut rakyat Irian Jaya melakukan berbagai usaha untuk kembali bersatu dengan daerah-daerah lainnya di dalam kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Demikianlah dalam penulisan ini dibahas tersendiri pula tentang perjuangan rakyat Irian Jaya pada periode antara tahun 1945 — 1962, tidak saja perlawanan fisik tetapi juga perlawanan dalam bentuk lain sebagai mana telah dikemukakan terdahulu pada bagian awal tulisan ini.

Di dalam penelitian/penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dari sumber tertulis yang dapat ditemukan berupa buku-buku, dokumen, laporan dan lain-lain yang mempunyai kaitan dengan daerah Irian Jaya.
2. Wawancara dengan beberapa tokoh yang mempunyai pengalaman masa lampau tentang peristiwa-peristiwa perlawanan rakyat Irian Jaya terhadap imperialisme kolonialisme.
3. Pengalaman dan penghayatan anggota tim.

Harus diakui di sini bahwa pengumpulan data untuk bahan penulisan ini sebahagian besar bertumpu pada studi keputusan. Hal ini disebabkan karena sangat terbatasnya waktu (± 4 bulan) dan dana/biaya, sedangkan lapangan penelitian sungguh sangat luas ($\pm 3\frac{1}{2}$ XP. Jawa) tanpa tersedianya prasarana dan sarana komunikasi yang memadai terutama transportasi lewat darat. Belum ada jalan raya antara kabupaten di seluruh Daerah Propinsi Irian Jaya. Sarana transpor yang paling berperan adalah kendaraan air dan/atau udara di daerah-daerah pantai. Untuk daerah-daerah pedalaman hanya sebahagian kecil yang dapat dijangkau dengan pesawat udara sedangkan sebahagian besar lainnya hanya dengan jalan kaki atau sama sekali belum terjangkau dari dunia luar.

Setelah data terkumpul kemudian diseleksi, dianalisa dan disintesaikan untuk dimasukkan kedalam kerangka penulisan. Setelah itu dimulailah kegiatan penulisan yang menghasilkan suatu ceritera sejarah tentang perlawanan rakyat Irian Jaya terhadap imperialisme dan kolonialisme dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat uraian tentang tujuan penelitian/penulisan, masalah, ruang lingkup tempat/lokasi dan

waktu serta pertanggungjawaban ilmiah prosedur penelitian/penulisan.

Bab II Irian Jaya selang pandang

Didalam bab ini diuraikan secara singkat tentang keadaan geografis dan kependudukan serta sejarah singkat penemuan dan perkembangan pemerintahan dan politik Daerah Irian Jaya.

Bab III Perlawanan sebelum Proklamasi (1900 – 1945)

Pada bagian ini diuraikan secara luas tentang perlawanan fisik rakyat Irian Jaya di dalam menentang imperialisme dan kolonialisme Uraian tentang perlawanan rakyat Irian Jaya terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam periode ini berdasarkan atas pembahagian Wilayah geografis pantai utara, pantai selatan dan kepala Burung.

Bab IV Perlawanan sesudah Proklamasi (1945 – 1962)

Perlawanan rakyat Irian Jaya terhadap imperialisme dan kolonialisme periode 1945 – 1962) diuraikan agar lebih luas tidak saja perlawanan fisik tetapi juga perlawanan dalam bentuk lainnya yaitu: Organisasi Perjuangan mendukung proklamasi, Trikora di Irian Jaya dan kaitannya dengan daerah Indonesia lainnya serta usaha-usaha lain dengan tetap mengikuti pola pembagian wilayah yang tersebut diatas.

Bab V. Penutup

Memuat beberapa kesimpulan, daftar catatan dan daftar kepustakaan serta lampiran-lampiran.

Perlu dikemukakan pula di sini bahwa penulisan ini mengandung berbagai kekurangan yang tentunya disebabkan oleh berbagai hambatan dan kesulitan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu segala kritik untuk perbaikan tulisan ini akan disambut dengan segala senang hati.

Patut pula ditambahkan bahwa nama Daerah Irian Barat

dan Daerah Irian Jaya dalam tulisan ini adalah sama saja. Penggunaannya hanya disesuaikan dengan makna historis dan relevansinya dalam uraian.

Akhirnya pada kesempatan ini tim penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya hingga penelitian/penulisan ini dapat diselesaikan.

BAB II

IRIAN JAYA SELAYANG PANDANG

A. KEADAAN ALAM DAN PENDUDUK

1. Keadaan Alam

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih tiga ribu pulau. Salah satu di antara pulau-pulau itu adalah pulau Irian yang letaknya di ujung sebelah Timur Indonesia.

Pulau Irian adalah pulau terbesar di dunia setelah Tanah Hijau (Green Land), dengan bentuk yang menyerupai burung raksasa zaman purba sedang duduk berjongkok mengamati keadaan sekitarnya.

Secara politis Pulau Irian terbagi atas dua bagian dengan garis pembatas sekitar 141° B.T. Daerah yang terletak di sebelah Barat garis pembatas tersebut adalah Propinsi Irian Jaya¹ sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan daerah di sebelah Timur garis batas itu adalah Negara Papua Nugini.²

Propinsi Irian, yang besarnya hampir separuh Pulau Irian ($\pm 48\%$), mempunyai luas ± 416.000 km persegi termasuk luas pulau-pulau kecil di sekitarnya dan terletak antara 130° B.T. -- 141° B.T. dan 0° L.S. -- 10° L.S.

Daerah Propinsi Irian Jaya pada sebelah Timur langsung berbatasan dengan Negara Papua Nugini, di sebelah Selatan dengan laut Arafuru, di sebelah Barat dengan Propinsi Maluku dan di sebelah Utara dengan Lautan Teduh (Lautan Besar -- Lautan Fasifik).

Di dataran Irian Jaya terdapat banyak sekali sungai antara lain Sungai Memberamo yang memuntahkan 10.000 m^3 air tiap detik ke Lautan Teduh.

Memang sungai inilah yang terbesar di Irian Jaya sesuai dengan namanya yang berarti Air-Besar/Bah (*Mam- Beramu*). Sungai ini dapat dilayari dengan kapal kecil sejauh ± 95 km ke hulu sampai di Kasonaweja. Sungai besar lainnya ialah sungai Digul yang bermuara di Laut Arafuru dan dapat juga dilayari jauh ke pedalaman sampai di Tanah Merah sebuah kota kecil yang merupakan pusat daerah Digul tempat pengasingan para perintis/pejuang kemerdekaan Indonesia pada Zaman pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Sungai-sungai lainnya adalah: Sungai Balim, Sungai Lorentz, Sungai Kamundan, Sungai Apauwer dan lain-lain.

Sungai-sungai tersebut berhulu di daerah Pegunungan yang membentang sepanjang dataran Irian Jaya dari arah Barat — Timur antara lain Pegunungan Tamrau, Pegunungan Lina, Pegunungan Kumawa (di daerah Kepala Burung), Pegunungan Weyland, Pegunungan van Rees, Pegunungan Cyclop, Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya (di daerah bagian tengah). Dua pegunungan tersebut terakhir di atas ini mempunyai puncak-puncak tertinggi di seluruh Indonesia seperti: Puncak Jaya (± 5030 m), Puncak Trikora kira-kira 4750 m, Puncak Yamin (± 4595 m) dan Puncak Mandala (± 4760 m). Di atas puncak-puncak Jayawijaya inilah terdapat salah satu keanehan alam di jagat raya ini karena walaupun terletak di daerah tropis (katulistiwa) namun sepanjang tahun berselimutkan salju abadi.

Di Irian Jaya terdapat juga banyak teluk¹ antaranya: Teluk Yos Sudarso, Teluk Cenderawasih, Teluk Wandamen, Teluk Bintuni, Teluk Berau, Teluk Kamrau, Teluk Triton dan Teluk Arguni. Di sekitar pesisir pantai terdapat banyak pulau-pulau kecil yang mengelilingi daratan Irian Jaya seperti: Pulau Yapen, Pulau Biak, Pulau Numfor, Pulau-pulau Num, Pulau Roon, Pulau Rumberpon, Pulau-pulau Moor, Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Misool, Pulau Salawati, Pulau Panjang, Pulau Adi, Pulau Kolepon (Pulau Yos Sudarso) dan lain-lain.

Di daerah pantai Utara dan Pantai Selatan terdapat dataran rendah yang cukup luas yang ditumbuhi hutan hujan tropis yang lebat diselingi rawa-rawa dan sabana.

Garis pantainya sebahagian landai dengan pasir pantai yang luas terdampar dan sebahagian garis pantai lainnya curam berbatu karang. Pada beberapa tempat sepanjang pantai terdapat hutan bakau (mangrove).

Secara garis besar dataran Irian Jaya dapat dibagi dalam tiga bagian besar yaitu:

- a. Daerah Pantai Utara dengan dataran yang luas membentang sepanjang garis pantai diselingi pantai curam berbatu karang pada beberapa tempat
- b. Daerah Pegunungan di bagian tengah
- c. Daerah Pantai Selatan dengan hamparan dataran rendah yang sangat luas.

Di daerah-daerah pesisir pantai dan dataran rendah beriklim panas dengan kelembaban udara yang cukup tinggi (basah). Suhu berkisar antara 20°C – 35°C atau rata-rata 26°C per tahun. Semakin ke atas di daerah pegunungan suhu mengalami penurunan rata-rata $0,6^{\circ}\text{C}$ pada setiap kenaikan 100 m dari permukaan laut. Kemudian pada batas daerah bersalju udara semakin dingin sampai mencapai beberapa derajat di bawah 0 pada tempat salju abadi.

Curah hujan di daerah Irian Jaya rata-rata cukup tinggi yakni berkisar antara 2500 – 3000 mm/tahun. Karena curah hujan cukup tinggi maka batas antara musim panas dan musim hujan tidak begitu jelas kecuali di daerah pesisir pantai Selatan sekitar Merauke.

Karena Irian Jaya terletak di daerah tropika di antara Benua Asia dan Benua Australia maka iklim di daerah ini juga dipengaruhi oleh angin musim yaitu:

- 1). Angin Tenggara yang bertiup antara bulan Mei s/d Nopember

- 2). Angin Barat Laut yang bertiup antara bulan Desember s/d. April.⁴

Alam tumbuhan (flora) dan alam binatang (fauna) Irian Jaya mempunyai ciri tersendiri berbeda dengan alam flora dan fauna Indonesia bagian Barat.

Menurut para ahli dalam bidangnya flora dan fauna Irian Jaya lebih banyak persamaannya dengan flora dan fauna Benua Australia sedangkan flora dan fauna Indonesia bagian Barat lebih mendekati jenis flora dan fauna Benua Asia khususnya jazirah Asia Tenggara.

Di antara kedua wilayah flora dan fauna itu terdapat suatu wilayah peralihan yang juga disebut daerah jembatan. Demikianlah wilayah alam flora dan fauna di Indonesia ini di-bagi dalam tiga wilayah/zone yaitu:⁵

- a). Wilayah Indonesia bagian Barat yang meliputi pulau-pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Madura, Bali dan pulau-pulau kecil disekitarnya berciri Asia dan disebut "Orientalische Region"
- b). Wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Irian dan sekitarnya berciri Australia dan disebut *Australische Region*.
- c). Wilayah peralihan terletak di antara kedua wilayah tersebut di atas, meliputi pulau-pulau: Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Wilayah ini disebut *Australia – Malaische Region*. Di sini terdapat percampuran ciri-ciri flora dan fauna dari bagian Barat dan bagian Timur.

Antara Wilayah bagian Barat yang dikenal dengan nama Orientalische Region dengan wilayah peralihan yang dikenal dengan nama *Australo-Malaische Region* ditarik suatu garis pembatas yang disebut *Garis Wallace* dimulai dari Selatan di Selat Lombok ke Utara yaitu ke Selat Makassar terus ke Filipina Selatan dan membelok ke Lautan. Antara wilayah *Australo-Malaische Region* dengan wilayah *Australische Region* ditarik garis pembatas yang disebut *Garis Weber* dimulai dari Utara Pulau Morotai ke sebelah Barat Pulau Halmahera lalu

ke Selatan melalui selat Seram, berbelok ke Barat melalui Pulau Buru lalu kembali ke Timor melalui Laut Banda terus ke Kepulauan Babar, Ujung Timur Pulau Timor terus ke Lautan Indonesia.

Telah disebutkan di bagian depan bahwa sebagian besar daerah Irian Jaya masih tertutup hutan tropis. Hutan ini mengandung berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan yang berguna seperti kayu-kayuan yang bernilai ekonomis antaranya: kayu besi yang biasa juga disebut Merbau atau Bayam Api (*Intsia Biyuga/Intsia Spp.*), Cemara (*Casuarina Sp.*), Pohon Damar (*Agathis Alba*), Pohon Atsiri (*Eucalyptus Spp.*), Tamagama (*Araucaria*), Melur (*Podocarpus Spp.*), Dunung (*Heriteria Spp.*) Sukun (*Artocarpus Communis*), Bakau (*Rhizophora Spp.*) dan sebagainya. Tumbuhan lainnya yang berguna adalah: Rotan (*Calamus Spp.*), Pandan (*Pandanus Tectonius*), Nipa (*Nipa Fruticans*), Kelapa (*Cocos Nusifera*) dan Sagu (*Metroxilon-Rumphii/Sago Spp.*). Kelapa dan sagu tumbuh pada hampir sepanjang garis pantai dan pulau-pulau kecil.

Dua jenis tersebut belakangan ini yaitu kelapa dan Sagu adalah merupakan makanan pokok penduduk di samping Ubi jalar (*Ipomoea Spp.*), Keladi (*Colocasia Esculenta*), Ubi kayu (*Manihot Utilissima*), Pisang (*Musa Spp.*), Tebu (*Saccharum Spp.*), Jagung (*Zeamays*) dan sayur-mayur seperti bayam, kubis, sawi, dan lain-lain.

Di hutan-hutan, rawa-rawa dan sungai-sungai di Irian Jaya ditemukan berbagai jenis binatang reptilia amphibia, serangga, burung-burung dan berbagai binatang menyusui khas Irian Jaya. Jenis reptilia dan amphibia antara lain: penyu, buaya, ular dan katak dalam berbagai macam.

Jenis serangga yang terpenting ialah nyamuk Anopheles penyebar penyakit malaria dan nyamuk Aedes Aegyptia penyebar penyakit demam berdarah. Dari dahulu hingga sekarang daerah Irian Jaya terkenal sebagai sarang malaria.

Burung-burung di daerah ini merupakan masyarakat Fauna yang paling dominan karena kaya akan jenis dan jumlahnya.

Burung-burung terkenal dari daerah ini ialah: Burung Cenderawasih atau juga disebut Burung Dewata (*Paradisidae*) yang berbulu ekor panjang indah menawan bagai pelangi senja hari, Burung *Mambruk* (sejenis merpati) yang terkenal diantaranya ialah Merpati Mahkota (*Goura Coronata*) dengan bulu jambul bagai tiara/mahkota menghias di kepala, Merpati kipas (*Goura Victoria*) dengan jambul bagai kipas dayang-dayang istana, burung kakatua (*Pstittasidae*) dalam beberapa jenis dan burung kasuari yang bulunya kasar bagai daun cemara (*Casuarii*). Burung kasuari ini merupakan raja hutan di Irian karena besar dan kuat serta berani. Lagi pula burung ini mampu berlari kencang bagai kuda tetapi tidak dapat terbang karena sayapnya terlalu kecil untuk mengangkat badannya yang terlalu besar kadang-kadang mencapai tinggi 2 m.

Burung ini juga berjengger seperti ayam sehingga disebut *ayam kuda* (*Hippalectriyo*).

Jenis binatang laut hampir sama saja dengan Indonesia lainnya di mana terdapat berbagai jenis ikan udang, teripang, ubur-ubur dan lain-lain.

Jenis binatang laut terutama ikan di Irian Jaya dapat dikatakan sama saja dengan di daerah Indonesia lainnya, maka berlainan halnya dengan jenis ikan air tawar. Sungai, danau-danau dan rawa-rawa/paya-paya di sini tidak banyak mengandung ikan bahkan dapat dikatakan miskin akan jenis ikan asli Irian. Ikan air tawar asli di sini adalah dari jenis yang masih dalam tingkat sederhana, sedangkan ikan-ikan yang bernilai ekonomi seperti ikan tawes, sepat, mas dan ikan nila baru dibawa masuk ke Irian Jaya sekitar perempatan kedua abad ke XX ini bersamaan dengan masuknya orang-orang buangan pemerintah kolonial Belanda yakni para perintis Kemerdekaan Indonesia.

Keadaan fauna jenis binatang menyusui juga sama halnya dengan jenis ikan air tawar yaitu "miskin binatang asli. Kalau

sekarang ini banyak terlihat binatang besar seperti sapi, kerbau, kura, rusa dan kambing itu adalah jenis binatang yang baru dikenal beberapa puluh tahun terakhir yang dimasukkan dari daerah lain. Babi pun yang dapat dikatakan sangat akrab dengan kehidupan penduduk Irian bukanlah binatang asli daerah ini. Babi (*suidae*) diperkirakan masuk ke Irian beberapa abad yang lampau bersamaan dengan masuknya kelompok-kelompok imigran gelombang ke-III dari benua Asia khususnya dari Indocina pada masa terjadinya perpindahan bangsa-bangsa.⁶ Binatang menyusui asli Irian yang dapat dikemukakan di sini adalah dari jenis binatang yang masih berada dalam tingkatan sederhana dengan bentuk tubuh kecil-kecil dari keluarga hewan berparuh burung dan hewan berkantong seperti: Landak Semut (*Echidnidae*), Kuskus (*Phalangeridae*) dalam beberapa jenis, hewan pengerat (*Rodentia*) diantaranya beberapa jenis tikus, kalong (*Pteropodidae*), Hidung tapal kuda (*Rhinolopidae*) Kanguru (*Macropodidae*) dan *Dendrologus*) dan lain-lain. Binatang-binatang liar/buas yang berbadan besar seperti: Singa, harimau, gajah, badak, kera dan lain-lain tidak ditemukan di rimba raya Irian Jaya.

Selain kekayaan flora dan fauna yang khas Irian, Daerah Irian Jaya memiliki pula kekayaan alam di bawah tanah berupa cebakan-cebakan mineral (bahan-tambang). Sebagian lainnya telah diolah seperti minyak tanah di Daerah Kepala Burung, di Mimika (Tembagapura) sebagian lainnya masih terpendam di perut bumi menunggu pengolahannya seperti: nikel, kobalt, chrom, asbes, marmer, biji besi, emas, perak dan batu bara.⁷

Demikianlah secara umum dapat digambarkan bahwa Daerah Irian Jaya mempunyai permukaan tanah yang kasar karena banyak terpotong oleh sungai-sungai, gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang curam dan dalam, rawa-rawa dan hutan belantara jenis hutan hujan tropis yang gelap dan lembab menyebabkan sulitnya membuat sarana perhubungan terutama perhubungan darat.

Kesuburan tanahnya sedang dengan kandungan alam baik yang di atas maupun yang di bawah permukaan tanah cukup potensial, dalam kawasan bumi beriklim tropis dengan ciri utamanya panas, lembab dan banyak hujan di antara tiupan Angin Musim Barat Laut dan Angin Musim Tenggara.

2. Penduduk

Menurut penelitian para ahli penduduk asli Irian merupakan percampuran dari berbagai ras, baik secara berdampingan maupun secara perpaduan antara: ras Weddoid, Ras Negroid/Negritoid, Ras Melanesoid dan Ras Mongoloid.

Tentang asal-usul penduduk Irian belum ada kesepakatan para ahli namun banyak pendapat yang cenderung menyatakan bahwa penduduk Irian adalah pendatang yang masuk ke daerah itu secara bergelombang dari daerah di sebelah Barat Pulau Irian yakni dari Asia dan/atau Kepulauan Indonesia lainnya.⁸

Dari hasil perhitungan penduduk tahun 1971 diketahui bahwa, jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya pada waktu itu adalah sebanyak 923.440 jiwa dan pada tahun 1980 menunjukkan jumlah sebanyak 1.107.291 jiwa dengan perincian sebagai berikut:⁹

Nomor	Nama Kabupaten	Jumlah penduduk
1.	Merauke	172.552
2.	Jayawijaya	225.136
3.	Jayapura	149.618
4.	Paniai	160.874
5.	Fakfak	59.011
6.	Sorong	134.794
7.	Monokwari	84.343
8.	Yappn Waropen	49.982
9.	Teluk Cenderawasih	70.981
	Jumlah	1.107.291

Kepadatan penduduk rata-rata 2 jiwa/km² (dibulatkan). Bila diperhatikan lebih mendalam ternyata bahwa perkembangan penduduk selama kurang lebih 10 tahun terakhir \pm 20% atau rata-rata 2%/tahun.

Persebaran Penduduk tidak merata. Perkampungan/pemukiman pada umumnya terkumpul pada lembah-lembah aliran sungai, pesisir pantai tertentu, tepi-tepi danau dan tempat-tempat yang subur untuk pertanian. Tempat tinggal (rumah) terbuat dari bahan-bahan setempat berupa kayu, pelepah sagu (gaba-gaba), nibung atau pinang hutan, rumput dan rotan atau akar untuk pengikat.

Bentuk rumah bermacam-macam namun dapat digolongkan atas: rumah panggung dengan tiang-tiang kayu yang tinggi, rumah persegi berlantai tanah dan rumah bulat setengah bola berlantai tanah.

Mata pencaharian pokok penduduk adalah bertani dengan sistim perladangan berpindah-pindah tanpa irigasi (*shifting cultivation*), meramu sagu, menangkap ikan, berburu dan beternak terutama babi.

Kebanyakan penduduk telah bermukim tetap namun masih ada beberapa kelompok/suku di pedalaman yang tempat pemukimannya berpindah-pindah. Hal ini sejalan dengan mata pencaharian pokok yaitu berburu atau bertani tanpa pengolahan tanah yang intensif. Hutan dirambah kemudian dibakar lalu ditanami dan setelah memetik hasil beberapa musim tanahnya sudah tidak subur lalu ditinggalkan mencari areal baru.

Alat-alat keperluan hidup sehari-hari telah banyak yang menggunakan alat dari pada besi atau bahan-bahan moderen lainnya, namun masih ada beberapa suku bangsa di daerah pedalaman yang masih menggunakan alat-alat dari pada batu untuk penetak/pemotong dan penggaruk sedangkan alat pertanian terbuat dari tongkat kayu yang diruncingkan yang dikenal dengan hama (*tugal (digging stick)*).

Kelompok penduduk yang mendiami suatu pemukiman tertentu pada umumnya merupakan suatu suku bangsa tersen-

diri dengan bahasa yang berbeda dengan kelompok lainnya. Hingga sekarang ini diperkirakan terdapat \pm 200 suku bangsa yang terdapat di Irian Jaya. Usaha-usaha untuk mengenal dan mengetahui lebih mendalam tentang penduduk Irian Jaya tetap berlangsung sampai sekarang karena memang masih terdapat beberapa kelompok/suku bangsa di daerah-daerah pedalaman yang belum di/mengenal dunia luar.

Meskipun bahasa-bahasa penduduk Irian Jaya cukup banyak tetapi oleh para ahli dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu kelompok bahasa Indonesia, kelompok bahasa Melanesia dan kelompok bahasa Irian (dulu disebut Bahasa Papua).

Bahasa Indonesia ternyata telah berperan besar sejak zaman Pemerintah Kolonial Belanda yang dengan keadaan terpaksa menetapkan bahasa Melayu (asal Bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantar dan bahasa pergaulan dengan/antar penduduk asli karena setelah diteliti ternyata bahwa dari sekian banyak bahasa di Irian Jaya tidak ada satupun yang dapat dijadikan bahasa pengantar/pergaulan untuk seluruh suku bangsa itu.¹⁰

Sebagai bukti betapa peranan Bahasa Indonesia pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, penulis menyaksikan sendiri ketika baru tiba di daerah ini sekitar tahun 1963/1964 (belum lama berselang Belanda pergi).

Pada waktu itu penduduk asli dapat dengan mudah diajak bercakap-cakap dalam Bahasa Indonesia walaupun dengan logatnya yang khas. Juga ditemukan beberapa keluarga pegawai yang anak-anaknya tidak tahu lagi menggunakan bahasa ibunya sehingga Bahasa Indonesialah yang digunakannya sebagai bahasa ibu.

Begitu juga arsip surat-surat, selebaran, pengumuman dan semacamnya pada kantor pemerintah ataupun swasta dan buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah sebagian besar ditulis dalam Bahasa Melayu (= Bahasa Indonesia).

Dari segi kepercayaan/agama, penduduk Irian Jaya sebagian besar telah memeluk Agama Kristen (Katolik dan Pro-

testan, sebagian lainnya memeluk Agama Islam, Hindu, Budha dan juga ada yang masih tetap dalam kepercayaan yang asli.

Perincian keadaan penduduk menurut agama yang dianutnya pada setiap kabupaten adalah sebagai berikut:^{1 1}

No.	Kabupaten	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Merauke	11.000	125.928	31.617	9	4	168.600
2.	Jayawijaya	1.234	38.367	180.999	—	—	220.600
3.	Jayapura	38.932	8.585	101.502	230	369	149.618
4.	Paniai	4.515	45.885	110.441	29	29	160.874
5.	Fakfak	20.706	21.211	17.036	17	—	58.970
6.	Sorong	34.967	8.866	90.695	74	192	134.794
7.	Monokwari	11.436	5.644	67.220	5	38	84.343
8.	Yapen Waropen	1.968	347	47.658	1	8	49.982
9.	Teluk Cendra- wasih	8,121	1.548	61.112	53	118	70.952
	Jumlah	132.930	256.209	708.279	397	800	1.098.615

Adapun sistem kekerabatan dalam kebanyakan masyarakat Irian Jaya sering tidak tegas/jelas mengenai prinsip-prinsip ikatannya. Ada kelompok yang tampaknya mengikuti sistem patrilineal, tetapi hukum warisnya bersifat bilateral sedangkan pola-pola pergaulan sosialnya lebih mendekati sistem matrilineal. Sebaliknya ada pula sistem kekerabatan yang sifatnya bilateral tetapi menunjukkan pula tendensi patrilineal.^{1 2}

Namun demikian tentang sistem kekerabatan ini masih perlu kiranya penelitian yang lebih luas dan mendalam untuk kemudian mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih tepat. Masih banyak kelompok suku yang masih terbuka untuk bidang penelitian ini guna melengkapi hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, Prof. Kuntjaraningrat berkesimpulan, bahwa kebudayaan penduduk Irian Jaya tidak menunjukkan banyak perbedaan pada unsur-unsur la-

hiriah seperti teknologi, mata pencaharian dan kesenian, tetapi juga pada unsur-unsur yang bersifat lebih mendalam seperti sistem kemasyarakatan dan bahasa. Dengan tidak mengingkari adanya ciri-ciri keseragaman yang terdapat pada berbagai kelompok/suku Irian, antropolog, tersebut menyatakan bahwa penduduk Irian Jaya tidak merupakan suatu kesatuan tetapi menunjukkan suatu aneka warna yang amat besar.¹³

B. SEJARAH SINGKAT

1. Zaman Prehistori

Pengaruh dunia luar teristimewa dari Barat telah dirasakan di Irian Jaya secara nyata pada pertengahan pertama abad ke-XIX, namun sebagian terbesar dari penduduk pulau ini masih belum mengenal tulisan sampai tahun 1960 dan hidup pada zaman prehistori. Keadaan prehistori di Irian Jaya diketahui lewat penelitian-penelitian yang serba terbatas dan baru pada tahap awal.¹⁴ Benda-benda prehistori yang diketemukan meliputi benda-benda mesolitik seperti flakes, tembikar-tembikar alat-alat pengaruk, mata panah/tombak, lukisan-lukisan pada dinding gua, cap-cap tangan dan kaki.

Selain ini ditemukan juga peninggalan-peninggalan neolitik seperti terutama kapak batu lonjong (kapak persegi) pecahan-pecahan tembikar yang berwarna. Semua penemuan ini terdapat di atas permukaan tanah. Selain ini juga tembok-tembok perbentengan, bangunan-bangunan yang berhubungan dengan tempat persajian dongeng-dongeng suci tentang nenek moyang yang kawin dengan bidadari dari langit. Lebih lanjut ditemui juga corak mengalikit Indonesia seperti lesung-lesung dan patung-patung nenek moyang.

Berdasarkan tempat-tempat penemuan ini dan jenis-jenis peninggalan ini, A. Riesenfeld (1950) berteori bahwa Irian Jaya menerima pengaruh Asia-Tenggara dari dua jalur yakni lewat Indonesia bagian Selatan, lewat Maluku dan dari Filipi-

na, Sulawesi Utara Melonesia menuju sungai Sepik,¹⁵ Ternyata kedua arus ini hanya mempengaruhi daerah pantai.

Pendukung kulit coklat kekuning-kuningan dan berambut ikal. Mereka ini oleh para sarjana disebut orang "Melanesia asli". "Melanesia primitif Proto Plonesia". Kedatangan mereka ternyata mampu mempengaruhi; kebudayaan milik Penduduk asli setempat apalagi dengan kedatangan orang-orang Melanesia yang lebih kemudian. Hal ini terbukti dengan benda-benda megalitik, adanya beberapa jenis tanaman (ubi jalar, keladi dan tebu), babi, lesung-lesung batu, pembuatan bahan-bahan tembikar dengan teknik Coiling, kapak persegi, adat istiadat, pengayuan, upacara kematian dan lain-lain. Pengaruh para pendatang ini bergelombang dalam jangka waktu yang panjang dan tetap mempengaruhi kebudayaan di pesisir pantai, tentunya lebih intensif lagi.

Selain penemuan hasil-hasil kebudayaan dari batu ditemui juga benda-benda perunggu seperti kapak-kapak perunggu sebagai salah satu ciri kebudayaan Dongson yang ditemui di beberapa tempat di Asia Tenggara: Kapak Corong (*socketed bronze axe*), Kapak upacara (*Ceremonial/axe*) (1930) dan tipe kapak upacara *monstrans* mata tombak dan sebuah tangkai pisau belati, tangkai-tangkai kapak berlobang, fragmen kapak, nekara-nekara perunggu (1959), pecahan-pecahan tembikar yang ada persamaannya dengan penemuan-penemuan di Sulawesi Tengah, gumpalan imonit, manik-manik juga gelanggang kaca. Penemuan-penemuan ini menunjukkan adanya perkembangan kebudayaan megalithik akhir sebelum kebudayaan Dongson di daerah Irian Jaya.¹⁶

Lukisan-lukisan pada dinding-dinding gua-gua banyak ditemui pula terutama di celah-celah tebing di tepi laut yang tidak diketahui asal usulnya. Keterangan yang serba terbatas diperoleh dari Dongeng-dongeng suci yang masih hidup di masyarakat yang berhubungan dengan nenek moyang mereka seperti nampak di Teluk Triton, Teluk Berau, Bicari dan Sentani. Dari antara tempat ini penemuan di Teluk Berau lebih

mengesankan karena selain menggambarkan orang, juga hewan-hewan seperti kadal, ikan, belahan perahu. Roder dan Galis berpendapat bahwa lukisan-lukisan ini bersifat abstrak.¹⁷

Sampai tahun 1963 pengaruh Kebudayaan Prehistori sudah tidak begitu nampak lagi, apalagi sekarang. Dalam hubungannya dengan ini berikut dikemukakan beberapa pokok:

- a. Di daerah pegunungan di pedalaman Irian Jaya masih sempat ditemui suku-suku tertentu yang berkebudayaan neolitik baik berupa peninggalan-peninggalan maupun jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan untuk membuat rekonstruksi tentang zaman ini. Contoh yang jelas ialah suku bangsa Timorini. Keadaan suku bangsa ini dapat digolongkan ke dalam "kebudayaan neolitik hidup" dan kapak batu lonjong sebagai *leitfossilnya*;
- b. Pembuatan kapak batu, pisau dan pahat oleh suku bangsa di pegunungan Cycloop dekat Jayapura dari jenis batu yang keras dan indah seperti *nehrite*.

Apa yang dapat dibatasi dari arus pengaruh prehistori ini ialah bahwa pantai barat dan utara Irian Jaya mendapat pengaruh yang lebih terasa dibandingkan dengan daerah dataran rendah bagian selatan Irian Jaya. Adanya beberapa kapak batu lonjong dan lukisan-lukisan yang cenderung merupakan kebudayaan yang sama, yakni "*Light skinned stone using immigrants*".¹⁸ Ini menunjukkan adanya suatu "jalur merah" untuk Irian Jaya dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia.

2. Zaman Sejarah

Jalur itu nampak pula pada zaman sejarah Irian Jaya yakni dengan terjalannya daerah ini secara nyata dengan pusat-pusat pemerintahan, kerajaan-kerajaan dan Kesultanan di daerah Indonesia lainnya.¹⁹

Hubungan dengan kesultanan.

Berita-cerita tentang Sriwijaya pada abad ke 8 Masehi menje-

laskan tentang adanya orang-orang *Janggi* yang berwarna kulit gelap dan berambut kriting yang pada waktu itu dianggap sebagai hadiah.

Demikian juga nama *Tung-ki* yang memiliki ciri yang sama dengan para *Janggi* diwartakan pula oleh Chou Yu Kwa (abad ke XIII). Diduga bahwa daerah mereka terletak di Wainin, Serang Timur seperti termuat dalam Negarakertagama pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk dan Mahapatinya, Gajah Mada.

Kenyataan-kenyataan ini memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk menerima Sumpah Sakti Palapa mahapati ini sebagai ungkapan bahwa minimal ketiga daerah tersebut di atas dan daerah-daerah sekitarnya mengakui susereinitasnya Kerajaan Mojopahit.

Sungguhpun demikian pengaruh kesultanan Tidore di Irian Jaya tidaklah lebih baik dari hubungan Sriwijaya dan Mojopahit dengan daerah Irian Jaya karena gelar-gelar yang disandang oleh pemuka-pemuka masyarakat sedikit banyak bermakna sebagai semacam "perantara".²⁰ Keadaan ini menandakan bahwa pengaruh dunia luar tidaklah diterima dengan mudah oleh rakyat pesisir pantai, sungguhpun penduduk daerah bagian barat dan utara Irian Jaya lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan kultural bila dibandingkan dengan daerah selatan.

Penduduk Irian Jaya untuk pertama kalinya berhubungan dengan orang Barat pada tahun 1529 yakni dengan Alvero da Saavedra yang diutus oleh Gubernur Spanyol di Tidore ke Meksiko. Setelah ini juga Ortiz de Retes bersama dengan anak buahnya mendarat di pantai utara Irian Jaya. Nama yang diberikan kepada pulau ini adalah Neuw Guinea berdasarkan pertimbangan bahwa penduduk yang sempat mereka saksikan secara laheriah sama dengan penduduk di pantai Emas (Guinea)²¹ - Sungguhpun demikian pelat-pelat Spanyol tidak menguasai Irian Jaya apalagi seluruh Indoensia Arti nama Guinea kembali lagi beberapa kali dalam sejarah daerah ini sesuai dengan dominasi kekuasaan yang dialaminya.

Kehadiran Pemerintah Kolonial Belanda secara fakta baru pada tanggal 24 Agustus 1828 dan selanjutnya menggunakan kekuasaan dan pengaruh Sultan Tidore sebagai jalur untuk menanamkan pengaruhnya. Dalam pada itu pada tahun 1871 di semenanjung Bonpland (sebelah timur Teluk Yos Sudarso) ditempatkan tanda lambang pada garis meridian 140° timur Greenwich. Selanjutnya luas daerah yang dikemukakan dalam Almanak Pemerintah Kolonial Belanda meliputi wilayah dari Seprop Maneh (Bonpland) menelusuri Irian Jaya bagian barat terus ke selatan (1879).

Setahun setelah ini Almanak resmi PKB lainnya kembali menegaskan tentang tapal batas Republik Indonesia Papua Nugini (Irian Barat dan Irian Timur) pada garis meridian $141^{\circ}, 1', 47''$ yang ditarik ke utara melewati palung sungai Fly sampai ke dekat Jayapura, garis meridian $141^{\circ}22''$ -

Penentuan tapal batas wilayah Pemerintah Kolonial Belanda paling timur ini memberi peluang baginya untuk mengalihkan pengaruh kesultanan Tidore lebih nyata lagi. Kehadirannya dipusat Kesultanan Tidore dinyatakan oleh armada-armada hongi yang dikerahkan oleh Sultan Tidore dalam memungut upeti dalam bentuk hasil-hasil hutan dari penduduk daerah pengaruhnya di Irian Jaya khususnya bagian Monokwari, Biak, Sorong, Fakfak dan Kaimana.

Pada bulan Juli 1828 Penguasa PKB pertama A.J. van Delden dikirim oleh Gubernur Maluku dengan tugas membangun perbentengan bagi kesatuan militer Belanda di kaki gunung Lamanciri dengan bantuan penduduk asli setempat. Segera setelah proklamasi pendirian pos PKB ini, Fort Du Bus, dilanjutkan oleh penandatanganan surat-surat perjanjian oleh Sendawan (Raja Namatota) Kassa (Raja Lakapia dan Lutu), Orangkaya Lobo dan Mawara. Para wakil rakyat ini diangkat sebagai kepala daerah bawahan ²³

Upaya PKB membangun perbentengan di tempat lain, selain Ford Du Bus ternyata menemui banyak tantangan, terutama kesulitan alam, pembiayaan serta tenaga manusia

yang terbatas sehingga pada tahun 1961 diputuskan untuk tidak melanjutkan usaha semacam ini. Apapun yang terjadi, proklamasi Ford Du Bus itu merupakan pula satu pernyataan tentang penguasaan secara resmi PKB atas daerah Irian Jaya.

Penanaman kekuasaan PKB ini makin nyata seperti nampak pada akhir abad XIX. Mula-mula daerah Irian Jaya diabaikan karena kesan Belanda, daerah ini tidak subur. Namun kemudian ternyata tidak. Pada tahun 1898 PKB membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua bagian besar, dan kemudian dipecah menjadi tiga. Perhatian PKB tertuju pada daerah Irian Jaya bagian utara selatan yakni Fakfak dan sekitarnya serta Merauke. Kesangsian PKB tentang kesatuan Irian Jaya berkurang setelah usaha-usaha yang dilakukan badan-badan penyebar agama, yang dilanjutkan secara bersama dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi²⁴ yang dilakukan mula-mula oleh *Nederlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschapp*, maskapei yang berusaha dalam bidang pengadaan minyak tanah. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung terus sampai tahun 1960²⁵ -

Dalam kenyataannya kegiatan ketiga instansi ini saling isi mengisi. Tidak mustahil bahwa tidak ada semacam persekutuan diantara mereka. Sampai saat ini belum sempat बनारन dokumen resmi sebagai bahan buktinya. Usaha-usaha mereka meningkat terus pada pertengahan pertama abad ke XX. Pihak PKB terkenal dengan kegiatan ekspedisi-ekspedisi militernya dan bergerak secara leluasa di berbagai daerah. Zending lebih mengarahkan perhatiannya dibagian Barat dan Utara dengan pos-posnya. Sedangkan Missi Katolik Roma (MKR) di daerah dataran rendah Irian Jaya bagian selatan dengan stasi-stasinya. Satu hal yang pasti ialah bahwa pembukaan desa pada mulanya dilakukan oleh kedua instansi penyebar agama ini dengan menempatkan guru gurunya disana. Pegawai-pegawai PKB hanya bertempat tinggal di pos-pos PKB yang biasanya dikawal oleh polisi umum. Kehadiran mereka ini memunculkan golongan perantara dalam stratifikasi masyarakat kolonial yang menentukan dalam banyak hal di desa²⁶

Sampai sedemikian jauh belumlah jelas apakah semua kegiatan yang dilakukan baik oleh instansi-instansi swasta maupun pemerintah merupakan perwujudan langsung data maupun pemerintah merupakan perwujudan langsung dari politik etik (edukasi, irigasi dan imigrasi).

Namun demikian bersamaan dengan perluasan jaringan Pemerintah PKB terbuka pula kemungkinan baginya mengamankan kepentingannya terutama yang bertalian dengan pembatasan kegiatan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Di jantung pulau Burung raksasa, Irian Jaya terletak Tanah Merah yang terisolasi dari dunia luas dan yang berada ditengah-tengah bersarangnya nyamuk-nyamuk malaria serta tantangan alam yang selalu mengancam setiap orang yang akan meninggalkan tempat ini atas inisiatif sendiri. Di Tanah Merah inilah diasingkan para perintis kemerdekaan di kamp pengasingan (*interningskamp*)²⁷ dengan maksud untuk meloyokan mereka.²⁸ Kita mengenal nama-nama seperti Mohamad Hatta Sutan Syahrir, K.M. Ahmad Chatib, R. Moh. Said.²⁹ Keterasingan dan siksaan yang dideritanya membuat fisik mereka lemah bahkan ada pula dari antara mereka yang meninggal, namun semangat mereka tak kunjung padam. Mereka melanjutkan perjuangan secara lebih gigih lagi setelah meninggalkan Tanah Merah. Digul dengan Tanah Merahnya telah menunjukkan satu arti kesatuan perjuangan rakyat Indonesia kesatuan wilayah dan idiologi perjuangan.

Penduduk Jepang di Indonesia, khususnya di Irian Jaya sebelum Perang Dunia ke II, ternyata telah dipersiapkan secara terencana. Hal ini ternyata dari kemampuan mereka melemahkan kedudukan yang berpusat di samudra Pasifik. Sungguhpun demikian pendudukan Jepang segera berakhir dengan kehadiran pasukan-pasukan Sekutu yang mendarat di Jayapura di bawah pimpinan Jenderal Douglas Mac Arthur. Melalui taktik loncatan-katak Sekutu dapat mengakhiri dominasi Jepang di daerah Irian Jaya.

Secara khusus oleh PKB dalam pelarian di Australia dibentuk *South West Pasific Area* (SWPA) yang bekerja sama dengan *South East Asian Command* yang dipimpin oleh Lord Louis Mountbatten yang berpengaruh di daerah Sumatra, SWPA menyiapkan kesatuan-kesatuan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Kehadiran satuan-satuan NICA di Irian Jaya dimaksudkan selain sebagai pasukan-pasukan Sekutu yang mempermudah hubungan dengan penduduk, juga merupakan gambaran penguasa-penguasa sipil PKB yang akan bertindak sebagai administrator.³⁰ Mereka akan berkuasa di daerah-daerah atau pos-pos pasukan Sekutu dan akan memerintah terus bila tentara Sekutu telah meninggalkan Irian Jaya, seperti memang ternyata demikian.

Baik diantara perajutir-perajurit NICA maupun komandan-komandannya terdapat putera-putera Indonesia yang berasal dari daerah Indonesia lainnya. Salah seorang dari komandannya adalah R. Abdoelkadir Werjoatmaja yang berkedudukan sebagai bupati (*ressident*) pertama di Irian Jaya. Ia bertugas terus sampai diganti oleh *ressident* Y.P.K. van Eechoud yang kemudian diganti pula oleh Gubernur Irian Jaya pertama. Dalam padaitu sikap anti kolonialisme Belanda nampak pula di kalangan para pejuang asal Irian Jaya yakni di Jayapura, Serui dan Kokas (Fakfak).³¹ Masa antara tahun 1946 sampai tahun 1961 merupakan masa upaya PKB menjadikan Irian Jaya sebagai wilayah yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keadaan yang timbul sebelum dan sesudah rencana Papuanisasi (*Papoeanisering*).

Berdasarkan pengalaman penulis, sungguhpun belum sempat ditemukan sumber yang memperkuatnya secara khusus, namun Papuanisasi muncul secara lebih jelas sekitar tahun 1958. Usaha-usaha PKB ke arah ini telah direncanakan pada tahun 1946, dikemukakan secara mendasar dalam rencana Pengembangan *Nieuw-Guinea* pada tahun 1953.³² Dalam rangka ini diberikan perhatian yang khusus pada munculnya pegawai-pegawai pemerintah kolonial dan peraturan-peraturan

kepegawaian yang kian memberikan kedudukan yang jelas bagi orang-orang asli daerah ini. Hal ini didasarkan atas apa yang oleh pihak Belanda dinamakan "Kriteria Internasional", sebagaimana tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 73. Pada pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas mengemukakan tentang kemungkinan memerintah sendiri (*Beherende Mogenheid*).^{3 3}

Selanjutnya untuk meningkatkan usaha Papuanisasi dan untuk memberikan kesan kepada rakyat daerah ini pada khususnya dan pihak luar pada umumnya tentang usaha memisahkan Irian Jaya di atas, dibentuklah Dewan Papoea (*Nieuw-Guinea Raad*) sebagai "perwujudan Demokrasi."^{3 4} Untuk memperkuat hal terakhir ini dibentuk pula Komite Nasional Papua yang terkenal dengan manifestonya.^{3 5}

Perkembangan sampai dengan manifesto itu ternyata membenarkan bangsa Indonesia mengambil langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan masalah Irian Jaya. Banyak langkah-langkah dan usaha ditempuh tetapi tidak membawa hasil yang menyenangkan. Oleh karena itu pada tanggal 19 Desember 1961 dikumandangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA), yang pada dasarnya berusaha menolak dan menggagalkan Negara Papua Barat.^{3 6} Sengketa mengenai Irian Jaya itu baru dapat diselesaikan dengan damai setelah penandatanganan persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di New York tanggal 15 Agustus 1962.^{3 7} Secara *de facto* berlangsung setahun kemudian tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963 yakni dengan diturunkannya bendera Belanda. Semangat anti kolonialisme Belanda yang pernah ada dan berkembang sejak tahun 1926/1927 di Tanah Merah ternyata tetap menampakkan lagi pada masa ini sungguhpun tidak nyata dengan segera. Hal ini disebabkan oleh diputuskannya hubungan antara Irian Jaya dan daerah Indonesia lainnya. Berbagai organisasi timbul dan pertengkaran terbuka berlangsung di beberapa tempat yaitu di Jayapura, Biak, Sorong dan Fakfak. Perlawanan ini diberikan pula oleh putera-putera asli Irian

Jaya, dengan sebagian kecil golongan perantara yang telah disebut di muka.

Bertalian dengan ini terbentang di hadapan Pemerintah, dan Rakyat Indonesia khususnya yang berada di Irian Jaya, satu lembaran baru yang akan diisi dengan pelaksanaan Perse-tujuan New York tadi. Oleh karena itu terbentuklah Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969 yang ternyata sangat berpengaruh dan berperan dalam men-sukseskan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat. Hasil Dewan ini ialah kembalinya Irian Jaya ke haribaan Ibu Per-tiwi yang senantiasa mendambakannya- jalur merah yang telah nampak sejak zaman prasejarah.

BAB III

PERLAWANAN SEBELUM PROKLAMASI

(1900 – 1945)

Politik Etis (edukasi, irigasi dan emigrasi) yang merupakan apa yang oleh PKB dipakai sebagai "dasar moral" untuk memperhatikan nasib bangsa Indonesia khususnya di Jawa nampaknya tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, Apalagi di Irian Jaya; sehingga memberikan ciri tersendiri pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Sebelum menguraikan gerakan pada masa 1945 di Irian Jaya dikemukakan uraian tentang pengaruh luar yang datang dari Indonesia lainnya dan keadaan sosial-budaya setempat yang mendukung perlawanan itu. Sebagian besar pendidikan di Irian Jaya yang diselenggarakan oleh Zending dan Misi Katolik Roma (MKR).

PKB baru memberi bantuan sejak tahun 1892 dan kemudian ditingkatkan pada tahun 1906.²

Irigasi belum dapat terlaksana di Irian Jaya karena, sungguh pun Zending dan MKR sebagai instansi-instansi yang paling lama hadir di tengah-tengah masyarakat dan berusaha dalam bidang pertanian. Mengenai emigrasi dapat dikatakan kurang sekali, karena kegiatan-kegiatan dalam ketenaga kerjaan hanya diadakan bertalian dengan adanya usaha penambangan minyak *Nederlands Nieuw-Guinea Patroleum Maatschappij* (NNGPM), sekitar tahun 1935.³

Sungguh pun PKB telah berada sejak awal perempat penempatan kedua abad ke XIX namun kehadiran mereka didahului oleh Zending (1855) dan MKR (1896) yang memiliki perintis-perintisnya yang terus menerus berada di tengah-tengah penduduk asli setempat.⁴

Sejak tibanya kedua pionir Zending, Ottow dan Geisler yang berkebangsaan Jerman di Mensiuman (Teluk Cendera-

wasih) mereka berusaha membentuk jemaat Kristen, sungguh-pun dengan banyak pengorbanan.

Terbentuknya *Utrechtse Vereniging* yang bertujuan membenahi penyebaran agama Kristen Protestan di Irian Jaya ternyata sedikit mengurangi kesulitan ini.⁵

Usaha *Vereniging* ini terasa sekali dalam bidang kemasyarakatan. Mereka yang tergabung di dalamnya berdaya upaya dan ternyata banyak orang dipermandikan dan menerima kesaksian iman, sungguh pun patut diakui pula bahwa kesulitan-kesulitan selalu menghadang bahkan korban-korban pun ada.

Syukurlah bahwa pada tahun 1906 terjadi perubahan yang sedikit menyenangkan yaitu:

1. kebutuhan rakyat setempat akan seorang pendeta untuk berbagai fungsi seperti penengah atau pelindung
2. untuk menyelenggarakan pendidikan
3. adanya pembakaran segala perlengkapan ketakhayulan
4. adanya epidemi cacar yang mengganas (1904/1905) yang melunturkan kepercayaan rakyat asli setempat terhadap rumah arwah-arwah, *Rum-Sram* di Manokwari, Numfor dan Biak.⁶

Hal-hal itu diperkuat lagi dengan adanya hubungan kapal oleh *Koninkelijk Pakketvaarts Maatschappij* (KPM) dan bantuan PKB bagi penyelenggaraan pendidikan yang telah dimulai pada tahun 1892. Fase baru ini mendasari pertimbangan *Vereniging* untuk mempertahankan pendeta-pendeta sebagai tenaga inti, sambil mendatangkan tenaga-tenaga pembantu dari Minahasa dan Ambon.⁷ Dalam hubungan dengan ini dibuka kursus Guru Rakyat (*Cursus Volksonderwijzer*) di Mansinam (1917) oleh Pendeta F.J.F. Van Hasselt. Delapan tahun kemudian kursus ini mendapat subsidi PKB. Para pesertanya terdiri dari calon-calon yang berasal dari penduduk asli setempat. Ambon dan Sangehi dan Talaud.⁸

Hal terakhir ini ternyata dapat meningkatkan pengembangan Wilayah kerja dan volume kegiatan sampai tahun 1930.⁹ Selain itu ada pula badan penyebar agama Kristen Protestan lainnya ialah Gereja Protestan Maluku (GPM) yang baru mulai bergerak pada tahun 1927 dan memiliki daerah kegiatan di bagian Barat Irian Jaya sampai ke Merauke, sungguhpun ternyata tidak banyak berhasil karena daerah ini sejak awal abad ke-XX telah dipengaruhi oleh MKR.

Periode menjelang PD II bahkan sampai tahun 1945 merupakan "masa ujian"¹⁰, karena balatentara Jepang menangkap semua tenaga Zending yang berkebangsaan Belanda dan ditawan di Pare-Pare. Jemaah yang ditinggalkan berada pada keadaan bimbang; gerakan-gerakan mesianis muncul kembali, dan banyak dari para guru, terutama pendatang dari luar Irian Jaya, mengalami kesulitan sandang dan pangan lalu pergi ke kota meninggalkan kampung tempat tugasnya.

Riwayat MKR selama periode 1900 – 1945 ditandai oleh dua hal pokok yakni "awal yang tak banyak membawa hasil (1905–1920)" dan "perluasan secara besar-besaran (1920–1940).¹¹ Sejak tahun 1894 telah ada usaha penyebaran agama Katolik di Irian Jaya, namun secara intensif kegiatan ini mulai sejak tahun 1902 di bawah Ordo Hati Kudus (MSC) dan Ordo Saudara Dina (OFM). Ordo Hati Kudus meningkat sejak tahun 1905 disebabkan oleh pembukaan pos PKB pertama oleh Ressident Kroese yang mendapat banyak keterangan dari pihak MKR. Setelah mengadakan kontak-kontak persahabatan dengan penduduk setempat dalam bidang perawatan orang-orang sakit, mempelajari adat istiadat penduduk asli daerah setempat, dan mempertahankan kepentingan penduduk ini terhadap tekanan pihak pendatang lain, jumlah stasi MKR mulai bertambah. Pertambahan stasi mendapat banyak tantangan yang bersumber pada:

- a. sikap khas penduduk asli setempat (*Marind*) yang menganggap dirinya *Animba* (manusia sempurna) sehingga enggan menerima pengaruh luar;

- b. sistim sosio-religius yang kuat ternyata menempatkan mereka pada kutub yang berlawanan dengan agama Kristen seperti *Mayo*, *Imo* dan *Arapa*;
- c. ancaman epidemi influenza yang mengganas.

Dalam menghadapi keadaan demikian Pater J. Vertenten (1914) mengusahakan pemukiman-pemukiman percontohan (*modeldorpen*), sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pengembangan seluruh aspek kehidupan sosial penduduk¹².

Periode berikutnya ditandai oleh pembinaan yang berlangsung di pemukiman-pemukiman tadi terutama setelah ada laporan ahli penyakit dalam, Cnopus tentang bahaya penyakit Venerik dan berdasarkan publikasi Pater J. Verscheuren "Kebinasaaan di Irian Jaya bagian selatan" (*Zuid Niewue - Guinea Sterft uit*) yang dimuat dalam majallah "*Jawa Post*". Dapat dimengerti kiranya bahwa langkah pembinaan pertama ialah mendirikan rumah sakit yang berfungsi sebagai pusat pelayanan medis dan sebagai usaha mengalihkan pandangan penduduk asli dari ketergantungan pada ketakhayulan. Aspek lainnya ialah penyelenggaraan pendidikan bagi para remaja dan membangun asrama-asrama yang ternyata mendapat dukungan keuangan PKB.

Dari pendidikan inilah lahir pasangan-pasangan keluarga muda yang hidup dengan cara-cara yang lebih baik bila dibandingkan dengan generasi sebelum mereka. Memang ternyata kegiatan pendidikan ini maju setelah didatangkan para rohaniwan dan rohaniwati dan guru-guru dari kepulauan Kei (1923). Hal ini terbukti dengan kehadiran sekolah-sekolah dasar di stasi-stasi yang telah bertambah banyak dan meliputi daerah seluas Kabupaten Merauke sekarang dikurangi daerah Asmat dan kecamatan Mimika.¹³ (pada sekitar tahun 1930). Kegiatan MKR sejak sekitar tahun 1930 ini berdampingan dengan usaha-usaha penyebaran agama oleh GPM, sehingga terjadilah perutusan ganda (*dubbele Zending*).¹⁴ Selama tiga belas tahun selanjutnya MKR lebih memusatkan perhatiannya pada pem-

binaan stasi-stasi yang ada, dengan melakukan kunjungan-kunjungan (*Tournee*).¹⁵ Selama beberapa waktu setelah Perang Dunia ke II kegiatan-kegiatan MKR tidak jauh berbeda dengan kedua badan penyebar agama Protestan yang telah disebut di muka.

Naskah-naskah serah terima (*Memorie can Overgave*) beberapa kontrolir merupakan sumber yang sangat terbatas tentang penyebaran agama Islam. Pengaruh Kesultanan Tidore terasa pula di daerah Irian Jaya, terutama di Raja Empat, Sorong, Fakfak dan sekitarnya, Kaimana, Teluk Triton dan sedikit di Mimika.¹⁶ Masuknya Islam di daerah Fakfak kira-kira pada tahun 1606 berdasarkan pemberitaan pelaut Louis Vaes de Torres yang ketika singgah di sana melihat beberapa pedagang Islam (*"Moorse Kooplieden"*) di pesisir daerah Oniu (Fak-Fak) yang kemudian diperkuat oleh menetapnya orang-orang Buton di sana setelah pasifikasi Onin. Di Kaimana sampai ke Namatota, Kayu Merah dan Tiduma yang terletak di bagian timur daerah Kaimana berlangsung pula pengislaman.¹⁷

Selanjutnya Islam di Jayapura dirasakan sejak tahun 1892 (di pulau Metudebi) berkat kegiatan pedagang-pedagang yang berkembang terus sampai tahun 1930 seperti yang sempat disaksikan sekarang di Kamp Cina¹⁸ dan terutama di rukun-tetangga Abepura (Kecamatan Abepura). Para pemeuluk agama Islam tidak mengalami banyak gangguan dari balatentara Jepang. Hal ini mungkin disebabkan oleh para pemimpinnya adalah orang Indonesia.

Selain kegiatan-kegiatan penyebar agama tersebut di atas terdapat pula kepercayaan asli di Irian Jaya, dalam masa empat puluh tahun ini yang lebih banyak berupa, "gerakan penyelamatan".¹⁹ Gerakan ini muncul sebagai akibat hubungan penduduk asli setempat dengandunia luar yang dalam hal ini berhadapan dengan keadaan teknologi dan strata sosial yang beraneka ragam.

PKB menanamkan kekuasaannya di Irian Jaya sejak tahun 1828, sungguh-sungguh dengan mengeluarkan anggaran

belanja sebanyak f 115.000,— belumlah menandakan keinginan PKB untuk mencurahkan perhatiannya secara sungguh-sungguh. Inipun nampak dari pembagian Irian Jaya ke dalam dua afdeeling yang termasuk *Gouvernement der Moltekken* ²⁰ dengan badan-badan penyebar agama Protestan dan Katolik, sampai dengan sepuluh tahun sebelum balatentara Jepang mengalahkan Belanda di Indonesia. Usaha-usaha pembangunan Irian Barat, boleh dikatakan masih sangat sedikit oleh PKB. ²¹ Hal ini disebabkan oleh kekurangan ahli, biaya, dan peralatan. Sampai-sampai ketika Ressident Ternate memperoleh persetujuan pemisahan Irian Jaya dari kesultanan Tidore dari Sultan Tidore, PKB dalam hal ini C.H. Colijn dan B.J. Haga menolaknya (1907).

Sungguh pun demikian pembagian administrasi Irian Jaya terlaksana juga yakni *Afdeeling Noord Nieuw-Guinea* yang berkedudukan di Manokwari dan *Afdeeling West en Zuid Nieuw-Guinea* yang dikuasai oleh kontrolir yang berkedudukan di Fak-Fak. Setelah dipertimbangkan bahwa daerah Selatan Irian Jaya tidak beragama Islam, dan mempunyai adat istiadat yang lain, dan sering terjadinya gangguan-gangguan Suku Tugeri (salah satu suku Marind) di Merauke, PKB memisahkan daerah ini dari *Afdeeling West-Zuid Nieuw-Guinea* (1901) dan setahun kemudian mendirikan pos pertamanya di ana yang kini bernama Merauke. Dengan demikian penguasaan PKB dapat dilakukan lebih efektif. Di bagian lain dari Irian Jaya, yakni di Teluk Yos Sudarso, dibuka tempat kedudukan petugas Militer yang memerintah sebagian dari *afdeeling Noord Nieuw-Guinea* dengan posnya di Jayapura sekarang.

Apapun yang dilakukan oleh PKB dalam membagi Irian Jaya ke dalam daerah-daerah administratif, ia terbentur pada keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya dan tantangan alam yang nampaknya tak teratasi, seperti tidak adanya lalu lintas di daerah yang masih "liar" ini. Sungguh pun demikian menjelang tahun 1940 PKB sempat membagi Irian Jaya ke dalam tiga daerah kekuasaan yang meliputi sejumlah *onder-*

afdeling dalam rangka Timur Besar (*Groote Oost*).²² Pembagian ini secara terperinci adalah sebagai berikut: Irian Jaya terbagi dalam tiga daerah yang masing-masing dikepalai oleh tiga Assistent-Resident yang berkedudukan di Tual untuk *onderafdeling Zuid Nieuw-Guinea*, di Fakfak untuk *oncerafdeling West Nieuw-Guinea*, dan di Monokwari untuk *onderafdeling Noord Nieuw-Guinea*. Ketiga-tiganya berada di bawah *Ressident* yang berkedudukan di Amboina.²³

Keterbatasan kemampuan PKB itu ternyata dapat dibantu oleh Noord Nieuw-Guinea Pakketvaarts Maatschappij (NNGPM), yang berusaha mencari minyak dan bahan-bahan mineral lain. Maskapai ini merupakan gabungan sejumlah perusahaan besar Belanda, Inggris dan Amerika pada tahun 1935. Dari PKB mereka memperoleh konsesi sebesar sepuluh juta ha atau kurang lebih sepertiga luas daerah Irian Jaya.²⁴ Kegiatan-kegiatan NNGPM ternyata mengurangi keterasingan dan membuka daerah-daerah pedalaman Irian Jaya, antara lain Tanah-Merah (Digul) dan Ayamaru, dan sekaligus meletakkan landasan pesawat udara di sana. Dengan demikian petugas-petugas PKB dapat menggunakan fasilitas-fasilitas udara dalam rangka penunaian tugas mereka. Lebih lanjut pemotretan-pemotretan yang dilakukan oleh maskapai ini memberikan gambaran topografis dan geologis. Hasil dari kegiatan-kegiatan maskapai ini adalah penggalian percobaan yang dilakukan di pedalaman Semenanjung Doreri²⁵ dengan konsekuensi pengadaan tenaga kerja sebagai kuli sebanyak 2220 orang.²⁶

Di samping ini terbuka pula kemungkinan pembuatan jalan-jalan dan penyebaran penduduk. Keterangan-keterangan ini mendorong penjelajahan lebih lanjut oleh PKB.

Kegiatan Zending MKR, tersebarnya agama Islam, PKB dan NNGPM, menyebabkan pengaruh luar kian terasa di Irian Jaya. Perembesan ini sekaligus menampakkan pula hubungan bidang kegiatan instansi-instansi ini dengan daerah Hindia Belanda lainnya sebagai satu kesatuan wilayah di bawah satu rezim yang "berhaluan keras" yang berkedudukan di Jakarta

(Batawi waktu itu). Daerah yang langsung tercakup dalam wilayah Indonesia Timur adalah Maluku dan Sulawesi. Di samping ini kehadiran orang-orang yang berasal dari daerah Indonesia lainnya menciptakan golongan perantara yang juga terdiri dari putera-putera asli setempat. Keadaan tersebut terakhir ini merupakan akibat dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh PKB dan MKR seperti telah dikemukakan di muka. Pendudukan tentara Jepang di Indonesia, khususnya di Irian Jaya sebelum Perang Dunia II, ternyata telah dipersiapkan secara rahasia. Kehadiran para nelayan Jepang di perairan Irian Jaya bagian utara bertujuan mencari keterangan tentang perairan dan kekayaan laut. Upaya ini dilatar belakangi oleh gagasan Angkatan Laut Jepang, yakni "*Nanshir--rod*", gerakan menuju daerah-daerah selatan. Keterangan-keterangan mengenai daratan pun dikumpulkan oleh *Nanyo Kohatsu Kabushiki Kaisha*.²⁷ Luas kegiatan Jepang dapat digambarkan dengan dipekerjakannya lebih kurang 1100 tenaga kerja Indonesia. Tenaga-tenaga ini bekerja pada perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan pengolah gopal di Nabire, Waropen.²⁸

Kegiatan Jepang ini tidak disetujui PKB karena khawatir Jepang akan menjadikan Irian Jaya daerah penampungan orang-orang Jepang.

Persiapan mereka itu ternyata tidak sia-sia. Pada tanggal 7 Desember 1941 Pearl Harbour dilumpuhkan sebagai realisasi gerakan ke Selatan Jepang tadi. Jepang memperluas daerah operasinya sampai ke Indonesia bagian Timur. Dalam berhadapan dengan Jepang PKB hanya mampu bertahan di Merauke. Bagian Utara dan Barat Irian Jaya sampai ke daerah Mimika bagian selatan, dikuasai oleh balatentara Jepang. Orang-orang Belanda terutama para rohaniawan dari Zending dan MKR ditawan.

Masa pendudukan balatentara Jepang segera berakhir dengan mendekatnya kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang menandakan gerak maju tentara Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas Mac Arthur. Selanjutnya tentara

Sekutu melanjutkan penyerangannya dari Jayapura ke Biak dan Sausapor yang mempunyai posisi penting dan menguasainya dalam rangka "island hoppingnya".²⁹ Kedudukan Jepang di Jayapuran adalah sangat strategis, ditinjau dari letak geografis Irian Jaya di daerah Pasifik. Tentara Sekutu yang berkedudukan di PNG setelah kemenangannya atas Jepang di Goral sea, "menyepit" Jayapura dengan gerakan *Supit-Urang* (*nijptang*); melalui Hamadi (Teluk Yos Sudarso) dan dari Teluk Tanah Merah (daerah di sebelah barat Jayapura).³⁰ Dengan demikian Jayapura segera dijadikan "*Advanced - base*" yang memiliki fasilitas-fasilitas ketiga angkatannya.³¹ Dari Jayapura tentara Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas Mac Arthur yang bermarkas di Ifar (Jayapura) melanjutkan gerakannya langsung ke daerah Irian Jaya lainnya.

Terciptanya golongan perantara tadi memungkinkan perlawanan yang kian hebat terhadap dominasi balatentara Jepang dan kekuasaan NICA sebagai bentuk Pemerintah Sipil Kolonial Belanda yang datang bersamaan dengan kehadiran tentara Sekutu di Irian Jaya. Sebagaimana halnya di daerah Indonesia lainnya, ada kerja sama antara pemuka-pemuka masyarakat di Irian Jaya dengan pihak Jepang di Irian Jaya. Namun demikian perlawanan-perlawanan yang bersifat gerilya, menurut cara orang Irian Jaya, terhadap pihak pendudukan ini dilakukan terutama di Jayapura, Teluk Cenderawasih dan sekitarnya dan Fak-fak.³² Selanjutnya kerja paksa seperti *romusha* yang dikenal di daerah Indonesia lainnya tidak ditemui di daerah ini. Apa yang dilakukan Jepang ialah pengerahan tenaga untuk pembukaan kebun-kebun besar sebagai sumber perbekalan pangan dan pertambangan. Kekurangan tenaga untuk pertambangan di atasi dengan mendatangkan tenaga *romusha* dari Jawa dan Sulawesi Selatan yang jumlahnya ternyata cukup banyak (1700 jiwa) tetapi berkurang menjadi 217 orang karena kekejaman balatentara Jepang.

Halangan yang dirasakan oleh penduduk asli setempat sebagai reaksi terhadap pihak kulit putih seperti telah dising-

gung di muka berkembang menjadi perlawanan-perlawanan fisik yang bermotifkan politik. Dengan demikian agaknya cukup sulit untuk menguraikan perlawanan-perlawanan ini kasus-demi kasus karena sangat terbatasnya sumber yang dapat menjelaskannya.

Gerakan-gerakan di sekitar kota Jayapura mulai sejak tahun 1925. Di daerah Nimboran, tepatnya di desa Genyem, terjadi gerakan-gerakan kebatinan (1925) sungguhpun tidak ada keterangan yang luas tentang hal ini. Masih di daerah yang sama ditemui gerakan *kasyep* yang berintikan ajaran "kemasukan roh nenekmoyang" yang mengajarkan tentang "negara bahagia" lengkap dengan tokohnya yakni Johanis Giai dari desa Imeno. Yang dimaksudkan dengan "negara bahagia" adalah datangnya kekayaan jasmani seperti yang dimiliki oleh orang-orang kulit putih. Gerakan-gerakan ini kadang-kadang ditekan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Di daerah Sentani, juga pada tahun 1928 di desa Gesiri, terdapat gerakan di bawah pimpinan Pamai yang menyebut dirinya Pesuruh Tuhan. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tiga tahun sebelumnya, yakni pembakaran rumah-rumah keramat, larangan terhadap praktek-praktek keagamaan asli yang dianggap liar, penetapan pajak dan pemaksaan kerja bakti. Pamai ternyata ditangkap Pemerintah Kolonial Belanda yang berakibatkan terhentinya gerakan ini.³⁴ Di desa lain di daerah Danau Sentani, desa Gesiri pada tahun 1935 ada pula gerakan di bawah pimpinan Damo. Gerakan ini meliputi kepercayaan akan datangnya satu negara bahagia bersamaan dengan kehadiran para nenekmoyang mereka kelak. Tokoh gerakan ini dikejar-kejar dan akhirnya ditahan Pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu antara tahun 1940-1944 terjadi suatu gerakan yang menunjukkan beberapa persamaan dengan Simson. Kira-kira seratus kilometer sebelah barat kota Jayapura, di Tanah Merah, antara tahun 1940-1944 terjadi satu gerakan luas di bawah pimpinan Simson. Unsur-unsur penting gerakan ini pada dasarnya sama dengan gerakan Damo. Simson ditahan

beberapa kali oleh Pemerintah Kolonoal Belanda dan dihukum mati pada zaman pendudukan Jepang. Sungguhpun dia meninggalkan gerakan ini hidup terus bahkan dalam berbagai bentuk.³⁵

Selain daerah sekitar Jayapura, di Teluk Cenderawasih dan daerah pantai utara Kepala Burung sampai ke Kepulauan Raja Ampat terdapat pula gerakan-gerakan yang kurang lebih sama. Gerakan-gerakan di sini lebih dikenal dengan nama *Koreri*, yang bersumber pada orang-orang Biak. *Koreri* merupakan dongeng suci *Mansern Manarmakeri*, yang mengajarkan tentang seorang tokoh yang mengerti tentang rahasia hidup dan maut, termasuk rahasia untuk mendapat segala kekayaan. Gerakan ini telah dikenal sejak tahun 1861 dan muncul sebanyak lima kali antara 1861–1882 di daerah-daerah Wandamen, Waropen, Numfor, Doreh, Mansinan, Desa Mokmer (1884) dan Desa Meok Wundi (1901).³⁶ Tokoh gerakan-gerakan ini adalah seorang Biak yang menamakan dirinya *Konor*, Pesuruh Tuhan. *Konor*, yang berasal dari Meok Wundi, meramalkan tentang akan datangnya zaman *Koreri* yang bahagia. Bersamaan dengan ajaran ini muncul pula berbagai kabar angin tentang keajaiban-keajaiban yang dapat dilakukan oleh Mansern ini. Ajaran ini sempat membangkitkan semangat antipati terhadap Pemerintah Kolonial Belanda yang memuncak pada pembunuhan terhadap orang-orang Belanda, pengrusakan gedung, dan sebagai akibatnya korban jiwa di kalangan orang-orang Biak.³⁷

Mungkin tidak berlebihan untuk menganggap gerakan yang dipimpin oleh Stefanus Simopiaref sebagai gerakan *Koreri* yang paling condong ke gerakan kemerdekaan, bila dibandingkan dengan gerakan-gerakan *Koreri* lainnya. Gerakan ini muncul sebagai gerakan yang berarti pada tahun 1942 dan bermula di desa Maswan, Biak Selatan. Tokoh ini pernah ditahan Pemerintah Kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II di Ternate, Jawa dan akhirnya di Monokwari. Dalam penjara dia sempat memperbanyak pengetahuannya tentang kemerdekaan.

kaan Irian Jaya. Dalam usahanya ia menggunakan tokoh wanita Angganita (akan dijelaskan di bawah), sebagai lambang persatuan bagi gerakannya. Ia sempat pula memperluas pengaruhnya sampai ke berbagai daerah di Teluk Cenderawasih, bahkan menghimpun kekuatan terutama di laut berupa biduk-biduk kecil yang dipersenjatai dengan golok, tombak dan pisau. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dikalangan pengikutnya ia menciptakan larangan perampokan dan pembunuhan.

Gerakan di bawah pimpinan Stevanus ini segera melemah dan tidak berapa lama berakhir. Hal ini bermula pada suatu aksi yang bertujuan membebaskan Angganitha dari penjara di Monokwari. Pasukan Stevanus yang menyertainya dengan biduk-biduk yang mencoba menyerang kapal balatentara Jepang segera ditembaki sehingga banyak korban berjatuh. Balatentara Jepang lalu membujuk Stevanus untuk berunding tetapi ia lalu ditahan. Sungguhpun dalam keadaan demikian balatentara Jepang diserang lagi sebagai pernyataan benci rakyat terhadap pihak asing ini. Kekalahan yang dideritanya membuat rakyat, tentunya yang masih menaruh perasaan simpati kepada Stevanus, melampiakan amarahnya dengan merampas barang-barang di toko-toko milik orang Tionghoa. Setelah pemboman Sekutu pada bulan Mei 1943 atas kedudukan balatentara Jepang di Monokwari gerakan ini terus melemah. Hal ini terutama disebabkan oleh "aksi pembersihan" yang dilakukan balatentara Jepang sebagai kelanjutan penangkapan Stebanus tersebut di atas.

Di sebuah desa kecil yang terpencil, Isumbabi, ditemui seorang Konor, yang telah disinggung di atas, Angganitha Menufaur. Ia mendapat ilham Mansern setelah sakit keras beberapa kali. Pengaruhnya sama dengan Wasyari Faidan tadi, tetapi sedikit banyaknya telah menimbulkan antipati secara khususnya terhadap para penderita agama Kristen Protestan dan yang dalam perkembangannya memasuki aspek politik. Dikatakan-nya bahwa para pendeta Kristen menyembunyikan hal-hal

tertentu dalam Bijbel yang menyatakan bahwa *Manarmakeri* dan Kristen adalah sama dan cara-cara memperoleh kekayaan kebendaan yang dimiliki oleh orang kulit putih sesungguhnya berasal (dicuri) dari *Manarmakeri*. Lebih lanjut Angganitha menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Setelah gerakan ini diketahui oleh polisi, rumah-rumah penduduk desa Isumbabi dibakar. Hal-hal ini menyebabkan Angganitha ditahan sampai dua kali dua minggu sebelum kekalahan Belanda Angganitha lalu ditahan Jepang dan dipenjara di Monokwari. Dari penjara ini inilah Stevanus Simopiref berusaha bersama-sama pasukannya membebaskannya.

Gerakan-gerakan sejenis muncul pula di daerah kepulauan Raja Ampat pada periode yang kurang lebih sama dengan di daerah Teluk Cenderawasih itu.

Pada tahun 1931 di desa Reni terdapat gerakan kerokhanian di bawah pimpinan Wasyari Faidan.

Pada dasarnya gerakan-gerakan ini memiliki pokok-pokok ajaran yang sama dengan apa yang dikenal di daerah Teluk Cenderawasih, yakni datangnya *raja Mansren*, harapan akan datangnya zaman *Koreri*, berakhirnya kekuasaan orang kulit putih dan sebagainya. Pengaruh ajaran Faidan ini ternyata luas pengaruhnya sebagaimana terbukti dari banyaknya orang yang berdatangan ke Reni dari pulau-pulau Biak dan Numfor. Hal ini menyebabkan ia ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Gerakan yang paling menarik dari semua gerakan yang dibicarakan selama ini ialah *gerakan Pam* yang muncul pada tahun 1936 di bawah pimpinan *konornya, Nyawamos* yang memberikan semacam ramalan bahwa sekitar tahun 1942 (enam tahun sebelum Perang Pasifik meletus) orang-orang kulit putih akan dilenyapkan oleh orang Jepang. Karena dianggap berbahaya Nyawamos ditahan dan meninggal dalam penjara. Lebih lanjut ke arah selatan dan kemudian ke timur ditemui gerakan *Manggarena* yang merupakan perpaduan antara ajaran setempat dengan Islam yang telah ada di sana berkat pengaruh Kesultanan Tidore.

Tidak jauh dari sini ditemui M. Rumagesang Al Alam Ugar Sekar gelar raja Irian asli yang lahir pada tahun 1885. Ketika berusia 21 tahun ia dilantik oleh ayahnya sebagai penggantinya. Sikapnya yang keras dan tegas ternyata melindungi rakyatnya terhadap perlakuan yang tidak pantas dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda. Ketika Maskapai Collijn mengadakan kegiatan di Kokas Raja ini banyak berjasa dan oleh karena itu kepadanya disertai pembayaran upah rakyatnya yang bekerja di sana. Hal ini menyebabkan irihati *Bestuur Assistent* yang sangat marah dan melaporkannya kepada Kontrolir G. Terwijk. Atas pertanyaan Kontrolir ini Raja Rumagesang menjawab "uang itu adalah uang yang rakyat punya".³⁷ G. Terwijk yang marah karena jawaban ini bertengkar dengan Raja Rumagesang. Rakyat lalu marah hendak membela Rajanya dan membunuh G. Terwijk. Setelah pihak penguasa di Fak-fak mengetahui hal ini, dikirimlah tentara ke Kokas untuk menangkap rakyat yang akan merontak sebanyak 73 orang dan lima orang kepala Kampung. Raja Rumagesang ditahan pula dan dijatuhi hukuman 15 tahun. Ia dapat dibebaskan sebelum akhir masa tahanannya berkat suratnya kepada M. Husni Thamrin yang waktu itu menjadi anggota *Volksraad*.

Beberapa saat sebelum pendaratan balatentara Jepang Raja Rumagesang dibebaskan. Ia bahkan mendapat gelar Jepang, *Minanu Tokyo* dan disertai kuasa untuk Irian,³⁸ mungkin sebagai untuk merebut hati rakyat. Dengan berakhirnya masa pendudukan Jepang, Raja ini bersama beberapa raja lainnya disuruh mengibarkan bendera Belanda. Raja Rumagesang yang tidak setuju dengan hal ini segera menurunkannya pada keesokan harinya. Akibatnya bertempurlah rakyat melawan Belanda dan kalah. Ia ditahan tetapi cita-cita perjuangannya tetap membara.

Selanjutnya Tanah Merah (Digul) dipakai oleh pemerintah Kolonial Belanda, tanpa pemeriksaan yang baik, sebagai dasar pengiriman 823 orang. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang tidak berkenan pemerintah Kolonial Belanda

(*de enverzoennelijken*). Tindakan pemerintah Kolonial Belanda ini ternyata berpengaruh pula terhadap pandangan penduduk setempat, Tanah Merah dan Merauke sebagai orang-orang komunis. Memang dalam keadaan pada waktu itu komunisme dan nasionalisme sulit dibedakan, bahkan dianggap saling membantu.³⁹

Citra Digul kembali menghangat menjelang Trikora, sebagai tempat pembuangan tokoh-tokoh politik, terutama tokoh-tokoh perlawanan sebagaimana akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Gerakan-gerakan perlawanan yang sesungguhnya tidak banyak, namun ditinjau dari keseluruhan perjuangan bangsa Indonesia gerakan-gerakan ini sangat berpengaruh sesudah Perang Dunia II. Secara keseluruhan gerakan ini dapat dianggap sebagai latar belakang yang umum dalam perlawanan penduduk Irian Jaya. Tidak dapat disangkal adanya pengaruh-pengaruh luar, terutama dari daerah-daerah lain di Indonesia.

BAB IV

PERLAWANAN SESUDAH PROKLAMASI (1945–1965)

A. GERAKAN-GERAKAN SOSIAL

Kedatangan orang-orang kulit putih dalam wujud pemerintahan Kolonial Belanda di Irian Jaya sudah barang tentu hendak mewujudkan politik kolonialnya di daerah ini. Hal ini berarti pengembangan ide-ide pemerintahan menurut citra mereka, penanaman norma-norma maupun pranata-pranata mereka dalam masyarakat setempat. Tidak selamanya masyarakat Irian Jaya yang telah memiliki adat-istiadat, norma-norma dan pranata-pranata sosial begitu saja menerima gagasan gagasan pemerintah Kolonial Belanda.

Koentjaraningrat bahkan menyatakan sebagian besar dari rakyat Irian Jaya pada dasarnya memiliki sikap benci atau paling sedikit sikap acuh tak acuh terhadap bangsa Belanda.¹ Dalam situasi Kolonial sikap benci atau pun acuh tak acuh itu dapat digolongkan ke dalam bentuk perlawanan pasif.²

Kehidupan orang-orang kulit putih dalam Wujud pemerintahan Kolonial Belanda di daerah Irian Jaya ini berkembang dengan tidak terlalu menghiraukan keadaan penduduk asli setempat. Hidup mewah serta kemajuan menjadi dimonopoli oleh orang kulit putih, sedangkan di sisi lain penduduk asli hidup dalam kekurangan dan kemiskinan sehingga melahirkan rasa tidak puas terhadap keadaan yang demikian ini reaksi warga masyarakat dapat berupa reaksi ekstrim dengan sikap agresif dan perbuatan-perbuatan yang tidak menentu, atau pun reaksi ekstrim dengan sikap negatif yaitu menghindari kesengsaraan dalam dunia nyata dengan memusatkan perhatian kepada alam kebatinan.³

Di daerah Jayapura, yaitu di kampung Tablasufa dan kampung Tablanusu pada tahun 1946 dan 1947 timbul lagi gerakan Simson. Akan tetapi dalam tahun 1947 pihak pemerintah Kolonial Belanda mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap anggota Gerakan Merah Putih.⁴ Belanda khawatir karena pada masa itu di daerah Irian Jaya sedang giat mengembangkan organisasi-organisasi perjuangan yang bertujuan mempersatukan daerah ini dengan wilayah Indonesia lainnya. Selain itu gerakan Simson percaya pada suatu negara bahagia, disertai upacara bersama sambil memabukkan diri dengan minuman keras yang dianggapnya sebagai jamu.⁵ Sudah barang tentu Belanda merasa cemas karena adanya ide suatu negara bahagia, sebab ini berarti pula pernyataan tidak setuju terhadap pemerintah Kolonial Belanda, di lain pihak ini dapat merupakan benih-benih nasionalisme yang membahayakan eksistensi pemerintah Kolonial Belanda di Irian Jaya.

Selanjutnya di antara tahun 1948–1952 di daerah Nomboran terjadi suatu rangkaian dari gerakan kebatinan yang terkenal dengan nama gerakan *Kasyep*. *Kasyep* berarti "mendapat ilham" atau juga "keadaan mabuk" waktu roh nenek moyang dianggap masuk ke dalam tubuh, *Kasyep* berarti juga roh nenek moyang itu sendiri. Nampaknya upacara mengundang roh nenek moyang sudah lama merupakan kegiatan-kegiatan orang-orang Nimboran. Akan tetapi *Kasyep* yang bersifat gerakan-gerakan negara bahagian yang dipimpin oleh Yohannes Giay dari desa Imeno baru diketahui pemerintah Kolonial Belanda dalam tahun 1940.

Gerakan ini percaya akan datangnya Ratu Adil yang akan mengatur masyarakat ke arah negara bahagia secara material seperti yang dimiliki oleh orang-orang kulit putih. Gerakan-gerakan yang mengandung unsur-unsur politik ini paling tidak terjadi lima kali di antara tahun 1948–1952. Akan tetapi karena pengikutnya terkadang menjadi bosan serta campur tangan pemerintah Kolonial Belanda gerakan *Kasyep* ini berhenti dengan sendirinya.⁶

Gerakan *Koreri* yang merupakan gerakan tertua di daerah teluk Saireri (kemudian berkembang ke kepulauan Raja Ampat) muncul kembali di Kwatisori (Wandamen) pada tahun 1950. Pemimpinnya menyebut gerakannya ini sebagai agama Syariwari. Sebelumnya pada tahun 1948 di Waserew daerah Manokwari gerakan *Koreri* timbul lagi dipimpin oleh seorang wanita.⁷

Gerakan-gerakan tersebut selalu muncul dalam keadaan tidak menentu. Di satu pihak pemerintah Kolonial Belanda sedang berusaha secara nyata untuk memisahkan daerah Irian Jaya dari kesatuan Indonesia. Di pihak lain para pejuang Irian Jaya sedang bergelora untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di daerah ini. Oleh karena itu tidak jarang pemerintah Kolonial Belanda campur tangan dalam gerakan-gerakan itu untuk membendung agar nasionalisme tidak berkembang di dalamnya.

Di antara tahun 1952 dan 1954 di daerah danau Wissel (Paniai) terdapat gerakan Wege. Para anggotanya mengharapkan kedatangan seorang Ratu Adil wanita yang akan datang dari Jawa dan akan mendirikan "kerajaan bahagia" dengan membawa harta kekayaan. Dasar dari gerakan ini adalah tokoh dongeng Situgumina yang mengenal rahasia hidup dan maut dan mengenal sumber-sumber kekayaan dunia. Ia pernah ke arah barat, ke Jawa, tetapi kelak akan kembali lagi.⁸

Oleh karena itu sebelum kedatangannya kembali orang-orang Ekari harus mempersiapkan diri untuk segala sesuatunya. Dalam melakukan kegiatannya gerakan ini memilih tempat di tengah hutan. Di tempat ini didirikan suatu bangunan berbentuk barak untuk menampung para anggotanya. Di rumah ini mereka melakukan upacara hingga sampai berminggu-minggu lamanya. Pemimpin gerakan ini ialah Zacheus Pakage.⁹ Selain sebagai seorang tokoh masyarakat di kampung Bomou, ia pernah mengikuti pendidikan sebagai guru Injil di Kebo daerah Enarotali dan di Sekolah Alkitab Kema Injil di Ujungpandang. Sebelum memimpin gerakan Wege itu ia

pernah membantu para misionaris di Moni, Uhunduni dan Dani.¹⁰

Dari pengalaman-pengalamannya selama mengikuti pendidikan dan bertugas sebagai pembantu para misionaris, ia banyak memperoleh gambaran tentang keadaan yang tidak seimbang dalam status sosial ekonomi antara penduduk setempat dengan para misionaris (Evangolis Barat). Pertama-tama ia melihat dirinya berbeda dengan para evangelis Barat itu, di sisi lain disadarinya akan kekurangan-kekurangan kebudayaan sukunya, apalagi jika dibandingkan dengan kebudayaan orang kulit putih. Pengalaman-pengalamannya ini kemudian banyak mempengaruhi gerakan Wege yang dipimpinnya.

Dalam pertengahan tahun 1954 kegiatan gerakan Wege dapat diakhiri, Zacheus Pakage ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun lamanya di penjara Jayapura. Ia dipersalahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan ketenteraman umum. Menurut pengakuannya kepada penulis, gerakan Wege juga menitik beratkan kepada gotong royong di kalangan penduduk. Pada tahun 1962 ia baru dapat kembali ke kampung halamannya di Bomou (kecamatan Tigi).

Suatu peristiwa lain terjadi di Obano (sebuah kampung di pantai barat danau Paniai) pada tanggal 3 Nopember 1956. Di tempat ini pada hari itu diresmikan penggunaan sebuah pesawat Cessna untuk kegiatan penyebaran Agama Kristen di daerah pedalaman Irian Jaya. Siang harinya ternyata pesawat ini dihancurkan oleh rakyat Obano. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya para misionaris dan pemerintah Kolonial Belanda telah mendengar desas-desus bahwa masyarakat Ekari hendak mengusir semua orang asing dari daerahnya.

Untuk memadamkan pemberontakan rakyat Obano ini pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan tentaranya yang menembakkan peluru-peluru mortir ke hutan-hutan sekitar danau Paniai. Dalam peristiwa itu sekitar 200 orang Ekari mati terbunuh.¹¹

Dalam kaitannya dengan gerakan masianistik, dalam tahun 1963 di kepulauan Raja Ampat muncul kembali gerakan Koreri. Inti gerakan ini adalah harapan akan datangnya raja Mansern, harapan akan datangnya jaman *koreri* dan kandasnya orang kulit putih. Pada waktu penyerahan Irian Jaya dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1963, *paituwa* Warbesren (Wilhelmus Rumbewas) dari Arefi (pulau Batanta) mengatakan kepada penduduk di Arefi dan Jensaway bahwa Mansar Mangundi telah datang. Menurut *paituwa* Warbesren, Mansar Mangundi tinggal di Amerika tetapi tidak sampai hati melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Irian Jaya, sehingga ia datang di daerah ini bersama-sama tentara Indonesia.^{1 2}

Di daerah Merauke dalam tahun 1950—1952 terjadi 2 kali gerakan penyelamatan di daerah Muyu. Gerakan-gerakan ini menentang adanya pengaruh kebudayaan Barat. Gerakan ini bermula dari mimpi seorang bernama Terenem, penduduk kampung Benkopa di daerah Woropko. Dalam mimpinya ia bertemu dengan adiknya yang telah meninggal dunia dan memberinya *ot* (kerang untuk mata uang). *Ot* itu harus disimpan di dalam tas dan baru boleh dibuka sesudah satu bulan.

Pada saat itu *ot* tersebut sudah akan menjadi 5 buah; dalam 2 bulan akan menjadi 10 buah, demikian seterusnya. Pada suatu pesta babi di Woropko untuk pertama kalinya Terenem mengajarkan ajarannya itu. Pelajarannya berlangsung dalam tarian *amagop*, sebuah tarian dengan gerakan tubuh dan sesekali menjatuhkan diri dimasuki roh nenek moyang dan disertai siulan-siulan yang merupakan bahasa roh. Murid-muridnya kemudian akan dimasuki roh nenek moyang, dan akan mampu mengubah kerikil menjadi *ot*. Setiap muridnya harus menyerahkan satu *ot* untuk setiap pelajaran. Gerakan ini tidak saja dikembangkan oleh Terenem, tetapi juga oleh pengikut-pengikutnya. Ketika gerakan ini telah meliputi 6 kampung di daerah Muyu, pemerintah Kolonial Belanda menghentikannya dan menangkap para pemimpinnya. Gerakan kedua berlang-

sung tanpa campur tangan pemerintah. Yeknon dan Kawon merupakan pengangjur gerakan ini yang mengajar kepada orang-orang Muyu bahwa buah *mongkap jop* atau kulit kayu pohon *kawat* dengan kekuatan gaib dapat berubah menjadi ot.¹³

Dalam tahun 1953 di antara orang-orang Muyu di desa Klapalima (Merauke) terjadi suatu gerakan kebatinan yang bersifat gerakan "negara bahagia". Gerakan ini mengandung sikap antipati terhadap penjajah dan mengajarkan tibanya suatu masa di mana semua orang kulit putih akan hilang dari muka bumi.¹⁴ Gerakan ini dipimpin oleh Kuram yang memulai gerakannya pada akhir bulan September 1963. Ia kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 9 bulan penjara.¹⁵

Gerakan-gerakan semacam itu muncul pula di daerah Asmat dalam tahun 1956. Di sini pemerintah Kolonial Belanda berusaha menindas rakyat dengan menewaskan sejumlah 700 orang penduduk kampung Ayam. Dalam tahun 1958 dan 1959 di Agats timbul perlawanan rakyat, pemerintah Kolonial Belanda mengiriskan pasukannya dengan kapal perang "Piet Hein". Di daerah ini sekitar 1000 orang rakyat agats tewas karena menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.¹⁶ Mengenai hal ini kiranya masih perlu penelitian lebih lanjut. Gerakan-gerakan ini merupakan manifestasi dari penolakan pengaruh Barat, ataupun pernyataan tidak puas terhadap keadaan yang diwujudkan oleh pihak penjajah. Meski gerakan-gerakan itu pada akhirnya ditumpas oleh pemerintah Kolonial Belanda, di sisi lain timbulnya gerakan-gerakan itu sangat menguntungkan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya pembebasan wilayah Irian Jaya dari cengkeraman pemerintah Kolonial Belanda. Situasi yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan itu sangat menguntungkan karena dapat dijadikan landasan untuk persebaran ide nasionalisme bangsa kita, yang berpusat kepada cinta tanah air Indonesia dengan ideologi yang tertuju kepada perkembangan suatu masyarakat adil makmur.¹⁷

B. ORGANISASI PERJUANGAN MENDUKUNG PROKLAMASI

Dua hari setelah Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu dalam PD II, Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh proklamator Sukarno Hatta itu disambut rakyat dengan kegembiraan dan kegegaan serta luapan semangat.¹⁸ Bahkan kelahiran Republik Indonesia ini telah membakar semangat revolusi kemerdekaan yang menjalar meliputi seluruh Indonesia.¹⁹

Di Jakarta setelah *Gunseikan* gagal melarang pengucapan Proklamasi tadi²⁰. Kemudian Nishimura memerintahkan untuk melarang penyebaran berita Proklamasi itu melalui stasion-stasion radio yang ada.²¹ Akan tetapi meskipun polisi-polisi Jepang dengan giat menghalang-halangi penyebaran Proklamasi itu, ternyata usaha Jepang untuk memboikot meluasnya berita kegembiraan bagi bangsa Indonesia, tidak berhasil. Melalui kantor berita Domei Proklamasi itu berhasil disiarkan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia.²²

Sehari sesudah proklamasi, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Merdeka. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rangka penyusunan Negara Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan pembagian wilayah negara dalam 9 propinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Daerah Irian Jaya merupakan bagian dari propinsi Maluku.

Meskipun demikian untuk sementara waktu di daerah Irian Jaya belum dapat ditempatkan pejabat-pejabat pemerintah Republik Indonesia karena di daerah ini masih bercokol pemerintah kolonial Belanda.¹³

Walaupun Irian Jaya masih dikuasai oleh penguasa kolonial Belanda akan tetapi para pejuang kemerdekaan di Irian

Jaya tidak menerima kenyataan kekuasaan Belanda di wilayah paling Timur Indonesia itu. Berita proklamasi kemerdekaan yang disiarkan putra-putra Indonesia melalui kantor berita Domei akhirnya ditangkap juga di Australia. Berita proklamasi ini sangat dirahasiakan oleh Belanda. Berita gembira itu baru diketahui secara umum setelah Perserikatan Pengasingan Politik Indonesia (*Indonesia Political Exile Association*, IPEA) di Australia pada akhir bulan Agustus 1945 menyiarkan berita proklamasi itu melalui pamflet-pamflet. Pamflet-pamflet ini ditandatangani oleh Ahmad Sumadi. Dengan bantuan para simpatisan dan awak kapal, pamflet IPEA itu disiarkan ke Brisbane, Kamp Casino, Sydney, Melbourne, Mefauke dan bahkan sampai ke Ujung Pandang dan Balikpapan.²⁴ Dari kota Merauke itulah akhirnya Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diketahui oleh para pejuang kemerdekaan di Irian Jaya.

Para pejuang eks Digulie yang dibawa Belanda ketika melarikan diri ke Australia banyak yang dibawa kembali ke Irian Jaya. Maksud Belanda jelas, mereka para eks Digulis, akan dipakai oleh Belanda guna menegakkan kembali dominasi kolonialnya di Irian Jaya. Di sini Belanda juga hendak memperlakuk pejuang-pejuang seperti Silas Papare, Samuel Kawab, Martin Indey, Raja Fatagar, Raja Kokas, Lodewijk Mandacan dan lain-lain untuk kepentingan Belanda di daerah Irian Jaya ini.²⁵

Salah seorang eks Digulis yang dibawa kembali ke Irian Jaya yaitu Sugoro. Ia diserahi tugas sebagai Penasehat Direktur Pendidikan dan Agama (*Adviseur Directeur Onderwijs en Eredienst*) dan untuk selanjutnya memimpin suatu Sekolah Bestuur (Pamong Praja) di Kampung Harapan (semula bernama Kotanika). Di samping tugasnya di luar waktu-waktu kerja ia menanamkan kepada pengikut-pengikutnya ajaran Kemerdekaan dan Patriotisme dalam kerangka Indonesia Merdeka.²⁶

Pada hakekatnya kewibawaan pemerintah Kolonial Belanda di Irian Jaya selama PD II telah merosot. Ketika Jepang

mendarat di Irian Jaya, dengan tidak berdaya samasekali Belanda meninggalkan rakyat Indonesia lari ke Australia. Sedangkan ketika tentara Sekutu mengadakan serangan kembali terhadap Jepang di Irian Jaya dalam upaya mengadakan gerakan maju ke Tokyo, rakyat Irian Jaya telah terlebih dahulu mengadakan perlawanan kepada Jepang. Dengan demikian Belanda membonceng Sekutu kembali ke Irian Jaya, rakyat Irian Jaya sudah tidak lagi melihat Belanda sebagai pemenang dalam Perang Dunia II.

Tanggapan pertama rakyat Irian Jaya tercermin dengan adanya insiden bendera pada tanggal 31 Agustus 1945 di Jayapura. Tanggal 31 Agustus merupakan hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Ketika *Senior Officer* NICA (Sonica) R. Abdulkadir Wijoyoatmojo mempersiapkan perayaan hari ulang tahun ratu Belanda tersebut, rakyat diperintahkan untuk mengibarkan bendera Belanda, merah putih biru. Akan tetapi ternyata rakyat mengibarkan bendera Sang Merah Putih secara penuh, sedangkan bendera Belanda dan Amerika dikibarkan setengah tiang.²⁷

Peristiwa atau insiden tersebut jelas mencerminkan manifestasi gejolak hati putra-putri Irian Jaya untuk menghirup alam kemerdekaan Indonesia. Kegiatan-kegiatan para pejuang kemerdekaan di Irian Jaya berupa rapat-rapat di Jayapura. Bahkan tiga hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, di Kampung Harapan Jayapura telah dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh Marcus-Kaisepo, Frans Kaisepo dan Nicolas Youwe.²⁸

Di kampung Harapan Jayapura para murid Sekolah Bestuur di bawah pimpinan Sugoro selalu mengadakan diskusi masalah kemerdekaan dan persatuan. Untuk menggalang persatuan di antara para peserta Sekolah Bestuur maka dibentuklah Dewan Perwakilan Suku-suku yang merupakan pembantu Direktur dalam urusan kesiswaan. Mereka itu diantaranya Frans Kaisepo, Marcus Kaisepo, Lukas Rumkorem, Yan Waromi, Corinus Kre, Martin Indey dan Silas Papare.²⁹

Sekolah Pamong Praja di Kampung Harapan Jayapura ternyata merupakan pusat diskusi para pejuang kemerdekaan. Ide-ide kemerdekaan Indonesia kemudian merembes ke dalam tubuh Batalyon Papua yang dibentuk bersamaan dengan kedatangan Sekutu. Kepada putra-putra Irian Jaya anggota Batalyon Papua dan Polisi serta orang sipil telah dilancarkan suatu ajakan untuk melakukan pemberontakan. Demikian juga telah diadakan koordinasi di antara para pimpinan perjuangan seperti Silas Papare Martin Indey, dan Lukas Rumkorem untuk maksud ini. Pemberontakan yang direncanakan dimulai tanggal 25 Desember 1945 itu merupakan pemberontakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya. Inti pemberontakan ini berpusat pada penduduk asli dan anggota pasukan Batalyon Papua tadi. Akan tetapi pada malam hari tanggal 14 Desember 1945 Pemerintah Kolonial Belanda telah mencium rencana ini dan mengadakan penangkapan-pengangkapan di Jayapura. Dengan bantuan pasukan dari Rabaul (Irian Timur, sekarang PNG), Belanda mengadakan penangkapan terhadap 250 orang termasuk Sugoro. Secara ksatria Sugoro memikul tanggung jawab rencana pemberontakan itu. Ia bersama-sama Silas Papare dan Martin Indey dijatuhi hukuman penjara. Dengan demikian teman-teman beliau dibebaskan dari tuduhan. Meskipun demikian di dalam penjara di Jayapura antara Sugoro, Silas Papare dan Martin Indey diadakan persiapan pemberontakan-pemberontakan berikutnya. Pemberontakan berikutnya itu ditetapkan tanggal 17 Juli 1946.

Panggoncang Alam pejuang asal Minangkabau ditunjuk untuk memimpin pemberontakan itu. Sasaran pemberontakan adalah melucuti KNIL, menangkap pembesar-pembesar Belanda, menduduki stasion radio dan tempat-tempat vital lainnya. Meskipun amunisi telah dibagikan, akan tetapi sebelum Hari H, Belanda telah mencium akan adanya rencana pemberontakan itu. Kembali di Jayapura diadakan pembersihan. Silas Papare yang dianggap berbahaya di Jayapura kemudian dipindahkan ke Serui.³⁰

Para pejuang kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya kemudian menyadari bahwa perjuangan mereka harus lebih dibina dengan teratur. Dengan bimbingan para eks Digulis seperti Haryono dan Suprpto pada tahun 1945 di Abepura Jayapura dibentuklah Komite Indonesia Merdeka (KIM)³¹. KIM ini sebenarnya didirikan di kota Melbourne tidak lama sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Zakaria, Maskun, Kandur Maryono, Suka, Bambang Sindhu dan lain-lain. Dalam masalah repatriasi atas pemulangan orang-orang Indonesia ke tanah airnya KIM menolak campur tangan pemerintah Kolonial Belanda.³²

Meskipun pemimpinnya telah dibunuh Jepang, tetapi dalam tahun 1946–1947 Gerakan Simson muncul kembali di kampung Tablasufa dan kampung Tablanusa. Gerakan ini kemudian berbaur dengan Gerakan Merah Putih yang dipimpin oleh Marten Indey. Karena gerakannya ini Marten Indey beserta 1000 orang lebih ditangkap oleh pemerintah Kolonial Belanda. Ia dipersalahkan menentang kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda dan ingin memerdekakan diri.³³ Di samping adanya organisasi perjuangan seperti KIM, Gerakan Merah Putih juga terdapat organisasi perjuangan PIDRIS di bawah pimpinan Petrus Wettebessy. Organisasi ini bertujuan untuk memerdekakan rakyat dari penindasan pemerintah kolonial Belanda. Dalam tahun 1947 Petrus Wettebossy ditangkap oleh pemerintah Kolonial Belanda karena dipersalahkan menjadi pengikut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.³⁴

Gejolak semangat perjuangan rakyat Irian Jaya menyambut kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi di Jayapura, tetapi juga di daerah-daerah lain. Meskipun letak Irian Jaya jauh dari pusat revolusi kemerdekaan Indonesia, pulau Jawa, tetapi rasa kebersamaan dalam penderitaan di bawah pemerintah kolonial Belanda senantiasa berkumandang di seluruh tanah air Indonesia.

Sebagaimana halnya dengan di Jayapura, di Biak pun pada tanggal 31 Agustus 1945 diadakan peringatan hal lahir-

nya Ratu Wilhelmina. Pemerintah Kolonial Belanda selalu berpendapat bahwa perayaan hari ulang tahun ratunya patut pula dirayakan oleh rakyat di daerah kolonisasinya. Akan tetapi di tengah-tengah upacara, selagi para pejabat Belanda memperingati hari kelahiran ratunya, para tokoh pejuang kemerdekaan di Bosnik (Biak Timur) mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Sang Saka Merah Putih yang pertama kalinya ini dimaksudkan untuk mempertebal tekad, dan semangat mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang baru berusia dua pekan itu. Upacara pengibaran Sang Merah Putih itu dilakukan di halaman rumah Lukas Rumkorom dan dihadiri oleh sejumlah tokoh lain seperti Corinua Kre, Frans Kaisepo, Marcus-Kaisepo dan Nicolas Youwe.^{3 5}

Pengibaran bendera Merah Putih itu sudah barang tentu merupakan tindakan yang berani sekalipun di bawah hidungnya pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini merupakan bukti betapa tebal tekad dan semangat rakyat Irian Jaya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Insiden bendera pada tanggal 31 Agustus 1945 baik di Jayapura maupun di Bosnik (Biak) memperlihatkan kepada pemerintah Kolonial Belanda bahwa rakyat Irian Jaya sudah tidak mau lagi dijajah. Bersama-sama rakyat Indonesia di seluruh tanah air, demikian juga halnya rakyat Irian Jaya hendak menyatakan kepada pemerintah Kolonial Belanda, bahwa mereka telah bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya.

Untuk menghimpun serta menggerakkan seluruh kekuatan rakyat para pejuang Irian Jaya menyadari perlunya suatu wadah organisasi politik. Tanpa wadah yang dapat menampung aspirasi rakyat serta mengatur gerak langkah perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan, maka akan sedikit sekali hasil yang dapat diperolehnya. Oleh karena itu pada tahun 1945 di Biak Barat berdiri Cabang Partai Indonesia Merdeka (PIM) di bawah pimpinan Lukas Rumkorem. Melalui PIM ini selanjutnya dilancarkan penerangan-penerangan tentang arti dan tujuan dari Indonesia Merdeka itu.^{3 6}

Sejak Digul dijadikan tempat pengasingan bagi para perintis kemerdekaan tempat ini menurut Harsya W. Bachtiar menjadi semacam ijazah bagi para pemimpin perjuangan pembebasan Indonesia dari kekuasaan penjajah asing.^{3 7} Akan tetapi bukan berarti hanya ada satu tempat seperti Digul yang dijadikan tempat pengasingan bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Dalam tahun 1946 Serui di pulau Yapen dijadikan tempat pengasingan bagi Dr. Sam Ratulangi beserta stafnya yaitu Lanto Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, Latumahina, Suwarno, J.P.L. Tobing dan W.S.T. Pondang.^{3 7}

Setibanya rombongan Dokter Sam Ratulangi di tempat pengasingan itu, pemerintah Kolonial Belanda segera mengeluarkan maklumat kepada seluruh penduduk yang melarang rakyat Serui mengadakan hubungan apa pun dengan "tujuh oknum yang berbahaya. Pada mulanya rakyat Serui enggan menemui Dr. Sam Ratulangi dengan kawan-kawannya itu. Akan tetapi lambat laun mereka insyaf, bahwa tahanan-tahanan politik itu tidak berbahaya bagi mereka sehingga hubungan-hubungan di antara mereka dengan penduduk kian lama kian terjalin dengan baiknya. Sejalan dengan itu pengertian akan perjuangan Indonesia Merdeka di kalangan rakyat Serui makin meluas pula. Mereka tidak mengenal nama-nama anggota rombongan Dr. Sam Ratulangi itu, akan tetapi mereka mengenalnya sebagai "Tuan-Tuan Merdeka".^{3 8}

Meskipun dalam pengasingan, sebagai patriot-patriot bangsa yang tidak menyerah, "Tuan-Tuan Merdeka" dengan cara-caranya yang cermat menanamkan benih-benih patriotisme terhadap rakyat Serui. Benih patriotisme yang telah berkembang di dada para pejuang kemerdekaan di Serui ini bertambah menjadi subur dengan siraman dan rabuk patriotisme yang ditaburkan oleh Tuan-Tuan Merdeka itu.

Sebagai wujud nyata dari padanya di Serui pad tanggal 29 Nopember 1946 didirikan *Partai Kemerdekaan Indonesia Irian* (PKII). Partai yang diilhami oleh Dr. Sam Ratulangi ini dibentuk dalam suatu rapat tertutup di gereja. Sebagai ketua partai dipilih Silas-Papare.^{3 9}

PKII yang berpusat di kota Serui itu mempunyai anggota-anggota yang terpencar di beberapa tempat, baik di daratan Irian Jaya maupun di tempat-tempat lain seperti di Biak, Manokwari dan Sorong. Tujuan dari pada PKII ialah hendak mewujudkan kemerdekaan di Irian Jaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. PKII bekerja dan berjuang dengan segala keyakinan dan kenyataan melaksanakan program politik dan ekonomi yang didasarkan; "tanah Irian Jaya ialah tanah Indonesia, rakyat Irian Jaya ialah bangsa Indonesia dengan memakai Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan." Selanjutnya di antara para anggota PKII yang terkemuka pada masa itu ialah Lukas Rumkorem Corinus Kre, Samuel Kawab, Petrus Wettebossy, Maubella Rumsyayor dan Marcus Indey.⁴⁰

Pemerintah Kolonial Belanda melihat kenyataan yang berkembang di Serui lain daripada yang semula digambarkan. "Tujuh oknum yang berbahaya" bagi pemerintah Kolonial Belanda tetapi lebih terkenal dengan sebutan "Tuan-Tuan Merdeka" oleh penduduk Serui itu ternyata lebih merupakan "*the magnificent seven*" bagi para pejuang di kota itu. Di sisi lain kehadiran Tuan-Tuan Merdeka bahkan membawa khidmat tersendiri bagi pejuang rakyat Irian Jaya.

Adalah bukan pemerintah Kolonial kalau seandainya Belanda membiarkan upaya rakyat Irian Jaya untuk merongrong kewibawaan kolonialnya. Mengapa Digul menjadi tempat pengasingan bagi para perintis kemerdekaan? Mengapa Tuan-Tuan Merdeka diasingkan di Serui? Jawabnya sudah jelas; karena pemerintah Kolonial Belanda akan hancur karenanya.

Para pemuda Irian Jaya dilarang memberi salam "Merdeka" yang sudah menjadi kelaziman di antara mereka itu. Beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam penjara karena tidak menghiraukan larangan itu.⁴⁰

Ternyata pemerintah Kolonial Belanda takut akan ke-
gairahan rakyat Irian Jaya dalam menyatakan syukur terhadap

kemerdekaan bangsanya dengan pekik "Merdeka". Pekik "Merdeka" ternyata cukup membahana di sanubari rakyat Irian Jaya; suatu pekik yang mempesonakan bagi Bangsa Indonesia tetapi sangat menyentak dan memekakkan gendang telinga kolonialis Belanda di Irian Jaya.

Bagi keluarga pejuang kemerdekaan penderitaan bukanlah apa-apa asalkan mereka dapat mendampingi suami: mereka yang berjuang menegakkan keadilan dan mempertahankan martabat serta kemerdekaan bangsanya. Di dalam mendampingi suami, istri-istri pejuang banyak membimbing kaum wanita di Serui. Dengan dipimpin oleh Ibu Ratulangi mereka mendirikan perkumpulan Ibu-ibu Irian Jaya dengan nama *Ibunda*. Maksud didirikannya perkumpulan Ibunda yaitu untuk mempertinggi derajat kaum ibu di Serui.⁴²

Sementara itu dengan tidak mengenal lelah para pejuang Irian Jaya dalam kesempatan-kesempatan tertentu selalu menyebarkan paham-kebangsaan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya. Dalam upaya itu pada tahun 1946 Lukas Rumkorem menghimpun massa rakyat di Biak untuk melawan penjajah Belanda secara fisik, akan tetapi usaha itu gagal dan Lukas Rumkorem harus meringkuk di penjara Jayapura dari tahun 1947 – sampai akhir tahun 1948.⁴³

Meskipun Lukas Rumkorem ada di dalam penjara, tetapi di bawah pimpinan pejuang yang lain rakyat Biak justru meningkatkan perlawanannya terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Pada tanggal 14 Maret 1948 di Biak meletus pemberontakan rakyat Biak di bawah pimpinan Stefanus Yosef. Ia adalah seorang Kepala Distrik yang telah bekerja sebagai pegawai pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1941, di daerah danau Paniai. Pada masa pendudukan Jepang Stefanus Yosef bersama pemerintah Kolonial Belanda mengungsi ke Australia dan kembalinya dari tempat pengungsian pada tahun 1947 ia dijadikan *Bestuursassistent* di Biak. Dalam kedudukannya ini ia banyak berhubungan dengan pejuang-pejuang seperti

Lukas Rumkorem dan kawan-kawannya. Pada hari itu (14 Maret) Stefanus Yosef pergi ke Mokmer untuk berunding dengan kawan-kawannya dan membagi-bagikan senjata yang masih banyak tertinggal di hutan.⁴⁴

Selain Stefanus Yosef, para penggerak pemberontakan rakyat Biak 14 Maret 1948 ialah Petro Jandi, Hanokh Rumbrar, Hermanus Rumere, Petrus Korwa, Terianus Simbiak dan Markus Wattimena. Hari yang direncanakan tanggal 14 Maret 1948 jam 24.00 diajukan menjadi jam 18.00 Hal ini disebabkan sebelum ada perintah menembak, rakyat melakukan penembakan terhadap sebuah truk militer Belanda yang kembali dari piknik di Bosnik. Mendapat serangan yang mendadak itu Belanda terus membunyikan tanda bahaya di dalam kota. Rumah Stefanus Yosef dikepung dan digeledah, akan tetapi ia tidak ada di rumah. Perlawanan patriotik rakyat Biak berkobar selama 21 jam dan berakhir pada jam 15.00 tanggal 15 Maret 1948. Ada pun sasaran dalam pemberontakan rakyat Biak itu adalah:

1. Konsentrasi tentara Belanda dekat Kamp 17 Sorido (daerah kuasa H. Rumbrar dan P. Korwa).
2. Pos-pos penjagaan Belanda di lapangan terbang Boruku, lapangan terbang Mokmer dan pelabuhan (daerah kuasa Hermanus Rumere dan Petro Jandi).
3. Pusat PHB Belanda di sebelah Utara lapangan Boruku (daerah kuasa T. Simbiak dan S. Rumwaropen).

Menghadapi perlawanan rakyat Biak itu pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengancam akan menggempur habis-habisan rakyat Biak kalau para pemimpin pemberontakan tidak mau menyerah. Demi rakyat yang dibelanya terpaksa perlawanan dihentikan.⁴⁵

Meskipun tembak menembak sudah berhenti sejak jam 15.00 tanggal 15 Maret 1948, akan tetapi pada keesokan harinya Belanda mendatangkan bala bantuan dari Jayapura. Sebagai kelanjutannya, di mana-mana diadakan pembersihan, 40

orang penggerak pemberontakan ditangkap lalu dipenjarakan di Jayapura selama 6 bulan. Oleh hakim kolonial Belanda mereka dijatuhi hukuman dari hukuman penjara selama sembilan bulan hingga hukuman mati. Petro Jandi (yang pernah bergerilya di Sulawesi Selatan) dijatuhi hukuman mati dan ditembak mati pada tahun 1949 di Jayapura. Stefanus Yosef dohukum seumur hidup di penjara Cipinang Jakarta dan baru dibebaskan kemudian pada tahun 1950 oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pemimpin-pemimpin lainnya seperti T. Simbiak (dihukum 15 tahun), H. Rumbrar (dihukum 10 tahun), Markus Wattimena (dihukum 10 tahun) ketiganya dipenjarakan di Digul. Sedangkan Petrus Korwa (dihukum 8 taun), Hermanus Rumere (dihukum 8 tahun), S. Rumwaropen (dihukum 4 tahun) kesemuanya dipenjara di Jayapura. Selebihnya mendapat hukuman sekitar 9 bulan hingga 2 tahun.⁴⁶

Rencana pemberontakan semacam itu juga dipersiapkan di Serui, Sorong dan Babo. Melalui pedagang kulit buaya rencana tersebut disebar luaskan kepada anggota-anggota pergerakan yang meliputi jumlah kurang lebih 32.000 orang.⁴⁷

Di Serui pusat kegiatan PKII, pemerintah Kolonial Belanda mencurigai Silas Papare sebagai orang yang mendalangi rencana pemberontakan. Silas Papare ditangkap. Akan tetapi di bawah pimpinan Alwi Rakhman dan Aninam rakyat menuntut agar Silas Papare dibebaskan. Terhadap tuntutan rakyat Serui itu Belanda khawatir akan timbul pemberontakan lagi, sehingga dengan dalih Silas Papare "sakit ingatan", ia kemudian dibawa ke rumah sakit di Biak.⁴⁸

Maksud pemerintah Belanda tidak lain untuk mengasingkan Silas Papare dari rakyat. Apalagi dengan kedatangan Tuan-Tuan Merdeka di Serui ternyata semangat kebangsaan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda semakin menyala-nyala di hati sanubari rakyat Serui.

Tentang Dr. Sam Ratulangi bersama kelompok Tuan-Tuan Merdeka lainnya sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Renville, pada akhir bulan Maret 1948 dibebaskan dari peng-

asingannya dan diterbangkan ke Surabaya melalui Biak dan Ujungpandang.⁴⁹

Walaupun Tuan-Tuan Merdeka telah meninggalkan Serui dan Silas Papare juga telah ditangkap, tetapi semangat perlawanan tidak kunjung padam. "Esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti". Itulah kenyataan perjuangan di Irian Jaya. Di sisi lain dengan ditangkapnya pemimpin perjuangan rakyat Irian Jaya, keyakinan akan kebenaran perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa di bawah naungan Republik Indonesia semakin mantap.

Di dalam perjuangannya rakyat Irian Jaya menyadari bahwa masalah kemerdekaan bangsa terletak di tangan mereka sendiri. Apa pun yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda semata-mata bertujuan untuk tetap menguasai daerah Irian Jaya di bawah kibaran bendera dan panji-panji Kolonialis Belanda. Oleh karenanya tidak asing lagi kalau di beberapa tempat diketemukan bentuk-bentuk perlawanan rakyat. Meskipun terdapat berbagai bentuk dan nama organisasi perjuangan di Irian Jaya, seperti Gerakan Merah Putih, KIM, PKII dan lain-lainnya, kesemuanya itu bertujuan sama: memajukan rakyat Irian Jaya dan sekaligus mengenyahkan penjajah Belanda dari bumi Irian Jaya serta bersatu sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kecurigaan pemerintah Kolonial Belanda terhadap perlawanan rakyat Irian Jaya juga berkembang terhadap media massa majalah *Suara Irian*. Majalah ini dikategorikan ke dalam majalah yang berazaskan kemerdekaan. Oleh karena itu pada tanggal 6 Januari 1950 S. Tomaso seorang telegrafis di Serui harus berhadapan dengan penguasa Belanda. Ia dipersalahkan menempelkan Suara Irian di muka rumahnya. Sebagai kelanjutan dari kejadian itu di Serui diadakan perampasan Suara Irian oleh HPB Serui K. den Hertog.⁵⁰

Di daerah Kepala Burung, yaitu di Manokwari dan meluas ke Babo (Bintuni), Sorong, Kokas dan Fak-Fak pada akhir

tahun 1946 dan awal tahun 1947 terjadi peletusan kegiatan Gerakan Merah Putih di bawah pimpinan Samuel Kawab dan Sangaji Malan yang berusaha menjatuhkan pemerintah Kolonial Belanda.⁵¹

Terhadap gerakan yang menentang penjajahan, Belanda selalu mengemukakan, bahwa kegiatan-kegiatan tersebut digerakkan oleh orang-orang yang berasal dari daerah lain di luar Irian Jaya.⁵²

Dengan cara tersebut pemerintah Kolonial Belanda hendak membuat jarak antara rakyat Irian Jaya dengan rakyat Indonesia lainnya. Pemerintah Kolonial Belanda sengaja menutup kenyataan, bahwa rakyat Irian Jaya telah memiliki pejuang-pejuang putra Irian Jaya sendiri. Adanya kesadaran nasional Indonesia pada rakyat Irian Jaya telah terbukti dengan adanya tokoh-tokoh seperti tersebut di atas.

Gerakan Merah Putih di daerah Kepala Burung sebagai disebutkan di atas juga merupakan organisasi politik untuk bersatu dengan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai Merauke dan memperbaiki kesejahteraan bangsa.⁵³

Adanya perlawanan-perlawanan rakyat dan organisasi politik di Irian Jaya mengakibatkan kecurigaan pemerintah Kolonial Belanda terhadap pemuka-pemuka rakyat. Belanda tidak menyadari bahwa bagi para pejuang, penjara bukan apa-apa, bahkan jiwa raga mereka dipertaruhkan untuk menegakkan kemerdekaan yang telah diperolehnya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tindakan pemerintah Kolonial Belanda nampak dari penangkapan terhadap Lodewijk Mandacan yang telah diberi pangkat Kapten, akan tetapi ia dapat meloloskan diri dan melancarkan gerilya di daerah Kepala Burung. Samuel Kawab penggerak Gerakan Merah Putih di daerah ini juga ditangkap dan dihukum penjara selama 1 tahun 8 bulan, karena dituduh memberontak terhadap pemerintah Kolonial Belanda.⁵⁴

Sementara itu di daerah Sorong dan kepulauan Raja Ampat, S.K. Tumengkol melalui Partai Kemerdekaan Indonesia Irian giat membina perlawanan rakyat sejak 1946. Di samping gerakan-gerakan yang dilancarkan melalui PKII, Sangaji Malan membentuk organisasi PERINTIS yang lebih banyak bergerak di daerah kepulauan Raja Ampat dan Sorong. Majalah Suara Irian yang terbit di Ujungpandang dan Warta Fajar merupakan majalah yang sering memuat karangan-karangan yang cukup berani pada masa itu, sehingga di antara pembacanya tidak jarang ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui proses peradilan. Berulang kali Sangaji Malan, Abdul Rasyid Arfan dan anakbuahnya ke luar masuk penjara di Doom-Sorong. Mereka dipersalahkan karena tindakannya terlalu berani menentang pemerintah Kolonial Belanda dan selalu berusaha memberikan semangat perjuangan kepada para pemuda.^{5 5} Dari laporan A. Salampeppy kepada sekretariat Badan Perjuangan Irian (BPI) di Jakarta disebutkan bahwa kemudian Sangaji Malan juga dipenjarakan di Jayapura.^{5 6}

Di daerah Fakfak perlawanan dipimpin oleh Raja M. Rumagesang Al Alam Ugar Sekar. Pada tanggal 1 Maret 1948 ia memerintahkan agar semua bendera Belanda di Kota Kokas diturunkan. Segera setelah itu terjadi pertempuran antara rakyat melawan Belanda. Untuk menguasai kembali keadaan pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan bala bantuan militer dari Sorong. Raja M. Rumagesang ditangkap dan dibawa ke Sorong. Di tempat ini ia berusaha mengumpulkan pengikut-pengikutnya dan merencanakan suatu pemberontakan. Sebelum terjadi pemberontakan ternyata pemerintah Kolonial Belanda mencium rencana gerakan tersebut sehingga Raja M. Rumagesang kembali ditangkap dan ditawan di asrama tentara Monokwari. Meskipun berada di dalam tawanan ia masih sempat mempengaruhi pemuda Irian Jaya untuk tidak menjadi tentara Belanda. Di antara mereka yang sadar kemudian merencanakan untuk mengadakan pemberontakan dan membakar asrama militer Belanda. Rencana mereka bocor dan Raja M.

Rumagesang beserta pengikut-pengikutnya dibawa ke Jayapura serta kemudian dipenjarakan di Abepura, Jayapura. Meskipun di dalam penjara, oleh semangat patriotisme yang berkobar terus dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia, ia berhasil mempengaruhi sesama tahanan di penjara agar terus melawan pemerintah Kolonial Belanda. Kegiatannya itu diketahui oleh Belanda sehingga ia harus meringkuk dalam sel menanti pengadilan. Akhirnya Raja Rumesang dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi karena rakyat mengajukan permohonan keringanan hukuman dan juga pembelaan pengacaranya, hukuman mati atas dirinya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Dengan kedua tangan terbelenggu, Raja. M. Rumesang diangkut dengan kapal laut ke Ujungpandang. Nampaknya disini pemerintah Kolonial Belanda mengawatirkan kemungkinan Raja M. Rumesang meloloskan diri sehingga ia kemudian disingkirkan ke Nusakambangan. Baru pada tahun 1950, Raja M. Rumesang, raja Kokas yang pejuang, dibebaskan atas perintah Pemerintah Republik Indonesia.^{5 7}

Hasrat rakyat Irian Jaya dalam melepaskan dirinya dari belenggu pemerintah Kolonial Belanda sangat memerlukan ketabahan dan pimpinan yang tangguh. Keadaan geografis di mana hubungan satu sama lain sangat sulit memberi pengaruh kurang menguntungkan bagi para pejuang putra Irian Jaya. Meskipun demikian dengan secara diam-diam mereka berusaha tetap menyusun kekuatan dan mengkonsolidasi diri. Dalam upaya membina kader-kader pejuang Irian Jaya maka pada bulan Desember 1954 dibentuk Gerakan Pelarian Pemuda di Serang, Fakfak dan Kaimana. Gerakan ini berusaha mengirimkan para pemuda ke luar Irian Jaya yang diharapkan kelak dapat kembali ke daerah ini untuk membebaskan saudara-saudaranya dari penguasa pemerintah Kolonial Belanda.^{5 8}

Rakyat Kaimana yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merasa berbahagia, melihat dan merasakan kenyataan bahwa pemerintah Kolonial Belanda ternyata masih me-

nanamkan kekuasaannya. Dari kenyataan itu dalam tahun 1946 rakyat Kaimana tergerak oleh pimpinan Mukhamad Ahmad untuk membentuk suatu organisasi perjuangan dengan nama "Merdeka Bersama Kaimana Irian Barat". Melihat aktivitas organisasi "Merdeka Bersama Kaimana Irian Barat atau MBKIB ini (yang selalu memupuk rasa kebangsaan Indonesia), maka pada setiap perayaan 31 Agustus pemerintah Kolonial Belanda selalu memanggil kepala-kepala suku untuk dibujuk agar tetap setia kepada Belanda. Meskipun demikian para Kepala Suku sadar bahwa harga diri suatu bangsa tidak terletak pada jamuan peringatan ulang tahun Ratu Belanda. Dalam hal ini para Kepala Suku selalu menolak keberadaan pemerintah Kolonial Belanda dan setia pada MBKIB serta cita-cita pergerakannya. Karena upaya membujuk para Kepala Suku yang telah terpengaruh oleh MBKIB tidak berhasil, maka Muhammad Akhmad (pendiri MBKIB) dalam tahun 1948 ditangkap dan diasingkan ke Ayamaru selama 10 tahun. Selanjutnya pemerintah Kolonial Belanda merencanakan untuk mendigulkan Kepala-Kepala Suku, tetapi karena rakyat mengancam akan lari masuk hutan, akhirnya rencana ini dibatalkan.⁵⁹

Di Mimika semangat perjuangan menentang kolonialisme Belanda terutama digerakkan oleh para Guru Kei yang bertugas di daerah ini. Mereka tergabung di dalam Persatuan Semangat Pemuda 1945 (PSP-45). Selain perjuangan menentang pemerintah Kolonial Belanda, mereka juga menentang Republik Maluku Selatan (RMS) yang berusaha menanamkan pengaruhnya di daerah Irian Jaya. Mereka secara berkelompok dan sembunyi-sembunyi giat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia (RRI), di antaranya pada tanggal 28 Oktober 1957 di rumah B.J. Raharusun, serta mengibarkan bendera Merah Putih; dua hal yang terlarang pada masa itu. Perjuangan PSP-45 di Mimika ini kemudian dilanjutkan secara nyata ketika L. Renwarin pada tahun 1960 ditunjuk menjadi Ketua PSP-45 Cabang Mimika oleh Ketua Umum PSP-45 B. PSP-45 B. Felubun yang berkedudukan di Merauke, karena ke-

giatannya di dalam PSP-45 ini L. Renwarin minta diberhentikan dari tugasnya sebagai Guru. Akan tetapi karena aktivitasnya pula dalam organisasi ini ia ditahan selama setahun (8 April 1961 – 8 April 1962). Sebagaimana diketahui PSP-45 didirikan oleh Legiman Mangunroto dalam tahun 1945. Demikian pula semasa bertugas di Mimika Frans Kaisiepo mendirikan organisasi Irian Sebagian Indonesia (ISI).⁶⁰

Perlawanan rakyat di Merauke semula juga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu para pejuang berkumpul untuk membicarakan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia di bumi Irian Jaya. Dalam kesempatan ini mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilarang oleh pemerintah Kolonial Belanda.⁶¹ Perlawanan mereka menjadi nyata dengan dibentuknya organisasi *Untuk Pembebasan Irian* (UPI) di rumah penjara Digul. Organisasi ini diketuai oleh Benyamin Felubun dan dibentuk pada tahun 1955 atas anjuran J.A. Dimara. Di beberapa tempat kemudian didirikan Cabang UPI, di antaranya di Okaba dengan ketuanya C. Tamnge dan Muting diketuai oleh Yan Kameubun.⁴⁵) Kepada para anggota UPI selalu ditanamkan rasa kebangsaan Indonesia dan bersedia serta bersiap-siap untuk membantu para ilfitran baik itu intelijen RI maupun pasukan penyerbu kelak.⁶² Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Pebruari 1960 UPI diganti namanya menjadi PSP-45 dengan Ketua Umum Benyamin Felubun.⁶³

Dalam bulan Agustus 1960 PSP-45 merencanakan suatu pemberontakan terhadap pemerintah Kolonial Belanda, akan tetapi sebelum organisasi ini bergerak, Belanda telah mencium rencana PSP-45 tersebut. Oleh karena itu segera pemerintah Kolonial Belanda mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap anggota-anggota PSP-45. Sekitar 19 orang anggota PSP-45 ditangkap dan dipenjarakan. Mereka itu di antaranya Ketua Umum PSP-45 sendiri B. Felubun (dihukum 6 tahun), Harry Suwarno (Sekretaris I, dihukum 5 tahun), Karel Labetubun

(Sekretaris II, dihukum 3½ tahun), Carolus Tamnge Benda-hara, dihukum 4 tahun). Para anggota pengurus yang mendapatkan hukuman selama 3½ tahun sampai 6 tahun dipenjarakan di Merauke, selanjutnya dipindahkan ke Digul dan terakhir di penjara Biak. Baru pada tanggal 15 Oktober 1962, yaitu pada masa *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), mereka dibebaskan dengan disaksikan oleh Perwakilan Indonesia di Biak Drs. Nawawi dan perwakilan Belanda Van Aght⁶⁴

Dalam perjuangan sesuatu bangsa, rencana yang telah disusun sering gagal dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena ketajaman intelijen musuh atau karena kolaborasi dari antara pejuang itu sendiri dengan pihak penjajah. Karena prinsip yang berbeda ataupun persepsi perjuangan yang berlainan terkadang diantara sesama pejuang harus berhadapan satu sama lain.

Pada akhir tahun 1947, karena perbedaan paham dengan Markus Kaisiepo dan Nicolas Youwe, Silas Papare Ketua PKII meninggalkan Irian menuju pulau Jawa untuk melanjutkan perjuangannya dari sana.⁶⁵ Ketika masalah Irian Jaya makin menghangat dipersengketakan antara Indonesia — Belanda, Silas Papare melihat perlunya didirikan suatu badan perjuangan yang membantu usaha-usaha pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu pada tanggal 12 Oktober 1949 ia mendirikan Badan Perjuangan Irian (BPI) berkedudukan di Bintaran Tengah 9 Yogyakarta.⁶⁶ Setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jakarta, BPI kemudian ikut hijrah ke Ibu kota Jakarta. Kewajiban BPI yang pokok yaitu memajukan suku bangsa Irian Jaya dan membawa mereka ke arah derajat yang sama dengan bangsa Indonesia lainnya.⁶⁷ Organisasi BPI ternyata tidak saja berada di ibu kota Jakarta tetapi juga hampir di semua ibu kota propinsi. Hal ini membuktikan betapa besar solidaritas dan rasa kesatuan bangsa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia terhadap nasib saudara-saudaranya di

Irian Jaya yang masih dalam cengkeraman kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, bahkan Kongres Rakyat Perjuangan Irian Jaya yang diselenggarakan di Ujungpandang dari tanggal 7-10 Pebruari 1952 ternyata telah disadari oleh utusan BPI dari seluruh propinsi.^{6 8}

C. TRI KOMANDO RAKYAT DI IRIAN JAYA

1. Usaha-usaha Belanda untuk memisahkan Irian Jaya dari Kesatuan Republik Indonesia

Semasa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah pelarian Belanda yang berkedudukan di Australia telah mempersiapkan kesatuan-kesatuan pejabat pemerintah yang dapat diikuti sertakan dengan angkatan perang Sekutu, *South West Pasific Area* (SWPA). Persiapan ini dipimpin oleh Menteri Jajahan merangkap Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.J. van Mook. Hal ini sesuai dengan strategi perang Jenderal Douglas Mac Arthur yang tidak akan melibatkan diri dalam persoalan-persoalan daerah yang akan dilaluinya dalam gerak majunya ke Jepang. Kesatuan-kesatuan yang akan menerima pelimpahan dan yang akan meletakkan dasar-dasar pemulihan kekuasaan pemerintah jajahan Belanda di daerah-daerah bekas jajahan Belanda yang dapat ditaklukkan kembali dinamakan kesatuan-kesatuan *Netherlands Indies Civil Administration* atau NICA.^{6 9}

Sebagaimana diketahui akhir masa pendudukan tentara Jepang di Irian Jaya mulai nampak pada Minggu ke-empat bulan April 1944 ketika kumpulan armada-armada Amerika Serikat mendarat mendekati Jayapura.^{7 0} Begitu Angkatan Perang Sekutu berhasil menaklukkan tentara pendudukan Jepang di Irian Jaya urusan-urusan sipil diserahkan kepada kesatuan-kesatuan NICA. Setiap kesatuan NICA terdiri dari 30 sampai 84 anggota di bawah pimpinan seorang *Commanding Officer NICA* atau Conica yang kemudian disamakan dengan kedudukan seorang asisten residen. Sejumlah kesatuan NICA

ditempatkan di bawah pimpinan seorang *Senior Officer* NICA atau *Sonica*. Sonica ini disamakan kedudukannya dengan seorang Residen. Kedudukan kesatuan-kesatuan NICA ini berada di tempat-tempat yang telah ditaklukkan tentara Sekutu yaitu di Jayapura, Sentani, Wakde, Sarmi, Bosnik, Serui, Numfor, Sausapor dan Morotai. Di antara para pejabat Sonica kebanyakan orang-orang Indonsia yang sekaligus bertindak sebagai perantara tentara Sekutu yaitu Sujono, Ruslan, Darmanto dan Saleh Bratawijaya. Kolonel C. Gabriel merupakan Sonica pertama yang mendarat di Jayapura. Ia berkedudukan sebagai pembantu staf Letnan Jenderal Walter Krueger Panglima kesatuan Amerika Serikat yang ke-6 (*Sixth Army*). Di Jayapura (yang kemudian dijadikan pusat Angkatan Perang Sekutu di Irian Jaya), para anggota kesatuan NICA diberi tempat tersendiri. Salah seorang pemimpin kesatuan NICA ini ialah Kolonel R. Abdulkadir Wijoyoatmojo kemudian diangkat menjadi Conica.⁷¹ Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ia dikenal sangat berpihak kepada kepentingan pemerintah Kolonial Belanda.

Di dalam strategi perang Sekutu, Indonesia (kecuali pulau Sumatera) sebenarnya termasuk kawasan sasaran di bawah komando Jenderal Mac Arthur sebagai Panglima Tertinggi Komando Pasifik Barat Daya (*South West Pacific Area Command*, SWPAC). Akan tetapi pada tanggal 19 Juni 1945 Jenderal Douglas Mac Arthur mengumumkan bahwa wilayah Indonesia dilimpahkan ke dalam kekuasaan Komando Lord Luis Mountbatten sebagai Panglima Tertinggi Komando Asia Tenggara (*South East Command*, SEAC).⁷² Alasan pelimpahan wewenang tersebut berpangkal pada kekuatan Jenderal Douglas Mac Arthur yang sedang dipusatkan untuk dapat membinasakan pertahanan terakhir dari kekaisaran Jepang. Sedangkan pelaksanaan daripada pelimpahan wewenang ini baru terlaksana pada bulan Juli 1945.⁷³

Selain perjanjian Potsdam mengukuhkan pelimpahan wewenang atas seluruh wilayah Indonesia ke dalam kekuasaan

Komando Mountbatten, juga disebutkan "bahwa *occupied area* harus dikembalikan kepada penguasa semula."⁷⁴ Atas dasar klausul ini Inggris atas nama Sekutu "berwewenang" menduduki Indonesia, akan tetapi ia harus menyerahkan negeri ini ke tangan Belanda. Meskipun demikian antara Amerika, Inggris dan Belanda telah terjadi perdebatan mengenai cara pendekatan dan pengaturan bagaimana hendak dipakai di dalam menangani masalah politik dan militer di Indonesia. Pada akhirnya dicapai kesepakatan pada tanggal 24 Agustus 1945 di London, antara lain disebutkan:

Pertama, Komando Asia Tenggara (SEAC) harus mempunyai kekuatan lengkap guna mengakhiri pertempuran di Indonesia. Pada saat itu NICA harus patuh secara mutlak kepada perintah Panglima Tertinggi Komando Asia Tenggara. Selain itu dalam tahap ini Komando Asia Tenggara (SEAC) harus bertindak tidak mengundang asumsi umum bahwa ia memiliki kekuasaan politik, tetapi haruslah nampak NICA diberi peranan penting dalam memperkenalkan dirinya. Kedua, akhirnya pada tahap berikutnya seluruh kekuasaan harus diserahkan kepada Belanda.⁷⁵

Mengingat wilayah jangkauan menjadi bertambah luas, maka untuk melaksanakan tugas pelimpahan dan melikwidasi tentara Jepang di Indonesia Laksamana Mountbatten membentuk sebuah komando bawahan yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison.⁷⁶ Satu hal yang merupakan kekurangan Komando Asia Tenggara seperti dikatakan Benedict R.O.G. Anderson ialah bahwa Komando Asia Tenggara tidak mengetahui situasi politik di Indonesia (*ignorant of the political situation in Indonesia*).⁷⁷

Tugas Komando Asia Tenggara (SEAC) yang dilimpahkan kepada AFNEI di Indonesia diumumkan dengan perantaraan radio di Singapura sebelum tentara Inggris mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945.⁷⁸ Tugas AFNEI itu seperti diungkapkan oleh Mountbatten adalah:⁷⁹

- a. menerima penyerahan tentara Jepang.
- b. membebaskan tawanan perang dan interniran dari pihak Sekutu.
- c. melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk direpatriasi.
- d. memulihkan dan memelihara perdamaian untuk diserahkan kepada pejabat-pejabat sipil.
- e. mengumpulkan informasi mengenai penjahat perang untuk menghadapkannya ke pengadilan.

Tugas itu oleh Kahin dinilai sebagai tugas yang hebat,⁸⁰ oleh karena sebagaimana disebutkan di atas situasi politik di Indonesia tidak diketahui oleh Komando Asia Tenggara. Rentetan kejadian mulai dari pengikut sertaan kesatuan NICA dalam pendaratan tentara Sekutu di Irian Jaya, perjanjian Potsdam dan Persetujuan London 24 Agustus 1945 kesemuanya itu merupakan upaya pengukuhan NICA untuk atas nama pemerintah Kolonial Belanda menjajah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Irian Jaya J.P.K. Van Fechoud (*Chief Conica*) sebagai residen Irian Jaya yang menggantikan Kolonel R. Abdulkadir Wijoyoatmojo bertindak mewakili pemerintah Kolonial Belanda sampai daerah ini dijadikan daerah yang dikepalai oleh seorang gubernur. Dia pulalah yang memimpin usaha untuk memisahkan daerah Irian Jaya dengan kesatuan wilayah Indonesia lainnya.⁸¹

Untuk melaksanakan niatnya menguasai kembali Indonesia, Belanda melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Konferensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 15 – 25 Juli 1946 merupakan taktik Belanda dalam melakukan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia. Tujuan konferensi ini untuk membentuk negara-negara di daerah yang baru diterima dari Inggris. "Negara-negara itu kelak akan dijadikan imbalan terhadap Republik Indonesia, untuk memaksa RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana diusulkan oleh pemerintah Belanda."⁸² Gagasan bentuk federasi ini telah di-

ucapkan oleh Ratu Wilhelmina dalam pidato radio di London tanggal 7 Desember 1942. Ia mengumumkan bahwa sesudah perang akan dibentuk *commonwealth* di antara negeri Belanda, Indonesia, Suriname dan Curacao yang akan berpartisipasi dengan penuh kepercayaan kepada diri sendiri serta kebebasan mengurus urusan dalam negeri tetapi dengan kesediaan saling membantu secara menguntungkan.⁸³ Dengan begitu Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *selfgovernment* di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.⁸⁴

Dalam Konperensi Malino yang dihadiri oleh 26 tokoh yang diundang mewakili 15 daerah di luar Jawa dan Sumatera, Conica J. van Eechoud menunjuk Frans Kaisiepo untuk mewakili daerah Irian Jaya. Sehari sebelum konperensi ini dibuka di Ujungpandang telah dilakukan upacara penyerahan pemerintahan atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Irian Jaya oleh Inggeris (atas nama Panglima Tertinggi SEAC) kepada Letnan Gubernur Jenderal van Mook sebagai wakil pemerintah Kolonial Belanda.⁸⁵

Sebelum berangkat ke Ujungpandang untuk menghadiri Konperensi Malino, Corinus Marcellus Krey menyarankan agar Frans Kaisiepo menemui Sugoro yang saat itu sedang menjalani hukuman di penjara Abepura Jayapura. Dengan bantuan pegawai penjara Elly Uyo dan seorang anggota tentara Batalyon Papua Johan Aer terjadilah pertemuan itu pada tanggal 9 Juli 1946 antara Sugoro — Frans Kaisiepo — Corinus M. Krey. Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu menugaskan Frans Kaisiepo agar mengusulkan nama "Papua" diganti dengan nama IRIAN.⁸⁶

Sebenarnya nama "Irian" telah dicetuskan sejak tahun 1945. Atas saran Sugoro kedua bersaudara Frans Kaisiepo dan Markus Kaisiepo menulis sebuah artikel tentang penggantian nama "Papua" yang dikirimkan ke surat kabar Penyuluh yang terbit di Australia.⁸⁷ Tulisan yang disampaikan ke surat kabar Penyuluh di Brisbane Columbia Camp itu berjudul

"PAPUA" atau "IRIAN". Dalam penerbitan Penyuluh tanggal 8 September 1945 surat kabar ini memuat surat kiriman itu yang berbunyi antara lain bahwa "Zaman kemerdekaan, zaman perubahan sudah tiba, maka nama PAPUA pun tidak diinginkan oleh putra-putrinya, karena mungkin dengan nama itu Pemerintah Belanda tidak memberikan kesempatan bekerja, belajar dan berbuat lainnya bagi orang Papua. Maka dengan perantaraan Surat Kiriman ini kami serukan agar nama yang boleh dipakai sesuai dengan keadaan iklim daerah ini ialah "IRIAN" yang arti "PANAS" sebagai pengganti nama "PAPUA".⁸⁸

Memenuhi amanat agar diusulkan penggantian nama Papua, pada tanggal 18 Juli 1946 di hadapan para peserta Konferensi Malino muncullah nama IRIAN yang diumumkan oleh Frans Kaisiepo sewaktu menyampaikan pidatonya.⁸⁹ Nama itu kemudian disiarkan oleh pegawai dinas penerangan Belanda sehingga dikenal oleh orang-orang di luar ruang konferensi.⁹⁰ Bukan itu saja, bahkan pada malam harinya untuk pertama kalinya nama IRIAN dikumandangkan dalam siaran radio Ujungpandang.⁹¹ Sejak itu Pemerintah Republik Indonesia menggunakan nama Irian ini sehingga kemudian pemerintah Kolonial Belanda melarang pemakaian nama itu.⁹²

Sementara itu sejak Perjanjian Linggarjati ditanda tangani pada tanggal 15 Nopember 1946, pemerintah kolonial Belanda sudah menjajagi kemungkinan penguasaan wilayah Irian Jaya. Pendirian Pemerintah Kolonial Belanda itu telah diucapkan oleh Menteri Jonkman di muka Parlemen Belanda pada tanggal 10 Desember 1946, terutama menyangkut pasal-pasal 3 dan 4 Perjanjian Linggarjati. Dalam hubungan ini mereka menghendaki agar "*West Nieuw Guinea*" dapat memperoleh kedudukan tersendiri terhadap Kerajaan Belanda susunan baru dan Negara Indonesia Serikat, meskipun mungkin penduduk asli sukar untuk menyatakan pendapatnya. Dengan demikian gagasan menjadikan Irian Jaya menjadi daerah kolonisasi tersendiri.⁹³ khusus bagi orang-orang Belanda yang berasal

dari wilayah Indonesia lainnya untuk menetap dan membina pemerintahan sendiri telah dicetuskan pada waktu itu.⁹⁴ Di samping itu atas usul Menteri Seberang Lautan daerah ini hendak dijadikan tempat bagi warganegara Belanda yang dianggap sebagai penjahat politik atau *politieke dilinguenten* dalam Perang Dunia II.

Sebagai realisasi dari politik tersebut diberangkatkanlah dua rombongan dari Negeri Belanda, masing-masing terdiri atas 130 orang dan 90 orang tahanan. Sesudah sejauh 3 mil dari peraturan negeri Belanda mereka dibebaskan dari kedudukannya sebagai tahanan pemerintah.⁹⁵

Usaha untuk menghancurkan Republik Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda dilanjutkan lagi dengan membentuk Negara Indonesia Timur di bawah seorang Presiden Indonesia.⁹⁶

Secara sadar pemerintah Kolonial Belanda tidak mengikutsertakan peserta dari Irian Jaya, karena ia menganggap Irian Jaya sebagai daerah tersendiri, lepas dari daerah-daerah yang akan merupakan wilayah Negara Indonesia Timur. Pada dasarnya dalam konperensi ini terdapat pertentangan pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah peserta. Meskipun mereka ini dipilih untuk menghadiri konperensi oleh pemerintah Kolonial Belanda, mereka menyatakan keberatan maksud Van Mook untuk memisahkan Irian Jaya dari wilayah Negara Indonesia Timur. Pertentangan pendapat ini mewujudkan pertentangan pertama antara Indonesia dan Belanda mengenai kedudukan Irian Jaya.⁹⁷

Hubertus J. van Mook sangat besar andilnya dalam usahanya untuk melaksanakan politik *divide et impera* di Indonesia. Menurut Adam Malik, dialah yang memainkan peranan sebagai painedas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, meski pada akhir kariernya, ia hanya bekerja sebagai pegawai pada Sekretariat PBB.⁹⁸ Selama berkuasa di Indonesia dia telah pula melakukan tekanan politik dan tekanan militer terhadap Indonesia. Ketika Konperensi yang diselenggarakannya dalam

tahun 1946 merupakan usahanya untuk mencabik-cabik negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka. Tekanan politiknya itu diiringi dengan tekanan militer berupa tindakan Belanda yang terus menerus mengirimkan pasukannya ke Indonesia.⁹⁹ Lebih lanjut Adam Malik menyebutkan bahwa para pemimpin Indonesia kemudian menyadari akan politik van Mook yang mempunyai dua sasaran Pertama menghancurkan republik dan kedua terus melaksanakan *grand design*, yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat yang sudah lama dirintisnya dengan mengadakan konperensi-konperensi di daerah luar Jawa dan Sumatera.¹⁰⁰

Sementara itu di sisi lain, niat pemerintah Kolonial Belanda untuk memisahkan Irian Jaya dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia terungkap juga ketika Belanda memasukkan wilayah ini dalam suatu persetujuan pembentukan *South Pacific Commission* (SPC) Canberra (Australia).

Ada pun anggota-anggotanya adalah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Perancis, New Zealand yang masing-masing mewakili daerah jajahannya dan berkedudukan di Noumea (Kaledonia Baru) jajahan Perancis.¹⁰¹

Dalam anggaran dasar SPC ayat 1 dirumuskan bahwa wilayah yang dicakup badan ini yaitu meliputi daerah-daerah yang tidak memerintah diri sendiri yang pada umumnya terletak di sebelah selatan khatulistiwa, dari dan termasuk *Netherlands New Guinea* di sebelah barat sampai daerah-daerah milik Perancis di Oceania dan Pitcairn di sebelah timur.¹⁰²

Tujuan dibentuknya SPC itu adalah untuk memperkuat kerja sama internasional guna memajukan dan perkembangan sosial ekonomi dari bangsa-bangsa di daerah yang belum ber-pemerintahan sendiri di kawasan Pasifik Selatan.¹⁰³

Keadaan dalam negeri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesiasampai akhir tahun 1949 merupakan batu ujian bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai usaha pemerintah Kolonial Belanda telah dilancarkan untuk memaksakan kehendak-

nya untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Selama masa ini telah dilakukan usaha-usaha di bidang diplomasi untuk mengakhiri kemelut perjuangan bangsa Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda. Di lain pihak Angkatan Perang kita menganggap bahwa perundingan atau persetujuan dengan Belanda selalu merugikan perjuangan.¹⁰⁴

Puncak perjuangan bangsa Indonesia di bidang diplomasi melahirkan Konperensi Meja Bundar (KMB). Konperensi ini dimulai tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag dan selesai pada tanggal 2 Nopember 1949. Hasil-hasil konperensi ini yang diratifikasi KNIP yang bersidang pada tanggal 6-14 Desember 1949, kemudian disusul keberangkatan delegasi Republik Indonesia Serikat (RIS) ke negeri Belanda untuk menandatangani akte "Penyerahan" kedaulatan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Dengan ini maka secara formal Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh sesuatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Jaya).¹⁰⁵

Dalam konperensi itu, perundingan yang paling banyak memakan waktu dan kesabaran ialah mengenai nasib Irian Jaya dalam RIS. Nampaknya Belanda membayangkan Irian Jaya itu seperti Inggris memperlakukan Australia. Itulah sebabnya Belanda dengan sekuat tenaga berusaha untuk memisahkan daerah ini dari kesatuan wilayah Republik Indonesia.

Atas saran-saran Panitia PBB untuk Indonesia (*United Nations Commission for Indonesia*, UNCI), yang berusaha keras menembus kemungkinan jalan buntu, dapat dihasilkan suatu rumusan untuk sementara tetap membiarkan Irian Jaya di bawah kekuasaan pemerintah Belanda dengan ketentuan sampai akhir satu tahun, penentuan status wilayah politik Irian Jaya akan diselesaikan melalui perundingan langsung antara Indonesia dan Belanda. Meskipun dengan berat hati

akhirnya delegasi Indonesia dapat menerima ketentuan-ketentuan tersebut dengan tuntutan agar dalam rumusan terakhir dengan jelas dicantumkan bahwa status Irian Jaya tetap dalam keadaan sengketa.¹⁰⁶ Sikap pemerintah Kolonial Belanda untuk mempertahankan Irian Jaya cenderung untuk memperlihatkan bahwa Belanda masih berkuasa di Asia.

*"These were difficult to define, but probably, as some Netherlands remarked, New Guinea's retention served as a symbol to indicate that the Netherlands had emerged from the conference in a position of strength, as well as a symbol indicating that the Netherlands was still an Asian power."*¹⁰⁷

Dalam pasal 2 ayat 2 ayat f Piagam Penyerahan Kedaulatan disebutkan bahwa *status quo* keresidenan Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland.¹⁰⁸

Klausul itu telah dimanfaatkan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk mengukuhkan gagasan memisahkan Irian Jaya dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan dijadikannya daerah Irian Jaya sebagai salah satu propinsi (propinsi seberang lautan) dalam lingkungan kerajaan Belanda dengan mengangkat S.L.J. van Waardenburg menjadi gubernur "*Nederlands Nieuw Guinea*" pada awal tahun 1950. Ia dibantu oleh seorang asisten residen yang berkedudukan di Jayapura.¹⁰⁹

Meskipun pemerintah Kolonial Belanda telah secara nyata melanggar ketentuan *status quo* keresidenan Irian, akan tetapi kemudian diadakan juga perundingan soal Irian Jaya antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai tanggal 4 Desember 1950. perundingan ini menemui jalan buntu sebab masing-masing pihak tidak beranjak dari pendiriannya.¹¹⁰

Lebih lanjut di bawah Gubernur J. van Baal yang menggantikan Gubernur van Waardenburg sejak tanggal 1 April 1953, pemerintah Kolonial Belanda menyatakan bahwa berdasarkan kodrat Tuhan dan perkembangan sejarah adalah tugas pemerintah kolonial untuk mempertahankan Irian Jaya sebagai tanah jajahannya. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur P.J. Platteel sejak 1 Mei 1958, hubungan pemerintah Belanda yang menguasai Irian Jaya dan pemerintah Australia yang menguasai Irian Timur (sekarang PNG) dipererat. Dalam konperensi antara pihak Belanda dan Australia yang diadakan di Canberra (20–24 Oktober 1959) dan di Jayapura (Maret 1960) dibahas hubungan kedua negara yang bertujuan untuk menyatukan seluruh daerah Irian. Dengan demikian daerah Irian Jaya akan diikutkan dalam kesatuan itu untuk melepaskannya dari lingkungan negara Republik Indonesia.^{1 11}

Selama lebih 10 tahun sejak tahun 1950 delapan kabinet RI secara berturut-turut dalam program kerjanya selalu mencantumkan masalah Irian Jaya. Keadaan di dalam negeri sesudah KMB ternyata tidak bertambah baik. Keamanan dalam negeri mengalami ujian. Selain daripada itu pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan subversi Pemberontakan Westerling (dengan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA) di Bandung dan Sulawesi Selatan, pemberontakan Andi Aziz di Ujungpandang dan pemberontakan Republik Maluku Selatan pimpinan Soumokil merupakan bukti aksi-aksi subversif Belanda. Aksi-aksi subversif ini jelas menunjukkan pemerintah Kolonial Belanda melancarkan tindakan-tindakan yang tidak bersahabat terhadap Indonesia.^{1 12}

Dalam perkembangan selanjutnya pada 5 April 1961 pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu dewan perwakilan penduduk yang dinamakan *Nieuw Guinea Raad* atau Dewan Nieuw Guinea. Dewan yang dibentuk ini beranggotakan 21 orang di mana 10 anggota merupakan wakil yang dipilih dari penduduk pribumi. Dua orang anggota lainnya merupakan wakil-wakil dari golongan non pribumi warga ne-

gara Belanda dan bukan orang Belanda, sedangkan sisanya 9 orang terdiri dari orang-orang Belanda.¹¹³

Dalam tahun 1952 pemerintah Kolonial Belanda telah sengaja mengabaikan hasil KMB. Dengan mengubah undang-undang dasar Belanda, Irian Jaya dinyatakan digabungkan dengan kerajaan Belanda bersama-sama Suriname dan Kepulauan Antillen Belanda. Selanjutnya pemerintah Kolonial Belanda mengumandangkan janji hendak memberikan "hak menentukan nasib sendiri" kepada penduduk Irian Jaya.¹¹⁴

Baik ide pembentukan badan legislatif maupun janji pemberian "hak menentukan nasib sendiri" keduanya diarahkan untuk memikat para pejuang dan penduduk Irian Jaya sehingga pemerintah Kolonial Belanda dapat bertahan lama di wilayah ini.

Menjelang tahun 1960 pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan *Papoeanisasi* atau Papuanisasi di kalangan masyarakat Irian Jaya. Usaha Belanda ini nampak dengan munculnya pegawai-pegawai pemerintah Kolonial serta peraturan-peraturan kepegawaian yang memungkinkan kedudukan yang kuat bagi orang-orang Irian Jaya. Papuanisasi ini juga merupakan upaya pemerintah Kolonial Belanda dalam mengikut sertakan rakyat Irian Jaya dalam pemerintahan. Ada dua hal yang berhubungan dengan Papuanisasi itu ialah: (1) pengikut sertaan rakyat dalam jabatan-jabatan yang memerlukan tanggung jawab sebagai pimpinan terutama dalam bidang pemerintahan dan peradilan; (2) pengikut sertaan rakyat dalam badan perwakilan rakyat yakni Dewan Nieuw Guinea dan Dewan-dewan Daerah. Di samping kedua kemungkinan kesempatan bagi rakyat Irian Jaya itu, pemerintah Kolonial Belanda menyediakan wadah bagi rakyat untuk menjadi anggota Pasukan Sukarela Papua (*de Papoea Vrijwilligers Corps*).¹¹⁵

Menurut penilaian pemerintah Kolonial Belanda, Dewan Nieuw Guinea dianggap tidak mencukupi kebutuhan sehingga pada bulan Oktober 1961 Gubernur Belanda membentuk Ko-

mite Nasional Papua yang beranggotakan 80 orang. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, komite ini kemudian mengeluarkan manifesto yang mengajukan masalah-masalah sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Menentukan bendera Papua.
- 2) Lagu kebangsaan Papua.
- 3) Penggantian nama *West Nieuw Guinea* menjadi Papua Barat.
- 4) Nama bangsa menjadi Papua.
- 5) Usul agar bendera Papua dikibarkan tanggal 1 Nopember 1961.

Di dalam sidangnya Dewan Nieuw Guinea kemudian menyetujui manifesto Komite Nasional Papua itu, kecuali tentang pengibaran bendera Papua yang direncanakan tanggal 1 Nopember 1961, oleh pemerintah Kolonial Belanda diputuskan untuk dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961.¹¹⁷

Dengan adanya manifesto itu pemerintah Kolonial Belanda hendak mengelabui rakyat Irian Jaya seakan-akan mereka menghendaki pembentukan suatu negara Papua dengan bendera dan lagu kebangsaan sendiri.

2. Perjuangan di bidang bersenjata

Perjuangan di bidang diplomatik mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi telah dimulai sejak Kabinet Natsir di mana salah satu programnya adalah memperjuangkan penyelesaian soal Irian Jaya. Di atas telah disebutkan bahwa setiap kabinet baru selalu memasukkan ke dalam program kerjanya masalah perjuangan mengembalikan Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memang merupakan amanat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Akan tetapi setia perjuangan mengembalikan Irian Jaya dengan upaya damai melalui saluran diplomasi selalu menga-

lami jalan buntu. Pemerintah Kolonial Belanda secara sengaja mempermainkan perundingan-perundingan dengan Indonesia sambil mencari modus untuk memisahkan daerah Irian Jaya dari kesatuan wilayah Indonesia. Di sisi lain menurut Adam Malik jatuh bangunnya setiap kabinet Indonesia semenjak 17 Agustus 1950 mempunyai kaitan langsung dengan masalah pengembalian Irian Jaya ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁸

Meskipun demikian, pada masa diplomasi penyelesaian masalah Irian Jaya, dalam tahun 1952 telah diadakan infiltrasi (penyusunan) para sukarelawan Indonesia ke pulau Gag yang dipimpin oleh Ali Kahar.¹¹⁹ Dalam infiltrasi ini seorang putra Irian Jaya Abdullah Puarada gugur di pulau ini.¹²⁰

Infiltrasi berikutnya dilaksanakan pada tahun 1953 di bawah pimpinan Sersan Kalalo M.L. dengan wakilnya Kopral B.P.Z. Souhuat dan berhasil mendarat di daerah Fakfak. Dalam tahun 1954 dilakukan lagi infiltrasi yang dipimpin oleh J.A. Di mara dan berhasil mendarat di Teluk Etna.¹²¹

Selanjutnya dalam keadaan suhu perjuangan mengembalikan Irian Jaya yang makin meningkat, pada tanggal 9 Nopember 1960 telah bertolak PG (Pasukan Gerilya) 100 sejumlah 29 orang dari pulau Buru menuju Teluk Etna (Kaimana). Mereka ini dipimpin oleh Letnan Antaribana, akan tetapi kemudian tidak diketahui beritanya. Selanjutnya pada tanggal 14 September 1961, yaitu tiga bulan sebelum TRIKORA dikomandoakan, berangkat PG 200 dengan kekuatan pasukan sejumlah 39 orang di bawah pimpinan Letnan Jamaluddin Nasution dengan tujuan pendaratan kepulauan Raja Ampat.¹²²

Dalam penyusunan ini ikut serta dua putra Irian Jaya (dari *Gerakan Pelarian Pemuda*) masing-masing Gerson Esurd dan Wos Ombosapu yang gugur bersama-sama Letnan Jamaluddin Nasution.¹²³

Pasukan PG 200 ini kemudian dapat bergabung dengan PG 500 dan PG 400 di pulau Waigeo.¹²⁴

Tujuan dari infiltrasi-infiltrasi itu terutama untuk mengadakan kontak dengan penduduk Irian Jaya agar mereka turut serta secara aktif melawan kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.

Antara tahun 1950–1960 pemerintah Kolonial Belanda banyak mengadakan tekanan terhadap penduduk yang memihak Republik Indonesia. Di lain pihak Belanda memasukkan orang-orang yang anti Indonesia untuk memperkuat kedudukan kolonialnya. Mereka ini diharapkan dapat menghalangi penyusupan gerilyawan Indonesia yang berasal dari perbatasan daerah Irian Jaya yaitu dari kepulauan Kei, Aru, Seram Timur serta Gag yang sudah sejak lama banyak mengadakan hubungan dengan daratan Irian Jaya.^{1 2 5}

Dalam perjuangan mengembalikan wilayah Irian Jaya di bidang diplomatik, mengingat semakin tidak bermanfaatnya perjanjian KMB mengenai wilayah ini, dalam program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II dicantumkan program pembatalan perjanjian KMB dan menghapuskan Piagam Penyerahan kedaulatan. Selanjutnya ditegaskan untuk meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan *de facto* Indonesia atas Irian Jaya. Untuk merealisasi pembatalan KMB secara sepihak pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Sukarno menanda tangani Undang Undang No. 13 tahun 1956 tentang Pembatalan KMB yang sekaligus membatalkan hubungan Indonesia–Belanda berdasarkan perjanjian itu. Dalam Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa hubungan selanjutnya antara Indonesia–Belanda adalah hubungan yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah meresmikan pembentukan Propinsi ini meliputi wilayah Irian Jaya yang masih diduduki pemerintah Kolonial Belanda dan daerah Tidore, Oba Weda, Patani serta Wasile di Maluku Utara. Sebagai Gubernur Irian Jaya pada bulan September 1956 dilantiklah Sultan Tidore Zainal Abidin Syah.^{1 2 6} Pembentukan Propinsi Irian Jaya ini dengan ibu kota berkedudukan di Soa-Sio (Ti-

dore) didasarkan pada Undang-Undang No. 15 tahun 1956. Propinsi ini selanjutnya disebut Propinsi Irian Jaya Perjuangan.^{1 2 7}

Masalah pembebasan Irian Jaya sebagai wilayah kesatuan Indonesia juga mendapatkan pengertian dan dukungan dari sebagian besar bangsa-bangsa di negara-negara Asia Afrika. Mereka secara langsung ataupun tidak memberikan bantuan dengan jalan melarang pesawat-pesawat militer Belanda yang membawa bantuan dan perlengkapan perang untuk mendarat di wilayah negaranya. Dengan demikian Belanda terpaksa mengirimkannya lewat negara-negara Amerika Latin. Demikian juga negara-negara yang semula pasif mulai mengubah pendiriannya yang menguntungkan Indonesia. Pemerintah Jepang telah membatalkan kunjungan kapal induk Belanda *Karel Doorman* ke negerinya, sedangkan Malaysia dan Singapura menyatakan kesediaannya mengirimkan sukarelawan-sukarelawan ke Indonesia.^{1 2 8}

Dalam menghadapi sikap pemerintah Kolonial Belanda yang bersikap keras menduduki Irian Jaya, pemerintah Indonesia menyadari perlunya dukungan militer yang kuat dan disegani lawan. Menyadari hal ini dalam Kabinet Kerja I yang dibentuk lima hari sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia mulai memodernisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Untuk maksud ini berturut-turut pemerintah Indonesia mengangkat Adam Malik sebagai Duta Besar RI untuk Uni Soviet dan Polandia serta Sukarni untuk RRC. Maksud pengangkutan kedua duta besar ini untuk mencari senjata di Moskow, Warsawa dan Beijing (Peking). Selama ini Pemerintah Amerika Serikat hanya menjual senjata-senjata ringan kepada Indonesia yang penggunaannya terbatas hanya untuk gangguan intern, di samping itu negara-negara Barat tidak bersedia menjual senjata-senjata yang mutakhir dalam jumlah besar kepada Indonesia.^{1 2 9}

Sejalan dengan usaha modernisasi ABRI tersebut pada akhir bulan Desember 1960 Menteri Keamanan nasional

Jenderal A.H. Nasution mengadakan kunjungan ke Uni Soviet untuk menanda tangani persetujuan pembelian senjata. Pembelian senjata ini adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia yang pernah dilakukan dengan luar negeri.¹³⁰

Mengingat letak geografis Irian Jaya sebagai pulau tersendiri, maka penambahan dan modernisasi kekuatan ABRI banyak dipergunakan untuk kebutuhan armada laut dan udara. Tujuan dari pembelian senjata itu ialah potensi yang disusun atas kekuatan yang diperhitungkan akan mampu pada suatu saat membebaskan Irian Jaya secara fisik militer. Dengan demikian akan dapat diwujudkan pembentukan suatu kekuatan yang melebihi kekuatan militer Belanda di Irian Jaya.¹³¹

Sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat, pemerintah Indonesia dengan ini hendak menyatakan kepada Belanda, bahwa Indonesia mampu memiliki kekuatan ABRI yang harus diperhitungkan oleh Belanda.

Sebagaimana dikemukakan di atas dalam usahanya memisahkan Irian Jaya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Belanda selalu menggunakan tekanan politik dan militer. Di samping tindakannya mengajukan masalah dekolonisasi dan internasionalisasi Irian Jaya lewat PBB, pemerintah Kolonial Belanda juga meningkatkan kekuatan militernya. Mereka telah mempersiapkan bantuan militernya ke Irian Jaya. Kekuatan armada lautnya yang akan dikirim ke daerah Irian Jaya ternyata sudah lama dipersiapkan di laut Karibia berupa kapal-induk Karel Doorman, 2 buah kapal perusak dan 2 buah kapal selam. Kedatangan armada ini di Irian Jaya diharapkan dapat memperpanjang waktu keunggulan militernya di daerah ini.¹³²

Selain usaha-usaha di bidang diplomasi untuk membebaskan Irian Jaya, masa antara tahun 1950–1960 diwarnai dengan politik konfrontasi. Politik konfrontasi ini ditandai dengan semakin meningkatnya suasana anti Belanda. Di Jakarta

pada tanggal 18 Nopember 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Jaya. Rapat umum ini kemudian diikuti dengan serentetan kejadian seperti:^{1 3 3}

- 1) Aksi pemogokan total buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957;
- 2) Pada hari itu juga pemerintah melarang beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda serta larangan penerbangan KLM mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia;
- 3) Mulai tanggal 5 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan Konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk dihentikan;
- 4) Terjadi serentetan aksi pengambil alihan modal dan milik Belanda di Indonesia, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958;
- 5) Untuk menggalang kesatuan gerak rakyat dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya, pada tanggal 10 Pebruari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Jaya.

Suhu anti Belanda di negeri ini makin meningkat disebabkan pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mengerti aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan ketika Belanda mengirimkan kapal intuk Karel Doorman ke Irian Jaya menjelang bulan Agustus 1960, hal ini disambut oleh pemerintah Indonesia dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda sejak 17 Agustus 1960.^{1 3 4}

Jalan diplomasi politik telah kita tutup. Konfrontasi sekarang sudah mengacu ke konfrontasi militer. Proses modernisasi dan peningkatan ABRI akan terus berjalan sampai bulan Juli 1962. Pada saat itu kekuatan ABRI sudah akan mampu melakukan penyerbuan total untuk menduduki Irian Jaya.^{1 3 5}

Sehubungan dengan hal itu pada tanggal 12 April 1961 Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat memberitahukan kepada Gabungan Kepala Staf (GKS) bahwa

Presiden/Panglima Tertinggi telah memerintahkan GKS untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Irian Jaya.¹³⁶ Segera pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DEPERTAN) yang bertugas untuk merumuskan cara yang paling tepat untuk mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam pembebasan Irian Jaya. DEPERTAN yang dibentuk pada tanggal 11 Desember 1961 diwakili oleh 14 anggota dari pejabat-pejabat tertinggi militer dan sipil baik dari badan-badan eksekutif maupun legislatif serta wakil-wakil Irian Jaya. DEPERTAN ini diketuai oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI, Menteri Pertama, Menteri Keamanan Nasional dan dilengkapi suatu staf Sekretariat. Dalam sidang DEPERTAN tanggal 14 Desember 1961 ditetapkan pembentukan suatu Komando Tertinggi (KOTI) Pembebasan Irian Jaya. Dengan pembentukan KOTI Pembebasan Irian Jaya diharapkan adanya kesatuan komando yang memungkinkan segala gerak langkah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan Irian Jaya dilaksanakan dengan bulat dan berencana.¹³⁷

Sebagai hasil DEPERTAN telah diambil keputusan yang terkenal yaitu TRI KOMANDO RAKYAT (TRIKORA) yang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 di bekas ibu kota perjuangan Republik Indonesia Yogyakarta. TRIKORA yang merupakan puncak atau langkah terakhir perjuangan pembebasan Irian Jaya dalam politik konfrontasi itu selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:¹³⁸

1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial;
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Jaya tanah-air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Pemilihan tanggal dan tempat untuk mengumumkan TRIKORA itu bukan tanpa maksud. Pada tanggal 19 Desember 1948, bangsa Indonesia pernah dihina oleh Aksi Militer

Belanda II. Pada waktu itu Pemerintah Kolonial Belanda hendak menghapuskan sama sekali daerah kekuasaan Republik Indonesia yang masih tertinggal dengan pusat kekuasaan terakhir di Yogyakarta. TRIKORA merupakan titik awal usaha penguasaan fisik daerah jajahan Belanda di Irian Jaya sebagai imbalan serbuan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 itu.

Menurut isinya, di dalam TRIKORA terdapat 2 perintah yang ditujukan.²⁴⁹

1. Kepada ABRI untuk bersiap-siap membebaskan Irian Jaya, yang pelaksanaannya setiap waktu akan ditentukan.
2. Kepada rakyat Indonesia untuk mengadakan persiapan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia dengan jalan menggagalkan usaha pembentukan Negara Papua yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Dengan diucapkannya TRIKORA mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Jaya mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala. Komando ini merupakan aparat yang menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk merebut Irian Jaya dan bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional ABRI serta para sukarelawan.¹⁴⁰

Adapun tugas Komando Mandala itu adalah:¹⁴¹

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer, dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah Propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara RI.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Propinsi Irian Barat:
 - a. sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi,

- b. supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Propinsi Irian Barat dapat secara *de facto* diciptakan daerah-daerah bebas atau didudukkan unsur kekuasaan/pemerintah daerah RI.

Sehubungan dengan pembentukan Komando Mandala itu pada tanggal 11 Januari 1962 ditetapkanlah Panglima Mandala yaitu Brigadir Jenderal (kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal) Suharto, Wakil I Panglima Kolonel (Laut) Subono, Wakil II Panglima Kolonel (Udara) Leo Wattimena dan sebagai Kepala Staf Gabungan diangkat Kolonel Achmad Tahir.^{1 4 2}

Untuk dapat melaksanakan tugasnya Pimpinan Tertinggi Komando Mandala kemudian menentukan strategi operasional yang disesuaikan dengan keputusan Panglima Besar Komando Mandala. Ada pun strategi Komando Mandala yang direncanakan dalam operasi-operasi Pembebasan Irian Jaya di bagi dalam 3 fase:^{1 4 3}

1. Sampai akhir 1962: *Fase infiltrasi*.
Memasukkan 10 kompi sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas *de facto*. Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Jaya dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.
2. Mulai awal 1963: *Fase eksploitasi*.
Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.
3. Awal 1964: *Fase Konsolidasi*.
Menegaskan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Jaya.

Suasana kritis dan tegang makin meningkat antara Indonesia dan Belanda. Masing-masing pihak mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan perbenturan kekuatan secara fisik militer. Di perairan Irian Jaya pemerin-

tah Kolonial Belanda giat melakukan patroli, bahkan telah direncanakan pengiriman 1000 marinir dari negeri Belanda dan cadangan dari NATO.¹⁴⁴

Sementara itu pada tanggal 12 Januari 1962 Kesatuan Angkatan Laut RI mengadakan patroli rutin di laut Arafuru. Kesatuan Patroli Cepat (*Fast Patrol Unit*) ini terdiri dari tiga buah Motor Torpedo Boat (MTB) masing-masing RI Macan Tutul, RI Harimau dan RI Macan Kumbang. Komando kesatuan MTB itu dipegang oleh Kapten Wiratno yang juga adalah Komandan RI Macan Tutul. Dalam patroli ini turut serta para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut (MBAL) yaitu: Komodor Yos Sudarso Deputy KSAL, Kolonel Sudomo Kepala Direktorat Operasi MBAL, Kolonel Mursid - Asisten II KASAD serta perwira staf lainnya. Para perwira tinggi dan senior ini bermaksud melakukan tugas-tugas patroli dan meninjau lebih dekat medan laut terdepan di daerah perbatasan dengan daerah pendudukan Belanda di Irian Jaya.

Dari peninjauan ini kemudian dapat disusun rencana-rencana operasi selanjutnya. Oleh karena jenis MTB itu kecil, maka tim dari MBAL dibagi-bagi; Komodor Yos Sudarso menempati RI Macan Tutul dan Kolonel Sudomo ditempatkan di RI Harimau.¹⁴⁵

Pada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan jam 21.15 waktu I (zone time I) pada ketinggian 3000 kaki di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang tidak berlampu terbang rendah melintasi formasi patroli ALRI. Kedua kapal terbang tersebut dikenali sebagai pesawat pembom *Nep-tune* bermesin dua dan pesawat pemburu jenis *Firely* bermesin satu. Di samping itu pada radar kesatuan patroli ALRI dapat ditangkap getaran-getaran dari dua kapal laut yang cepat bergerak, masing-masing di posisi depan dan di lambung kanan belakang pada jarak kurang lebih 10 km. Ternyata kedua kapal tersebut adalah 2 kapal perusak. Untuk mengetahui secara tepat kedudukan kesatuan patroli, kedua kapal laut itu kemudian menembakkan peluru-peluru suar yang menerangi sekitar

tempat tersebut. Sesaat kemudian di kiri kanan kapal-kapal MTB bersemburan air yang amat tinggi. Hal ini berarti musuh mulai menembak dengan meriam. Sementara itu kedua pesawat terbang musuh terus menerus menjatuhkan peluru-peluru suar dari udara sehingga musuh dapat melihat dengan jelas posisi kapal-kapal kita.

Melihat situasi yang membahayakan karena serangan tiba-tiba itu Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih pimpinan Komando Patroli dan memerintahkan penembakan balasan. Akan tetapi karena kedua kapal perusak musuh mempunyai persenjataan yang lebih kuat dan telah mengambil posisi pengepungan terhadap kesatuan patroli kita, Komodor Yos Sudarso memerintahkan RI Macan Tutul untuk melakukan *manouver*, sehingga musuh terpaksa harus mengalihkan sasaran dengan memusatkan perhatian pada kapal komando RI Macan Tutul. Dengan demikian kedua MTB yang lain RI Macan Kumbang dan RI Harimau mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari incaran-tembakan-tembakan meriam musuh. Siasat RI Macan Tutul ini berhasil, tetapi mengakibatkan ia sendiri terbakar dan tenggelam bersama-sama Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno serta awak kapalnya. Sesaat sebelum RI Macan Tutul tenggelam, melalui radio telefoni Komodor Yos Sudarso masih sempat mengomandokan pesan tempur (*combat message*): "*Kobarkan semangat pertempuran*" Pada jam 21.35 RI Macan Tutul tenggelam dalam keadaan terbakar.¹⁴⁶

Dalam Pertempuran Laut Aru gugur pula bersama Yos Sudarso dua putra Irian Jaya Nicolas Kabes dan Majid Puarada. Kedua putra Irian Jaya ini merupakan pemuda-pemuda Irian Jaya yang berhasil keluar dari Irian Jaya dengan maksud kembali lagi ke daerah ini dalam rangka membebaskan Irian Jaya dari pemerintah Kolonial Belanda.¹⁴⁷

Ketika RI Macan Tutul mendekati tenggelam, kedua kapal musuh kemudian melancarkan tembakan-tembakan salvo cepat bertubi-tubi dengan senjata jarak dekat kaliber 40 mm.

Setelah RI Macan Tutul tenggelam tembakan-tembakan secara membabi buta di arahkan ke kedua MTB yang lain. Namun akhirnya tembakan-tembakan itu dihentikan pada jam 21.55 dengan posisi kapal musuh pada 25 mil sebelah utara timur laut kepulauan Aru.¹⁴⁸

Gugurnya Komodor Yos Sudarso bersama anak buah RI Macan Tutul di dalam Pertempuran Laut Aru itu menaikkan suhu perjuangan pembebasan Irian Jaya.

Sebagaimana diketahui sebelum Komando Mandala mulai mengadakan operasi militer, telah diadakan perkiraan kemampuan Belanda di Irian Jaya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak RI, dalam tahun 1961 Angkatan Perang Belanda di Irian Jaya di bawah pimpinan Laksamana Laut L.E. Reesers yang membawahi ke empat unsur angkatan bersenjata mempunyai pertahanan yang cukup kuat dalam menghadapi konfrontasi militer RI.¹⁴⁹

Sesuai dengan rencana operasi Komando Mandala aktivitas penyusunan (infiltrasi) ke daratan Irian Jaya makin diintensifkan. Infiltrasi ini besar sekali kegunaannya sebagai tindakan operasional yang pertama. Pasukan-pasukan kecil yang menyusup ke daerah musuh dan mengadakan aksi gerilya akan mengacaukan musuh. Gerilyawan-gerilyawan ini akan dapat mengingat sebagian kekuatan musuh sambil mencari kedudukan yang strategis dan membentuk pos-pos terdepan sebagai persiapan bagi penyerbuan pasukan yang lebih besar.¹⁵⁰

Kegiatan infiltrasi pada awal tahun 1962 ini berada di bawah pimpinan Brigade Infantri 2 terdiri dari 3 pos yaitu:¹⁵¹

a. Kegiatan infiltrasi dari pos 101 Hanggodo

Dari pos selatan pada tanggal 23 Maret 1962 terjadi kegiatan-kegiatan infiltrasi melalui laut dengan menggunakan 3 buah perahu, satu di antaranya bermotor, membawa PG 600. Pasukan ini dipimpin oleh Maksum beserta Ki R/XV pimpinan Letnan Nussy berangkat dari Ujir dan Karwai menuju S. Jera dengan dua puluh empat orang anggota di bawah pim-

pinan Octovianus Marani dapat mendarat dengan selamat. Induk pasukan terpaksa kembali karena terlihat oleh pesawat patroli musuh Neptune. Mereka dapat kembali dengan selamat, kecuali 7 orang yang berada di atas kapal "Ho Sing Sang" yang ditembaki musuh dan kemudian dinyatakan hilang di antara Teluk Etna dan kepulauan Watu Belah.

b. Kegiatan infiltrasi dari pos 102 Kapi Jembawan

Satuan-satuan yang dikirim lewat Pos 102 ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi intelijen. Kegiatan mereka ini berbentuk tim pengintai yang dilaksanakan sebanyak 5 kali tetapi mengalami kegagalan. Meskipun demikian pada tanggal 13 Mei 1962 sejumlah 20 orang dari kesatuan Detasemen Pelopor (Brimob) sampai sasaran, akan tetapi sebelum mendarat mereka ini ditangkap oleh Angkatan Laut Belanda. Selanjutnya tanpa mengenal putus asa pada tanggal 7 Agustus 1962 sejumlah 63 orang terdiri dari 53 orang dari Detasemen Pelopor (Brimob) dan 10 orang sukarelawan dapat berhasil mendarat di pantai Rumbati dekat Patipi daerah Fakfak.

c. Kegiatan infiltrasi dari pos Hanilo

Pada tanggal 18 Maret 1962 jam 15.15 dari pos 103 Hanilo telah berangkat dari pulau Gebe ke pulau Waigeo dua peleton dan kelompok Komando Kompi 191261 atau disebut juga PG 300 di bawah pimpinan Letnan Nana. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka diketahui oleh pesawat udara musuh sehingga arah perahu terpaksa dibelokkan ke pulau Gag yang terletak di sebelah barat pulau Waigeo. Di sini mereka terisolir dan dalam keadaan yang demikian itu mereka dihujani dengan bom, peluru mitraliur dan mortir. Keadaan makin tegang ketika pada tanggal 25 Maret 1962 terjadi kontak senjata antara kapal perang Belanda dan pesawat terbang AURI yang mengakibatkan terbakarnya kapal perang Belanda itu. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 1962 Belanda mendaratkan pasukan-pasukan meriamnya di pulau Gag. Setelah hampir satu bulan terjadi perlawanan bersenjata di pulau Gag, pada

tanggal 15 April 1962 pasukan marinir Belanda kembali mengadakan pembersihan, akan tetapi pasukan-pasukan gerilya telah menyusup melalui daerah pedalaman dan menuju ke daerah pantai yang lain.

Sementara itu pada tanggal 20 April 1962 dua kompi peleton 191260 PG 300 di bawah Sersan Mayor Boy Thomas telah berangkat dari pulau Yu menuju Tanjung Dalpele di pulau Waigeo. Meskipun mereka diketahui patroli pesawat musuh, setelah berlindung di pulau Bala-Bala selama 2 jam akhirnya mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Gerakan-gerakan penyusupan lain lewat pos utara ini tercatat pada tanggal 15 Juli 1962 yaitu penyusupan pasukan PG 500 di bawah pimpinan Jonkey Robert Komontoy. Pasukan ini berkekuatan 87 orang dan berangkat dari pulau Gebe melalui Waigeo.

Di Waigeo ini mereka bertemu dengan satu regu rombongan yang terkenal dengan nama rombongan Herlina. Rombongan Herlina yang semula memakai bendera Belanda setelah mengetahui adanya pasukan kawan kemudian mengganti bendera dengan bendera Merah Putih. Kedua rombongan ini kemudian bergabung untuk mengadakan penyusupan bersama-sama di daerah Irian Jaya. Mereka ini kemudian memasuki teluk Arugu di sebelah barat laut Sorong. Pasukan gerilya PG 500 selanjutnya memasuki Sausapor pada tanggal 17 Juli 1962. Penyusupan ke daratan Irian Jaya sebelumnya telah dipelopori oleh PG 400 dengan pasukan sejumlah 200 orang dan penyeberangan ke daratan Irian Jaya ini dari Waigeo ditutup oleh rombongan penerangan Herlina pada tanggal 12 Agustus 1962.

d. Kegiatan infiltrasi dari Pos Wahai .

Setelah mengalami kegagalan mendarat dari pos 101 maka pada tanggal 9 Agustus 1962 sejumlah 90 orang dari Kompi Raiders Kodam XV di bawah pimpinan Letnan I Nussy akhirnya berhasil mendarat di Misool. Penyusupan berikutnya dari Wahai pada tanggal 11 Agustus 1962 dengan pasukan

sejumlah 46 orang terpaksa kembali lagi karena bertemu dengan kapal perusak musuh. Akan tetapi setelah mendapat pengawalan dari 5 buah MTB mereka kemudian berhasil mendarat dengan selamat pada tanggal 12 Agustus 1962. Ada pun kelima MTB tersebut setelah terjadi kontak senjata dengan kekuatan musuh yang terdiri dari 1 kapal perusak, 1 fregat, 1 kapal selam dan sebuah Neptune dapat pulang kembali ke pangkalan dengan selamat.

Semua gerakan-gerakan infiltrasi tersebut didasarkan atas Petunjuk Operasi No. 10 tertanggal 24 Februari 1962 Nomor POPS 01/SR/2/62. Tugas sasarannya adalah dengan jalan terang-terangan mengadakan operasi-operasi infiltrasi untuk menciptakan dalam waktu sesingkat-singkatnya secara *de facto* daerah-daerah bebas untuk mendudukkan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di daerah-daerah Sorong, Fakfak, Kaimana dan sekitarnya.^{1 5 2}

Dari gerakan-gerakan infiltrasi tersebut di atas diketahui pula, bahwa perlawanan pasukan-pasukan Belanda di Irian Jaya cukup tangguh. Untuk meningkatkan kegiatan penyusupan kemudian dikeluarkan lagi Petunjuk Operasi tanggal 26 Maret 1962 Nomor POPS/02/SR/3/62. Sasarannya tetap seperti POPS-01 dengan tugas lebih mempergiat usaha-usaha infiltrasi dan mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi serangan balas. Pasukan-pasukan penyusup langsung didatangkan dari garis belakang dan setelah istirahat beberapa jam sampai maksimal beberapa hari, kemudian diterjunkan dari udara dan dipusatkan di Pos-Pos 101, 102, 103 dan Pos Waihai.^{1 5 3}

Mereka itu kemudian disusupkan dalam bentuk serangkaian Perintah Operasi (PO) sebagai berikut:^{1 5 4}

1) Operasi Banteng.

Operasi Banteng merupakan operasi penerjunan PGT dan RPKAD dari udara dengan sasaran terjun daerah-daerah Kai-

mana dan Fak-fak. Sesuai dengan tujuan sasaran tersebut, maka operasi ini dibagi menjadi 2 ialah:

- a) Operasi Banteng I (Banteng Putih) di bawah pimpinan Mayor Udara Nayoan dengan daerah sasaran Semenanjung Fakfak. Pasukan yang diterjunkan berjumlah 40 orang di bawah pimpinan Lettu (U) Agus Hernoto. Penerjunan pasukan ini dilakukan pada tanggal 26 April 1962 jam 04.00 dengan menggunakan 3 buah pesawat Dakota.
- b) Operasi Banteng II (Banteng Merah) di bawah pimpinan Kapten Udara Santoso dengan daerah sasaran Kaimana. Penerjunan dilakukan pada tanggal 26 Mei 1962 jam 05.00 dengan menggunakan 3 buah pesawat Dakota. Adapun pasukan yang diterjunkan berjumlah 39 orang di bawah pimpinan Lettu (U) Heru Sinodo.

2). Operasi Garuda

Dalam Operasi Garuda ini bergabung dua kompi Batalyon Raiders Yon 454/Diponegoro dan anggota-anggota PGT. Pasukan dibagi menjadi dua, 1 kompi (disebut pasukan Garuda Merah) terdiri atas 140 orang dipimpin oleh Kapten Kartawi dipersiapkan untuk tujuan sektor Fakfak, 1 kompi lagi (disebut pasukan Garuda Putih) terdiri atas 122 orang di bawah pimpinan Lettu Idrus (almarhum) dipersiapkan untuk daerah sasaran Kaimana.

Pada tahap I Operasi Garuda Merah dengan pesawat Dakota pada tanggal 15 Mei 1962 menerjunkan pasukan di daerah Fakfak sejumlah 40 orang dan pada tanggal 16 Mei 1962 sejumlah 38 orang.

Sementara itu pada tanggal 15 Mei 1962 Operasi Garuda Putih menerjunkan pasukan di daerah Kaimana sejumlah 27 orang dan pada tanggal 17 Mei 1962 sejumlah 27 orang. Pada penerjunan ini sebuah pesawat Dakota tertembak jatuh ketika dalam perjalanan pulang, sehingga pada tahap kedua Operasi

Garuda menggunakan pesawat angkut besar Hercules. Dengan pesawat ini pada tanggal 19 Mei 1962 jam 04.00 diterjunkan pasukan Garuda Merah sejumlah 79 orang dan pada tanggal 26 Mei 1962 diterjunkan sejumlah 68 orang pasukan Garuda Putih.

3). Operasi Serigala

Pasukan yang dipersiapkan untuk operasi ini terdiri dari PGT dengan sasaran Daerah Sorong dan sekitarnya.

Adapun pelaksanaan dari operasi ini terbagi dalam 2 tahap yaitu:

- a) Pada tanggal 17 Mei 1962 dengan pesawat Dakota telah diterjunkan di Teminabuan pasukan sejumlah 39 orang pimpinan Letnan Udara Manuhua. Mereka jatuh di atas asrama tentara Belanda, sehingga segera terjadi pertempuran yang sengit selama beberapa hari. Setelah melalui saat-saat yang kritis, mereka berhasil mengkonsolidasi diri dan berhasil mengibarkan bendera Merah Putih. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1962 ini merupakan lambang terbentuknya sebagian wilayah RI di daerah tersebut.
- b) Dengan menggunakan pesawat Hercules pada tanggal 19 Mei 1962 telah diterjunkan di Sansapor pasukan sejumlah 81 orang di bawah pimpinan Letnan Muda Udara I Suhadi. Disini pun pasukan jatuh di atas asrama musuh dan setelah terjadi pertempuran rupanya disebabkan kemerosotan moral pasukan Belanda yang pada umumnya melihat sukses-sukses penerjunan pasukan Indonesia, maka keadaan segera dapat dikuasai oleh pasukan-pasukan kita.

4) Operasi Naga

Penerjunan Operasi Naga dilakukan pada tanggal 24 Juni 1962 dengan daerah sasaran Merauke dan sekaligus menggunakan 3 buah pesawat Hercules. Operasi ini dipersiapkan dengan pasukan sejumlah 215 orang terdiri atas 55 orang anggota pa-

sukan khusus dan 160 orang dari kompi Batalyon 530/Brawijaya di bawah pimpinan Mayor Benny Murdani.

Sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan gerilya pasukan-pasukan ini maka Belanda terpaksa memperbesar kekuatannya di Merauke yang semula hanya terdiri dari 2 kompi menjadi 2 batalyon.

5). Operasi Badar Lumut dan Badar Besi.

Operasi Badar Lumut dipersiapkan di Tual (Pos 101) dengan kekuatan dari Batalyon 521/Brawijaya. Mereka ini direncanakan akan mendarat di Kaimana tetapi pelaksanaannya tidak berhasil karena di perairan laut sekitar Kaimana berkeliaran kapal-kapal patroli Belanda.

Operasi Badar Besi yang dipersiapkan dari Pos 103 dengan kekuatan dari Batalyon 515/Brawijaya juga belum berhasil.

6). Operasi Lumba-Lumba

Sebagaimana halnya dengan operasi Badar Lumut dan Badar Besi, operasi Lumba-Lumba juga merupakan bagian dari operasi-operasi laut dalam rangka penyusupan gerilyawan dan pasukan ke daratan Irian Jaya. Dengan menggunakan 3 buah kapal selama sejumlah 45 orang gerilyawan di bawah pimpinan Letnan Satu Dolf Latumahina direncanakan akan didaratkan di daerah Jayapura. Dalam operasi ini sebuah kapal selam sempat mendaratkan sebagian pasukan gerilyawan tersebut di sekitar Tanah Merah (Jayapura). Dua kapal selam lainnya tidak sempat mendaratkan pasukan karena adanya perintah Panglima Mandala untuk menghentikan permusuhan. Ketiga kapal selam tersebut selanjutnya kembali ke pangkalan dengan selamat.

7) Operasi Lumbung

Sesuai dengan namanya, operasi ini bermaksud untuk menambah persediaan bahan makanan bagi pasukan-pasukan gerilyawan kita yang telah diterjunkan selama ini di daerah Irian Jaya.

Sejak semula perjuangan pembebasan daerah Irian Jaya dari cengkeraman pemerintah Kolonial Belanda merupakan hasrat yang tidak pernah padam dari putra-putra Irian Jaya sendiri. Berdirinya organisasi-organisasi politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia di daerah ini, seperti PKII, KIM, Gerakan Merah Putih, Perintis, MBKIB maupun BPI bahkan sampai kepada perlawanan fisik pada Pemberontakan Rakyat Biak telah membuktikan, bahwa rakyat Irian Jaya tidak bersedia hidup dalam alam penjajahan. Mereka ingin merdeka bersama-sama rakyat Indonesia lainnya.

Demikian pula halnya ketika diadakan infiltrasi-infiltrasi ke daerah Irian Jaya, Gerakan Pelarian Pemuda (yang dibentuk pada bulan Desember 1954) berhasil pula menyusupkan pemuda-pemuda Irian Jaya sebagai infiltran-infiltran yang bahu membahu bersama infiltran-infiltran lainnya.

Tidak hanya sampai di sini saja. Ketika para gerilyawan menyusup ke daerah Irian Jaya rakyat banyak membantu mereka. Setidak-tidaknya dengan tidak melaporkan kehadiran para gerilyawan kepada pemerintah Kolonial Belanda, mereka telah berbuat banyak untuk perjuangan pembebasan Irian Jaya ke dalam kesatuan Republik Indonesia.

Ketika sebuah kapal selam RI berhasil mendaratkan sejumlah gerilyawan di daerah Tanah Merah Jayapura, Martin Indey banyak membantu para gerilyawan ini. Sebagaimana diketahui pada awal proklamasi Indonesia, ia telah mendirikan KIM di daerah Jayapura. Bukan itu saja Elly Uyo juga banyak membantu para gerilyawan ini.

Meskipun daerah Biak tidak merupakan daerah penyusupan para gerilyawan, akan tetapi kegairahan menyambut TRIKORA tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Kegairahan ini tercermin ketika pada tanggal 13 Oktober 1962 penduduk setempat di kota Biak menyambut pembebasan dari para tahanan politik dari penjara Biak. Sebagaimana diketahui di kota ini dipenjarakan para pejuang Irian Jaya dari berbagai daerah seperti dari Jayapura, Biak, Serui, Monokwari, Sorong, Fakfak

dan Merauke. Penduduk yang datang berduyun-duyun ke rumah penjara Biak membawa makanan dan minuman bagi para bekas tawanan.¹⁵⁵

Di daerah medan penyusupan di pulau Gag rakyat menerima para gerilyawan dengan baik. Hal ini terbukti ketika pasukan PG 300 di bawah pimpinan Letnan Nana terisolir oleh pemboman-pemboman serta tembakan roket dan mitralyur musuh dari tanggal 7-11 April 1962 rakyat membantu mereka. Selain itu senang hati mereka juga turut memperkuat pasukan PG 300 dengan menggabungkan diri secara sukarela sejumlah 29 orang.¹⁵⁶

Di dalam pasukan PG 500 yang berjumlah 87 orang di bawah pimpinan Jonkey Robert Komontey banyak terdiri dari putra-putra Irian Jaya. Meskipun masih muda usia serta belum banyak berpengalaman tetapi semangat tempur mereka luar biasa. Jiwananya yang keras memerlukan banyak kesabaran dan ketabahan untuk membina mereka, namun di sisi lain mereka ini adalah pemuda-pemuda yang baik.¹⁵⁷ Sebagaimana halnya dengan pasukan PG 500, pasukan PG 400 pada umumnya terdiri dari putra-putra Irian Jaya sehingga mereka dapat dijadikan penunjuk jalan dan penterjemah.¹⁵⁸

Sementara itu pasukan PG 500, PG 200 dan PG 200 dan PG 400 telah berhasil mendarat di pulau Waigeo. Di pulau ini para gerilyawan bebas leluasa tidak menemui musuh, karena penduduk di sekitar pulau ini memang jarang didatangi Belanda. Selama di pulau ini Tim penerangan Herlina banyak mengadakan hubungan dengan rakyat sambil membagi-bagikan bendera Merah Putih, Tembakau, Gula, Rokok kain berwarna kepada penduduk setempat. Sementara itu ibu-ibu datang membawakan sayur mayur dan cabai untuk para gerilyawan. Di sini terjalin hubungan mesra antara rakyat dengan para gerilyawan.¹⁵⁹

Ternyata apa yang pernah dipropagandakan pemerintah Kolonial Belanda, bahwa rakyat Irian Jaya telah mempersiapkan perang setajam pisau silet untuk menyambut kedatangan

para gerilyawan tidak semuanya benar. Bahkan jauh sebelum dikomandokan TRIKORA, ketika Menteri Helders mengunjungi Sorong pada tanggal 28 Nopember 1956, melalui Kepala Sukunya rakyat Sorong meminta agar pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan kembali daerah Irian Jaya kepada pemerintah Republik Indonesia.¹⁶⁰

Memang dalam menghadapi para gerilyawan pemerintah Kolonial Belanda telah memperlakukan agar penduduk membunuh orang-orang Indonesia yang mendatangi rakyat. Karena menurut Belanda, para gerilyawan ini akan merampok harta milik penduduk. Manakala penduduk berhasil membunuh mereka, maka rakyat akan mendapat hadiah dari pemerintah Kolonial Belanda sebesar f. 100,00 (seratus gulden) untuk setiap kepala gerilyawan Indonesia.¹⁶¹

Jelaslah bahwa peran serta dari putra-putri Irian Jaya sendiri dalam membantu para gerilyawan sangat menentukan. Mereka ini lebih senang membantu gerilyawan dari pada membunuh sesama bangsanya. Meskipun memang tidak mustahil ada yang termakan oleh propaganda serta hadiah yang dijanjikan oleh Belanda.

Tidak saja ketika masih dalam masa konfrontasi saja, tetapi juga sesudah terjadi Persetujuan New York yang mengakhiri permusuhan antara Indonesia-Belanda dalam masalah Irian Jaya rakyat Sorong turut membantu. Ketika kemudian para gerilyawan ditempatkan pada km.14 dari kota Sorong, mereka ditempatkan di rumah Randa. Keluarga ini juga membantu gerilyawan-gerilyawan yang mendarat di sekitar Sorong. Setelah gencatan senjata rumahnya menjadi pusat kegiatan para gerilyawan.¹⁶²

Di kampung Tawaru, H. Ibrahim Bauw Raja Rumbati dengan sengaja mengumpulkan rakyat Untuk memberikan pertolongan kepada para gerilyawan. Di samping menyediakan makanan, mereka juga menyediakan tempat penampungan bagi para gerilyawan. Bahkan kapal motor milik H. Ibrahim Bauw sendiri disediakan untuk melaksanakan pemberian bantuan ini.¹⁶³

Sebagaimana diketahui para gerilyawan yang didaratkan di daerah Fakfak ini juga terdiri atas putra-putri Irian Jaya beserta putra-putra Indonesia lainnya.¹⁶⁴ Hal ini dapat dimengerti, karena sejak semula di daerah ini banyak terdapat penentang kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.¹⁶⁵

Ketika Menteri Bost mengunjungi Fakfak pada tanggal 27–29 Januari 1962, Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) di kota ini mengadakan konfrontasi di hadapan Menteri Bost dan meminta agar Irian Jaya dikembalikan kepada Republik Indonesia.¹⁶⁶ Dalam demonstrasi ini seorang pemuda anggota GRIB Izak Tellussa gugur karena tembakan tentara Belanda. Jasadnya kini dimakamkan di Taman Pahlawan di kota ini.¹⁶⁷

Daerah Kaimana merupakan daerah penyusupan para gerilyawan yang diluncurkan dari Pos 101 yang berpusat di Dobo, Aru. Di daerah Kaimana para gerilyawan diterjunkan pada sasaran medan yang cukup sulit yaitu di daerah pasir putih Urere. Dari Kaimana dari daerah Urere memakan waktu kurang lebih 1½ bulan. Para Gerilyawan di daerah Urere ini tidak semujur rekan-rekannya di daerah Sorong. Meski rakyat dari 2 kampung yang dilalui para gerilyawan mau membantunya, akan tetapi di daerah ini para gerilyawan sempat mendapat sambutan parang yang telah diasah.¹⁶⁸ Akan tetapi perlu dicatat, meskipun Frans Kaiseipo bekerja di Mimika, ketika ia mendengar adanya penerjunan di daerah Kaimana, ia pergi ke tempat ini. Di sini ia sangat aktif dalam memberikan bantuan kepada para gerilyawan.¹⁶⁹

Di daerah Merauke para gerilyawan yang tertawan Belanda kemudian dipenjarakan di Digul. Selanjutnya dari tempat ini pada bulan Juli 1962 bersama-sama pejuang Irian Jaya mereka dipindahkan ke Biak. Monokwari dan ke pulau Undi. Sementara itu para gerilyawan yang mendarat di Kuprik lebih beruntung karena tidak usah Digul. Bahkan pada tanggal 18 Oktober 1962 para pejuang Irian Jaya eks Digulis yang tergabung dalam PSP-45 melakukan anjingsana kepada para gerilyawan yang berada di Kuprik itu. Di samping itu meskipun pe-

nyusupan gerilyawan telah selesai, akan tetapi para anggota PSP-45 giat membagi-bagikan bendera Merah Putih, menyebarkan naskah lagu Indonesia Raya serta mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada para pemuda. Selanjutnya dalam gairah menyambut TRIKORA ini mereka yang tergabung dalam PSP-45 di Merauke, Kimaam dan Mapi pada bulan Nopember 1962 menyampaikan resolusi kepada Perwakilan UNTEA agar segera menyerahkan Irian Jaya kepada pemerintah Republik Indonesia.¹⁷⁰

Dari pengalaman penyusupan para gerilyawan nampak bahwa bukan hanya ada beberapa patriot, sebab di sisi lain kolaborator sudah barang tentu ada juga Kolaborasi dengan musuh disebabkan janji-janji maupun persepsi yang keliru terhadap perjuangan bangsa untuk mewujudkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. PERSETUJUAN NEW YORK DAN DEWAN MUSYAWARAH PEPERA.

Penyusupan laut dan udara yang telah dilakukan oleh pasukan-pasukan gerilyawan kita dalam rangka pelaksanaan TRIKORA di daerah Irian Jaya telah memberikan hasil positif di bidang militer. Pada mulanya pemerintah Kolonial Belanda mencemoohkan persiapan-persiapan serta rencana strategi Komando Mandala. Belanda memperhitungkan bahwa pasukan-pasukan gerilya Indonesia tidak mungkin dapat menyusup ke wilayah Irian Jaya. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa operasi-operasi penyusupan pasukan-pasukan gerilyawan Indonesia berhasil dengan baik, dan bahkan kota Teminabua jatuh ke tangan pasukan kita.

Oleh karena itu untuk meyakinkan pemerintah Kolonial Belanda bahwa bangsa Indonesia telah bertekad untuk merebut kembali daerah Irian Jaya, Komando Mandala memutuskan untuk melancarkan operasi yang bersifat terbuka. Operasi ini dilancarkan untuk menduduki Wilayah Irian Jaya dengan menggunakan seluruh slagorde yang ada baik taktis maupun

strategis yang diberi nama operasi Jayawijaya. Tujuan operasi ini untuk merebut dan mempertahankan seluruh wilayah Irian Jaya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan tujuan memperoleh kekuatan *de facto* atas seluruh wilayah ini. ¹⁷¹

Akan tetapi pendaratan-pendaratan pasukan gerilyawan Indonesia ke Irian Jaya selama masa infiltrasi telah menjadi salah satu pokok pembicaraan pejabat-pejabat tinggi militer Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan dunia internasional telah memberikan perhatian sepenuhnya berhubung dengan terjadinya ketegangan-ketegangan yang makin memuncak akibat sengketa Indonesia – Belanda. Secara tidak langsung Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB) mencoba memprakarsai usaha-usaha perdamaian antara kedua negara yang sedang bersengketa ini. Usaha ini nampak dengan tampilnya suatu konsep perdamaian yang dikemukakan oleh Ellswort Bunker dan diumumkan oleh pejabat Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 26 Mei 1962 ¹⁷² Adapun isi "usul Bunker" itu mengandung empat unsur pokok yaitu : ¹⁷³

1. Pemerintahan atas Irian Jaya harus diserahkan kepada RI.
2. Sesudah sekian tahun di bawah pemerintahan Republik, maka rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menentukan sendiri secara bebas nasib selanjutnya, tetap terus di dalam RI atau memisahkan diri dari RI.
3. Pelaksanaan penyerahan pemerintahan di Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu dua tahun.
4. Untuk menghindari bahwa kekuatan-kekuatan Indonesia langsung berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan Belanda, diadakan peralihan di bawah pengawasan PBB. Waktu peralihan ini yang berlaku selama setahun diperlukan untuk memulangkan seluruh Angkatan Perang Belanda dan seluruh pegawai Belanda dari Irian Jaya ke Nederland.

Sementara itu sedikit banyak pihak Amerika Serikat melakukan tekanan kepada pemerintah Kerajaan Belanda

untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Maksudnya untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya, dimana masing-masing memberi bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu Republik Indonesia dan Belanda. ¹⁷⁴

Menyadari hal itu Belanda kemudian menyatakan sikapnya yang pada prinsipnya menerima usul Bunker. Selanjutnya dilakukan perundingan-perundingan pendahuluan secara tertutup antara wakil-wakil Indonesia, Belanda dan PBB secara terpisah. Dari hasil perundingan-perundingan itu pada tanggal 18 Juni 1962 tercapai perumusan yang menyebutkan bahwa Belanda menerima urutan dari pokok-pokok yang tercantum dalam usul Bunker, dengan syarat pemerintah Belanda mendapat jaminan bagi hak-hak dan kepentingan rakyat Irian Jaya. Oleh karena dalam urutan usul Bunker tercantum juga penyerahan pemerintah Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia meskipun terlebih dahulu melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB maka ini berarti Belanda bersedia melepaskan kekuasaannya di wilayah Irian Jaya. Atas dasar ini Indonesia dapat menerima penafsiran Belanda. ¹⁷⁵

Sementara itu pada tanggal 21 Juli 1962 Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio diadakan perundingan dengan Presiden Kennedy. Dalam pertemuan ini dikemukakan bahwa kemungkinan perang atau damai kini terletak di tangan Presiden Kennedy. Bagi Indonesia perang berarti melibatkan seluruh kekuatan nasional, hal mana akan menguntungkan komunis. Dengan siasat itu Presiden Kennedy tergerak untuk mendesak pemerintah Belanda supaya menyetujui tanggal 1 Mei 1963 sebagai tanggal penyerahan administrasi Irian Jaya kepada Indonesia, dengan didahului oleh suatu masa peralihan selama enam bulan di mana administrasi Irian Jaya dipegang oleh PBB. ¹⁷⁶

Selanjutnya untuk merundingkan Usul Bunker diadakan perundingan-perundingan lanjutan antara kedua belah pihak dengan pengawasan PBB. Perundingan ini dilangsungkan

di Washington dan disaksikan oleh Pejabat Sekretaris Jenderal PBB U Thant.¹⁷⁷ Sebagai hasil dari perundingan-perundingan ini, maka pada tanggal 31 Juli 1962 tercapai suatu persetujuan sementara (Preliminary Understanding) yang berisi pokok-pokok sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda maka selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Badan Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA) akan tiba di Irian Jaya untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Saat itu juga bendera Belanda diturunkan, yang berarti kekuasaan atas daerah tersebut diserahkan kepada UNTEA.
- b. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putri Irian Jaya sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
- c. Pasukan-pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Jaya dan berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
- d. Angkatan Perang Belanda mulai saat itu secara berangsur-angsur dikembalikan Yang belum berangkat akan ditempatkan dalam pengawasan PBB dan tidak boleh dipergunakan untuk operasi-operasi militer.
- e. Antara Irian Jaya dengan daerah Indonesia lain berlaku lalu lintas bebas.
- f. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
- g. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Jaya dari Pemerintah Sementara PBB.

Sementara itu untuk memperkuat posisi Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Delegasi Belanda atas dasar Usul Bunker tersebut, operasi infiltrasi ke daerah Irian Jaya terus diperhebat. Sehubungan dengan itu pada tanggal 14 Agustus 1962 dilakukan operasi Jatayu yang menerjunkan penambahan pasukan dan perbekalan di daerah-daerah Sorong, Kaimana dan Merauke. Penerjunan ketiga daerah ini berhasil menerjunkan pasukan sejumlah 407 orang. Ternyata penerjunan ini merupakan perjunan pasukan yang terakhir di daerah Irian Jaya.¹⁷⁹

Penerjunan-penerjunan pasukan gerilyawan selama diadakan itu sempat menimbulkan protes Belanda. Akan tetapi Indonesia berpendirian bahwa aksi-aksi pendaratan dan penerjunan di daratan Irian Jaya baru berakhir setelah Belanda secara resmi membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian.¹⁸⁰

Menyadari akan kenyataan-kenyataan yang berkembang di daerah Irian Jaya maka pada tanggal 15 Agustus 1962, atas dasar prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Ellsworth Bunker, ditanda tangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda di Markas Besar PBB di New York. Peranan PBB disini hanya sebagai perantara dan Sekretaris Jenderal PBB U Thant bertindak sebagai saksi pada waktu penanda tangan persetujuan.¹⁸¹ Persetujuan ini terkenal dengan nama Persetujuan New York.

Sebagai tindak lanjut dari penanda tangan Persetujuan New York itu maka pada tanggal 16 Agustus 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Jaya mengeluarkan perintah penghentian tembakan-menembak dan permusuhan antara Belanda dan Indonesia terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1962.¹⁸²

Soal yang mendesak dalam persetujuan itu adalah perihal penyerahan administrasi Irian Jaya dari pihak pemerintah Kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk maksud tersebut maka di-

bentuklah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang bertugas untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Pada akhirnya sengketa Irian Jaya diselesaikan dengan penyerahan administrasi kepada Indonesia yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 dan dalam tahun 1963 itu juga dilakukan pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta.¹⁸³

Masa konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda dalam pembebasan Irian Jaya telah berakhir. Suatu babak baru harus dijalani, karena dengan ditanda tangannya Persetujuan New York persoalan tentang Irian Jaya belum tuntas.

Menurut pasal 18 dan 20 Persetujuan New York pemerintah Indonesia berkewajiban mengadakan Usaha-usaha untuk memberi kesempatan kepada rakyat Irian Jaya untuk melaksanakan kebebasan memilih dalam rangka perwujudan penentuan nasib sendiri. Perwujudan penentuan nasib sendiri itu akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969.¹⁸⁴ Dengan demikian pemerintah Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan perwujudan penentuan nasib sendiri yang kemudian lebih dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat di Irian Jaya.

Dalam melaksanakan "*act of free choice*" atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai suatu kewajiban pemerintah Indonesia, maka pemerintah harus mencari cara yang sebaik-baiknya, cara yang demokratis, dengan mengadakan konsultasi-konsultasi atau musyawarah Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD—DPRD) di Irian Jaya. Dengan demikian rakyat Irian Jaya melalui perwakilan-perwakilannya dapat ikut menentukan cara yang sebaik-baiknya, cara yang demokratis dan yang cocok dengan keadaan dan kondisi daerah dan rakyat Irian Jaya sendiri.¹⁸⁵

Meskipun pada hakekatnya rakyat Irian Jaya bersama rakyat Indonesia lainnya telah menentukan pendapatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai satu bangsa Indonesia, akan tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Tim Konsultasi Pemerintah Pusat Sudjarwo Tjondronegoro pemerintah Indonesia sudah "committed" (terikat pada janji) untuk melaksanakan babak terakhir dari Persetujuan New York itu. ¹⁸⁶

Selama 7 tahun sejak penyerahan administrasi Irian Jaya dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia, pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi tugasnya di Irian Jaya yaitu "mempergiat lebih lanjut pendidikan rakyat, pemberantasan buta huruf, kemajuan perkembangan sosial, kebudayaan dan ekonomi" ¹⁸⁷ Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa pembebasan Irian Jaya dari cengkeraman penjajahan bukan hanya sekedar mengenyahkan kolonialis Belanda dari bumi Irian Jaya, akan tetapi juga tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat Irian Jaya sebagai bagian dari perwujudan masyarakat adil makmur bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pepera di Irian Jaya menurut keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Jaya No. 31 Tahun 1969 disebutkan bahwa, besarnya jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) didasarkan atas jumlah penduduk Kabupaten, di mana tiap \pm 750 orang penduduk dari segala umur diwakili oleh seorang wakil rakyat dewasa. Mengingat perbedaan yang tidak sedikit antara jumlah penduduk kabupaten-kabupaten di Irian Jaya, maka jumlah anggota DMP ditetapkan sedikitnya 75 orang dan sebanyak-banyaknya 175 orang. ¹⁸⁸ Semua wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DMP tersebut harus memenuhi syarat-syarat dalam pasal XVIII sub d Persetujuan New York. ¹⁸⁹

Sejalan dengan hal tersebut di depan sidang DPRD Propinsi Irian Jaya pada tanggal 18 April 1969 Ketua Tim Konsultasi Pemerintah Pusat Sudjarwo Tjondronegoro mengemukakan sebagai berikut. ¹⁹⁰

- 1) Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Jaya akan mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP) untuk setiap kabupaten.
- 2) Anggota DMP untuk setiap kabupaten ditetapkan:
 - a. Kabupaten Merauke 175 orang (maksimal)
 - b. Kabupaten Pegunungan Jayawijaya 175 orang (maksimal)
 - c. Kabupaten Paniai 175 orang (maksimal)
 - d. Kabupaten Fakfak 75 orang (minimal)
 - e. Kabupaten Sorong 110 orang
 - f. Kabupaten Monokwari 75 orang
 - g. Kabupaten Teluk Cenderawasih 130 orang.
 - h. Kabupaten Jayapura 110 orang.

Jumlah seluruh anggota DMP daerah Irian Jaya menjadi 1025 orang.

Sebelum penetapan anggota-anggota DMP, di tiap kabupaten dibentuk Panitia Pembentukan DMP Kabupaten, Anggota Panitia di tiap kabupaten ditetapkan berjumlah 9 orang dengan mayoritas terdiri dari putra-putra daerah Irian Jaya yang menjadi anggota DPRD Kabupaten¹⁹¹ Dari 72 orang anggota Panitia Pembentukan DMP untuk 8 kabupaten, putra-putra Irian Jaya terdiri atas 46 orang anggota (63,8%) dan 26 orang anggota (36,2%) terdiri atas putra-putra Indonesia lainnya.

Adapun cara pemungutan suara dalam Pepera itu tidak akan dilakukan dengan persuaraan orang perseorangan, melainkan dengan cara musyawarah (untuk mufakat) dan lewat perwakilan-perwakilan rakyat, yang wakil-wakilnya dipilih oleh rakyat dan dari rakyat Irian Jaya, dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan New York tentang siapa-siapa yang dapat ikut serta dalam Pepera itu.¹⁹²

Oleh karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pepera itu sesuai dengan Persetujuan New York adalah

Pemerintah Republik Indonesia sendiri, maka Pemerintah Belanda tidak akan ikut campur tangan lagi. Demikian pula halnya Sekretaris Jenderal PBB yang PBB yang diwakili oleh Misi Ortiz Sans hanya bertugas memberi "bantuan dan saran" seperlunya kepada Pemerintah RI dalam melaksanakan Pepera dan ikut serta menyaksikan ("te-be-present") dalam pelaksanaan Pepera tersebut. ¹⁹³)

Selama masa 7 tahun sejak 1 Mei 1963 hingga menjelang pelaksanaan Pepera tahun 1969, bukan tidak ada suara-suara yang menghendaki agar pemungutan suara dalam Pepera dilakukan atas dasar "adult suffrage" (setiap orang dewasa mempunyai hak memilih) dan *one vote*" (setiap orang mempunyai satu suara. ¹⁹⁴ Nada sumbang yang disuarakan itu merupakan dendang dari senandung kelompok yang tidak menghendaki Irian Jaya tetap dalam pangkutan Ibu Pertiwi. Sekiranya benar hendak ditarapkan cara-cara tersebut, berapa lama Pepera akan berlangsung? Bagi negara yang telah maju, yang telah bebas dari buta huruf serta didukung oleh kesadaran bernegara dan berpolitik maupun didukung oleh keadaan lalu lintas yang terbuka, cara-cara itu dapat saja ditempuh. Akan tetapi kondisi di wilayah Irian Jaya ini tidak memungkinkan penerapan cara-cara yang disebut "international practice" itu. Apalagi bagi bangsa Indonesia yang memiliki sistem Demokrasi Pancasila, musyawarah (untuk mufakat), tentulah "international practice" cara Barat itu tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, meski ada suara-suara sumbang, Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pepera di Irian Jaya tetap memilih cara musyawarah untuk mufakat itu. Berdasarkan ketentuan DMP di tiap-tiap kabupaten selambat-lambatnya harus sudah terbentuk pada tanggal 1 Juli 1969. Dengan demikian dalam bulan Juli 1969 itu secara berturut-turut per kabupaten Pepera diselenggarakan sehingga pada awal bulan Agustus 1969 Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di seluruh kabupaten di Irian Jaya telah selesai dilak-

sanakan. Dengan demikian diharapkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1969 keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah benar-benar terwujud secara *de facto* dan *de jure* dengan hasil Pepera 1969 itu.¹⁹⁵

Momentum Pepera Irian Jaya telah dapat dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan New York dan hasilnya Rakyat Irian Jaya telah menentukan tetap bersatu di dalam wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan pasal XXI ayat 2 Persetujuan New York, hasil Pepera itu akan diterima oleh kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda. "Pihak-pihak pada persetujuan sekarang ini akan mengakui dan menaati hasil-hasil perwujudan penentuan nasib sendiri itu".¹⁹⁶

Sebagai suatu gambaran situasi pada saat-pelaksanaan Pepera di Jayapura tentang bagaimana kehendak rakyat Irian Jaya untuk tetap bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat disimak dari kata-kata yang diucapkan di depan sidang oleh seorang wakil rakyat yang duduk dalam DMP sebagai berikut :

"Mengapa harus pisah dari Indonesia kalau anak-anak kita sekarang telah memasuki sekolah?" Ini adalah sebuah pernyataan yang lugas dari rakyat Irian Jaya.

Demikianlah dalam kenyataannya bahwa dari awal mula perjuangan pembebasan Irian Jaya dari penjajahan telah dibina oleh putra-putra pejuang Irian Jaya pada masa awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini melalui jalan yang panjang dengan banyak pengorbanan dan penderitaan putra-putra Irian Jaya sendiri. Pada akhirnya palu telah dijatuhkan, yang merupakan "point of no return" rakyat Irian Jaya, tetap bersatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Irian Jaya penduduk di daerah ini khususnya di daerah pesisir pantai Utara dan pantai Barat telah mempunyai hubungan dengan daerah Indonesia lainnya. Jalinan hubungan itu terutama dalam kegiatan perdagangan yang telah berlangsung sejak Zaman Sriwijaya dan kemudian jalinan hubungan tersebut lebih meningkat ke dalam jalinan hubungan politik pada masa kekuasaan kerajaan Mojopahit. Beberapa daerah Irian Jaya telah menjadi bagian kerajaan Mojopahit. Hubungan berlanjut sampai masa kerajaan Tidore.
2. Pada waktu kedatangan bangsa Eropa penduduk Irian Jaya telah mengadakan perlawanan dalam berbagai bentuk. Akan tetapi semua perlawanan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh bangsa Eropa terutama Bangsa Belanda yang berhasil menduduki daerah ini beberapa abad lamanya. Tidak berhasilnya perlawanan penduduk mengusir kaum pendatang yang akhirnya menjadi penjajah itu disebabkan oleh :
 - a. Perlawanan penduduk Irian masih bersifat sendiri-sendiri. Belum ada persatuan di kalangan mereka yang dapat memadukan perlawanan itu.
 - b. Masih sangat sederhananya alat-alat senjata yang digunakan seperti panah, tombak, golok dan semacamnya; sedangkan pihak penjajah memiliki senjata-senjata modern.
 - c. Darah Irian Jaya pada waktu itu belum terjalin dalam hubungan komunikasi yang baik sehingga

setiap tempat/wilayah tidak ada kontak satu dengan lainnya.

Keadaan topografi yang kasar dimana terdapat banyak rawa, sungai, gunung tinggi, lembah yang dalam dengan hutan latan yang amat lebat sangat tidak memudahkan untuk jalur komunikasi di daerah ini.

d. Politik adu domba yang dilancarkan oleh pihak penjajah Belanda.

3. Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda mulai nampak teroganisasi sesudah selesainya Perang Dunia II. Kontak-kontak antar para pejuang dari satu daerah ke daerah lainnya mulai lebih mudah dan lancar.

Pengaruh perjuangan kemerdekaan di daerah Indonesia lainnya dan datangnya tokoh-tokoh pergerakan yang dibuang Belanda ke Digul, Serui dan Manokwari semakin mendorong para pejuang di Irian Jaya untuk bergerak lebih jauh.

Perlawanan bersenjata semakin sering terjadi Organisasi perjuangan mulai dibentuk diberbagai tempat.

4. Perjuangan Bangsa Indonesia membebaskan Irian Jaya dari cengkeraman kolonialisme memang dimulai dari kalangan rakyat Irian Jaya sendiri. Kesadaran sebagai Bangsa Indonesia melahirkan organisasi-organisasi perjuangan untuk membebaskan daerah ini pada masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia. Namun demikian kurangnya penggerak perjuangan serta keadaan masyarakat yang masih "terbelakang" dan jauhnya wilayah dari pusat "api revolusi" mengakibatkan daerah ini tidak bersama-sama mengecap alam kemerdekaan dengan daerah Indonesia lainnya. Di sisi lain ada upaya dari pihak kolonial untuk menjadikan daerah ini "perbentengan terakhir" politik imperialisme mereka di Nusantara dan di Pasifik Barat.

5. Tuntutan sejarah atas keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada titik puncaknya melahirkan TRIKORA yaitu "tiga komando rakyat" yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno untuk membebaskan daerah Irian Jaya dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Belanda. Di dalam menyukseskan TRIKORA putera-putera Irian Jaya telah berperan serta secara sadar dan penuh.

Melalui perjuangan yang memakan banyak korban rakyat Indonesia telah membuktikan kepada dunia sebagai bangsa yang cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Demikianlah TRIKORA berhasil membebaskan daerah ini dari cengkeraman pihak imperialis/kolonialis.

6. Meskipun daerah Irian Jaya telah kembali kepangkuan Ibu Pertiwi sejak 1 Mei 1963 sebagai hasil perjuangan bangsa, akan tetapi Bangsa Indonesia masih terikat oleh suatu persetujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Irian Jaya menentukan pilihannya: tetap bersatu dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri. Masa antara tahun 1963 sampai saat pelaksanaan "*act of free chice* " atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 merupakan batu ujian bagi Bangsa Indonesia khususnya bagi rakyat Irian Jaya. Mereka diuji apakah perjuangan yang pernah dicetuskan pada masa awal revolusi masih berkobar menyala di dada putera-putera Irian Jaya. Ternyata rasa kebangsana dan kebersamaan yang menyatu sejak semula, menentukan kata akhir: rakyat Irian Jaya tetap bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

B. S A R A N

1. Peran serta rakyat Irian Jaya dalam perjuangan mewujudkan kesatuan Republik Indonesia dibuktikan de-

ngan adanya tokoh-tokoh pejuang Irian Jaya. Meski kepada mereka telah diberikan penghargaan, akan tetapi melalui penelitian perlu adanya peningkatan sehingga tokoh-tokoh Irian Jaya dapat juga mengisi lembaran sejarah Bangsa Indonesia dalam skala nasional.

2. Buku-buku Sejarah Nasional Indonesia yang ada sekarang belum banyak mengungkap sejarah perjuangan rakyat Irian Jaya dalam membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Untuk memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme bagi generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke serta mewujudkan kesatuan Wawasan Nusantara dan penghayatan ke Bhinnekaan Bangsa Indonesia, seyogyanya perjuangan rakyat Irian Jaya dimasukkan kedalam buku-buku teks Sejarah Nasional Indonesia.
3. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dari belenggu Pemerintah Kolonial Belanda banyak melibatkan putera-puteri asli Irian Jaya. Meski seorang pejuang tidak akan menuntut balas jasa, tetapi karena kepada para petugas TRIKORA diberikan imbalan jasa, sudah sewajarnya lah kiranya kepada putera-putera Irian Jaya yang telah berperan serta secara sadar dan penuh pengorbanan dalam rangka menyukseskan TRIKORA juga diberikan imbalan jasa yang memadai. Dengan demikian hambatan psikologis politis sebagai ekses penghargaan tersebut dapat dieliminir.

CATATAN

BAB II

1. Nama Irian Jaya mulai digunakan sejak 1 Maret 1973 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1973 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1973). Sebelumnya daerah ini disebut Irian Barat; juga dikenal dengan nama Nederlandsche Nieuw Guinea pada masa pemerintahan Belanda.
2. Negara Papua Nugini atau Papua New Guinea (disingkat PNG) baru memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada tanggal 16 September 1975.
3. Humas Pemda Propinsi Irian Jaya, *Mengenal Propinsi Irian Jaya* Jayapura, 1974, hal 1 (Naskah Stensilan)
4. *Data-data Singkat Tentang Daerah Irian Jaya*, T.p), 1973, hal. 1 (Naskah Stensilan).
5. Staf Penguasa Perang Tertinggi, *Mengenal sebagian Dari Tanah Air Kita, Irian Barat*, Edisi ketiga, Jakarta 1962, hal. 70 - 72.
6. *Ibid.* hal 74, 138 dan 149.
7. Humas Pemda Propinsi Irian Jaya, *Op. Cit.* hal 13 - 14
8. Staf Penguasa Tertinggi, *Op. Cit.*, hal 166.
9. Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya, *Sensus Penduduk Tahun 1980, Hasil Percakapan lengkap Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya, Agustus 1981*, hal. 1
10. Mulyono, "Bahasa di Irian Barat" dalam buku : *Penduduk Irian Barat*, Kontjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar Red. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1963, hal. 29 - 30.
11. Kantor Statistik, *Op. Cit.*, hal. 5.
12. Koentjaraningrat, *Keseragaman dan Aneka-Usaha Masyarakat Irian Barat*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1970, hal. 7.

13. Ibid. hal. 8 dan 128.
14. Sujono, P.S., "Praehistori Irian Barat", dalam *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar (Red), Proyek Penelitian Universitas Indonesia, No. CII. P.T. Penerbitan Universitas, hal. 39.
15. *Ibid.*, hal. 43.
16. *Ibid.*, hal. 47.
17. Ibid., hal. 49.
18. Ibid., hal. 45.
19. Harsya W. Bachtiar, "Sejarah Irian Barat", dalam buku *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar (Red), Proyek Penerbitan Universitas 1963, Hal. 55 - 56 dan hal. 57 - 65.
20. Pouwer, J., *Kroniek dor Aanrakigen Met Vestigi in de Onderafdeling Mimika*, (Stensilan).
21. Harsya W. Bachtiar, *Op. Cit.*, hal. 55. Lihat juga Muhamad Yamin, Prof. H., *Tatanegara Mojopahit Parwa III* Yayasan Prapanca, Jakarta, 1962, hal. 119 - 132.
22. Pouwer, J., *Loc. Cit*
23. Harsya W. Bachtiar, *Op. Cit.* hal. 58
24. Le Roux, C.C.F.M., Nieuw Guinea, Molukken Instituut, Amsterdam, Vol. I - II, 1935.
25. Anonimus, "Pasificatie en Openligging", *Oost en West*, 26^{ste}, jaargang, 1960, hal. 4 - 6.
26. H. Renwarin, *Bapak Guru pada Masa Kolonial Belanda di Kecamatan Mimika, 1926 - 1960*, (Hasil penelitian).
27. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan, Seri Perjuangan Ex Digoel*, Jakarta, 1977. Lihat juga : H.F. Samosir, B.A., *Boven Digoel Tanah Merah Dalam Tiga Zaman*, 1980. (Ketikan); Kasiran, *Laporan Hasil Perja-*

lanan Dinas Team P4SPI Direktorat Jenderal Kebudayaan Bapak Drs. Suwadi Syafei dan Bapak Drs. Effendi di Tanah Merah. (ketikan).

28. Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial, *Op. Cit.*, hal. 73.
29. *I b i d.*, h
29. *I b i d.*, hal. 54 - 46.
30. Harsya W. Bachtar, *Op. Cit.*, hal. 77 - 79.
31. *I b i d.*, hal. 73.
32. Staatsdrukkerij en Uitgenerijbedrijf, *Toekomstige Ontwikkeling van Nieuw Guinea*, S - Gravenhage, Deel I, 1953, hal. 41 - 43.
33. *I b i d.*, hal. 14 - 23.
34. Hrsya W. Bachtar, *Op. Cit.*, hal. 87.
35. *I b i d.*, hal. 89.
36. *Loc. Cit.*
37. *I b i d.*, hal. 89 - 90. Lihat juga: Soeripto, *Dokumen Irian Barat*, Grip, Surabaya, 1962, hal. 10.

BAB III

1. Department of Information, *A. Chronology of Indonesian History*, Special Issue, 57, Jakarta, 1960.
2. F.J.P. van Hasselt, "Geschiedenis van het Zendings onderwijs op Noor-Nieuw-Guinea", *Modelingen, Tijdschrift voor Zendeings wetenschap*, 66^e, Jaargang, 1922, hal. 322.
3. W.C. Klein, "Wat door Nederland in de laatstevier jaren op Nieuw-nGuinea gedaan is", *Kolonial Tijdsschrift*, XXVII, hal. 464 dalam buku: Penduduk Irian Barat, Koentjaraningrat dan Harsya W. Bachtar Ree. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1963, hal. 29 - 30.

4. K.W. Galis, Drs., "Geschiedenis", Klein, W.C. (red), *Nieuw-Guinee*, Drukkerij en uitgeverij, J.H. de Eusky, Amsterdam, 1938, hal. 25 - 34.
5. Pdt. J.F.S. Romainum, *Sepuluh Tahun G.K.I. sesudah Seratus Satu Tahun Zending di Irian Barat*, Kantor Pusat G.K.I. Sukarnapura, 1966, hal. 7 - 12.
6. F.J.P. Van Hasselet, "Zending", Klein, W.C., (Ed), *Nieuw Guinee*, Drukkery en uitgevery, J.H. de Bussy, Amsterdam 1935, hal. 100 - 105.
7. *Ibid*, hal 109 - 115.
8. Pdt. J.J.S. Romainum, *Op. Cit.* hal. 13 - 18.
9. *Ibid*, hal. 18 - 22.
10. *Ibid*, hal. 23 - 24.
11. J. Verscheuren, "De Katolieke Missie", dalam buku: *Nieuw Guinea*, Klein W.C. (Ed.), Staatsdrukkerij-En Uitgeverijbedrijf, 'S-Grovenhage, 1953, hal. 181-120.
12. *Ibid*, hal. 186 - 187.
13. K.W. Galis, "Geschiedenis", Klein, W.C. Kolonial Tijdschrift, XXVII, 1938, hal 31 dan 32
14. *Ibid*, hal. 32 - 34.
15. H. Haripranata, S.J., *Ichtsar Kronologis Sejarah Gereja Katolik Irian Barat*, Jilid II, Sukarnapura, 1969, hal. 1 - 15.
16. J. Pouwer, *Kroniek der Aarakingen Met Vetigingen in de Onderafdeling Mimika* (Stensilan).
17. Peters, F.M., *Aanvullende Momorie van Overgave van de Onderafdeling Manokwari*, 1961
18. J.J.W. Dubois, *Memorie Van Overgade van het Onderafdelings hoofd J.J.W. Dubois betreffende Hollandia*, 1961, hal. 25.
19. Koentjaraningrat, menyebutkan gerakan Kebatinan dalam

- buku : *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan Hasya W. Bachtiar (Ed.), Proyek Penerbitan Universitas Indonesia, No. C.II, P.T. Penerbitan Universitas, 1963, hal. 361.
20. Hasya W. Bachtiar, "Sejarah Irian Barat", dalam buku: *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan Hasya W. Bachtiar (Ed.), Proyek Penerbitan Universitas Indonesia, No. C.II, P.T. Penerbitan Universitas, 1963, hal. 63.
 21. *Loc Cit.*
 22. Bijblad No. 14377 dalam Hasya W. Bachtiar, *ibid*, hal. 70.
 23. *Ibid*, hal. 71
 24. *Ibid*, hal. 68.
 25. Internationale Nateuers bescheher frening, k938 hal. 10 dalam Hasya W. Bachtiar *op cit*, hal. 69
 26. W.C. Klein, *op cit*, h 1. 461.
 27. Japanese undrground Activities, 1942 hal. 18 - 19 dalam buku : *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan Hasya W. Bachtiar (Ed.), Proyek Penerbitan Universitas Indonesia, No. C. II, P.T. Penerbitan Universitas, 1963, hal. 72
 28. J.J. Stratenus, 1952, hal. 15, dalam buku *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan Hasya W. Bachtiar (Ed.), Proyek Penerbitan Universitas Indonesia, No. C.II, P.T. Penerbitan Universitas, 1963, hal. 72.
 29. Mampioper, *Jayapura Ketika Perang Pasifik* Labour, Jayapura, 1973, hal. 14.
 30. H. Renwarin, Munculnya *Daerah-Daerah Pemukiman di Jayapura, 1910 - 1960*, (hasil penelitian) lihat juga : K.W. Galis dan *op cit* 50 jaar Hollandia
 31. H. Renwarin, *Bapak Guru pada Masa Kolonial Belanda di Kecamatan Mimika, 1926 - 1960*. (hasil penelitian).
 32. Hasya W. Bachtiar, *op cit*, hal. 73.

33. Koentjaraningrat, Penduduk terhadap Perubahan Zaman dalam buku Penduduk Irian Barat, *op cit*, hal. 365.
34. Hasya W. Bachtiar *Lac Cit*.
35. *Ibid*
36. Koentjaraningrat, "Penduduk terhadap Perubahan Zaman", *op cit*. hal. 366.
37. M.R. Dayoh, *Pukul Tiga*, hal. 64.
38. *Ibid*, hal. 65.
39. *Laporan Hasil Perjalanan Dinas Team P4SPJ Direktorat Jenderal Kebudayaan Bapak Drs. Suwadi Syafei dan Bapak Ans. Effendi di Tanah Merah* (stensilan) Lihat juga : H.F. Samosir, BA, *Boven Digul Tanah Merah dalam Tiga Zaman* (ketikan), Harsya W. Bachtiar, *op. cit.* hal. 65-68, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, *Citra dan Perjuangan Panitia Kemerdekaan* Jakarta, 1977.

